



**HUBUNGAN AMERIKA SERIKAT DAN FILIPINA DI ERA  
PEMERINTAHAN DONALD TRUMP**

***THE RELATION OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND  
PHILIPPINES IN DONALD TRUMP ERA***

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh:

**Nur Safura Afif  
NIM 130910101028**

**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**



**HUBUNGAN AMERIKA SERIKAT DAN FILIPINA DI ERA  
PEMERINTAHAN DONALD TRUMP**

***THE RELATION OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND  
PHILIPPINES IN DONALD TRUMP ERA***

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh:

**Nur Safura Afif**

**NIM 130910101028**

**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orangtua saya, Ayah Mujadid dan Ibu Hanik Endang Susilowati. Semoga senantiasa diberikan kesehatan untuk kalian berdua.
2. Kakakku, Ahmad Syaifudin Ibrahim, dan adikku, Alisa Wardah. Semoga selalu diberikan kemudahan dalam urusannya dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa.
3. Seluruh guru dan pengajar yang pernah memberikan ilmunya kepada penulis. Semoga segala amal baik kalian dicatat oleh Allah SWT sebagai amalan yang bermanfaat.
4. Almamater Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
5. Muhammad Mukhlis, terima kasih untuk dukungannya yang selalu memberikan semangat selama menyusun skripsi.
6. Teman – teman dari TK sampai sekarang yang selalu memberikan semangat.
7. Sepupu – sepupu: Abidah, Yusrida Adiyati, Rizki Ridha Fitri, Hanifatul Azizah. Terima kasih telah memberikan semangat dan doa.
8. The Powerpuff Girl: Anisa Yusa, Ventilia Septiani, Sari Retna, Puput Wijayanti, Anisa Sabrina dan Cici. Terima kasih telah menemani dari masa SMA hingga saat ini dalam suka maupun duka.
9. Genks Ajay: Claudia Putri, Evira Diah, Farwa Fatimah, Lisa Riska, Merinda, Rahmalia, dan Tamara, yang selalu menemani dan memberikan semangat dalam menyusun skripsi.

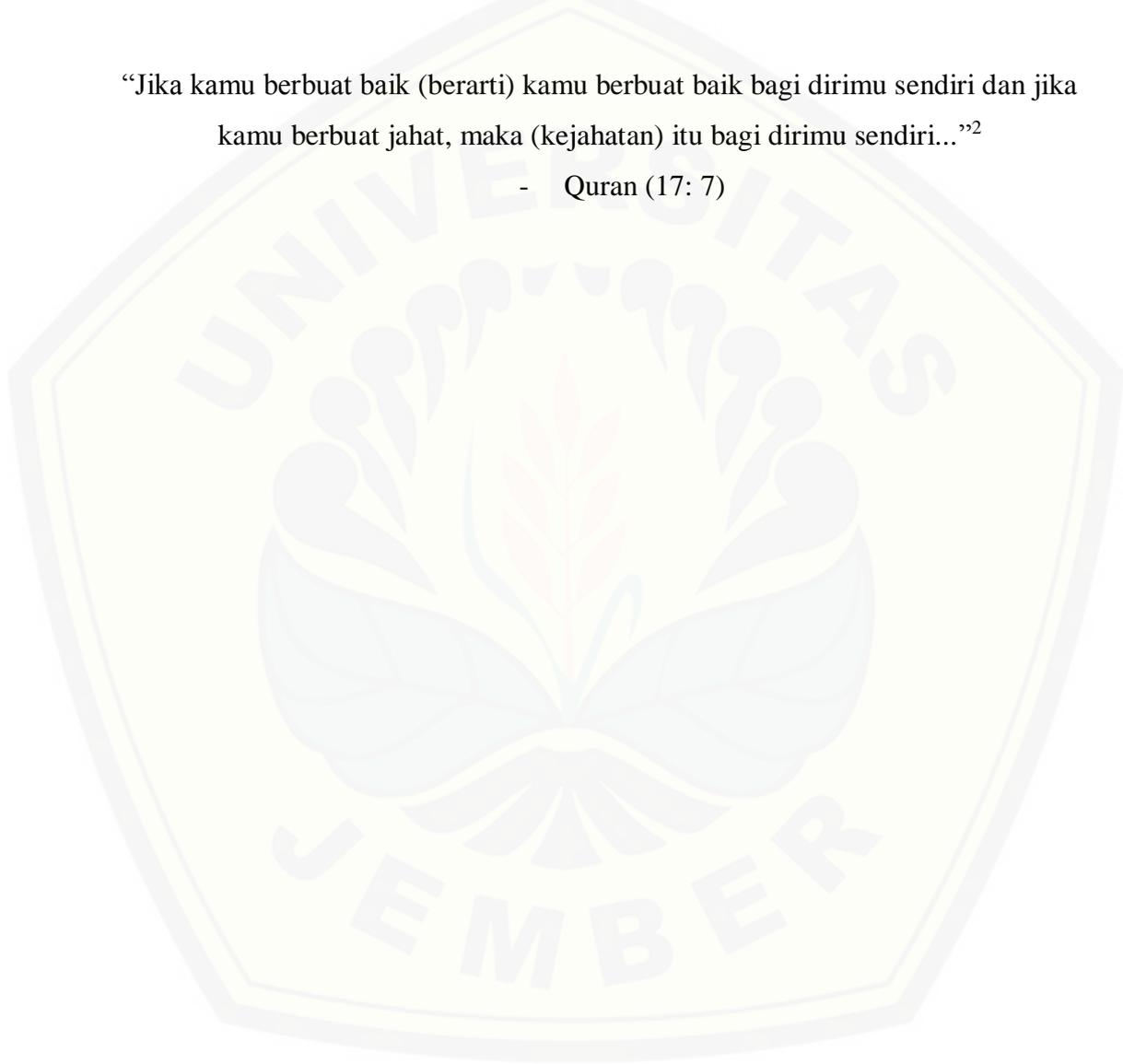
**MOTTO**

“And my success can only come from Allah. In Him I trust, and into Him I return”<sup>1</sup>

- Quran (11: 88)

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri...”<sup>2</sup>

- Quran (17: 7)



---

<sup>1</sup> Rifhan, Arif. 2010, hal 424. Al – Qur’an Tiga Bahasa. Depok: Al – Huda Kelompok Gema Insani

<sup>2</sup> Rifhan, Arif. 2010, hal 527. Al – Qur’an Tiga Bahasa. Depok: Al – Huda Kelompok Gema Insani

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Safura Afif

NIM : 130910101028

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“Hubungan Amerika Serikat dan Filipina di Era Pemerintahan Donald Trump”** adalah hasil karya sendiri berdasarkan pedoman penyusunan karya tulis ilmiah. Setiap pengutipan substansi selalu menyertakan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun, serta bersedia menerima sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 31 Mei 2018

Yang menyatakan

Nur Safura Afif

NIM 130910101028

**SKRIPSI**

**HUBUNGAN AMERIKA SERIKAT DAN FILIPINA DI ERA  
PEMERINTAHAN DONALD TRUMP**

***THE RELATION OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND  
PHILIPPINES IN DONALD TRUMP ERA***

Oleh:

**Nur Safura Afif**

**130910101028**

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Drs. M Nur Hasan, M. Hum

Dosen Pembimbing Anggota : Adhiningasih P. S.Sos, M.Si

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul “**Hubungan Amerika Serikat dan Filipina di Era Pemerintahan Donald Trump**” telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Jumat, 6 Juli 2018

Waktu : 09.00

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua

Agus Trihartono, S. Sos, MA., Ph.D.

NIP. 196908151995121001

Sekretaris I

Sekretaris II

Drs. M. Nur Hasan, M. Hum

NIP. 195904231987021001

Adhiningasih P. S. Sos, M. Si

NIP. 197812242008122001

Anggota

Drs. Djoko Susilo, M. Si.

NIP. 195908311989021001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M. Si.

NIP. 195808101987021002

## RINGKASAN

**Hubungan Amerika Serikat dan Filipina di Era Pemerintahan Donald Trump**; Nur Safura Afif; 130910101028; 2018; 84 Halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Amerika Serikat dan Filipina bersepakat untuk saling melakukan kerja sama bilateral yang dimulai pada tahun 1947. Namun demikian, hubungan kerja sama yang dilakukan antara Amerika Serikat dan Filipina tidak selalu berjalan dengan lancar dan stabil. Hubungan kerja sama yang mereka lakukan pun mengalami naik dan turun. Salah satu ketegangan hubungan kerja sama yang terjalin antara Amerika Serikat dengan Filipina adalah pada masa pemerintahan Barack Obama, tepatnya pada masa akhir jabatan pemerintahan Barack Obama. Berawal pada saat Presiden Rodrigo Duterte mulai menjabat di Filipina yang menjalankan kebijakan perang melawan Narkoba. Kebijakan tersebut berupa kebijakan mengenai pemberantasan Narkoba, dengan membunuh bagi siapa pun yang terlibat dalam kejahatan Narkoba, baik pengguna Narkoba maupun pengedar Narkoba yang menolak untuk ditangkap. Memburuknya hubungan kerja sama antara kedua negara ini terjadi pada saat Pemerintah Amerika Serikat menilai bahwa kebijakan perang melawan Narkoba oleh Presiden Rodrigo Duterte telah melanggar hak asasi manusia, karena telah membunuh ribuan orang, yaitu sekitar 4.100 orang tanpa melalui jalur hukum yang jelas. Namun demikian, pada saat Amerika Serikat melakukan pergantian kepresidenan, yang dimenangkan oleh Donald Trump, Amerika Serikat berkeinginan untuk tetap melanjutkan kerja sama bilateral dengan Filipina.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam meneliti faktor – faktor yang melandasi kepentingan Amerika Serikat di era pemerintahan Donald Trump untuk tetap melanjutkan kerja sama bilateral dengan Filipina adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur. Untuk proses analisis data, penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif guna menganalisis, menggambarkan dan menjelaskan faktor – faktor apa yang

melandasi kepentingan Amerika Serikat di era pemerintahan Donald Trump untuk tetap melanjutkan kerja sama bilateral dengan Filipina.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, faktor – faktor yang melandasi kepentingan Amerika Serikat di era pemerintahan Donald Trump untuk tetap melanjutkan kerja sama bilateral dengan Filipina adalah karena adanya kepentingan yang sama antara Presiden Donald Trump dengan Presiden Rodrigo Duterte mengenai perang melawan Narkoba, faktor kedua adalah munculnya ancaman keamanan bersama antara Amerika Serikat dengan Filipina masa Pemerintahan Donald Trump dalam memberantas kelompok militan ISIS, dan faktor ketiga adalah fakta yang terjadi pada Amerika Serikat terhadap Filipina untuk mengimbangi pengaruh China dalam sengketa Laut China Selatan.

## PRAKATA

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia – Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Hubungan Amerika Serikat dan Filipina di Era Pemerintahan Donald Trump”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

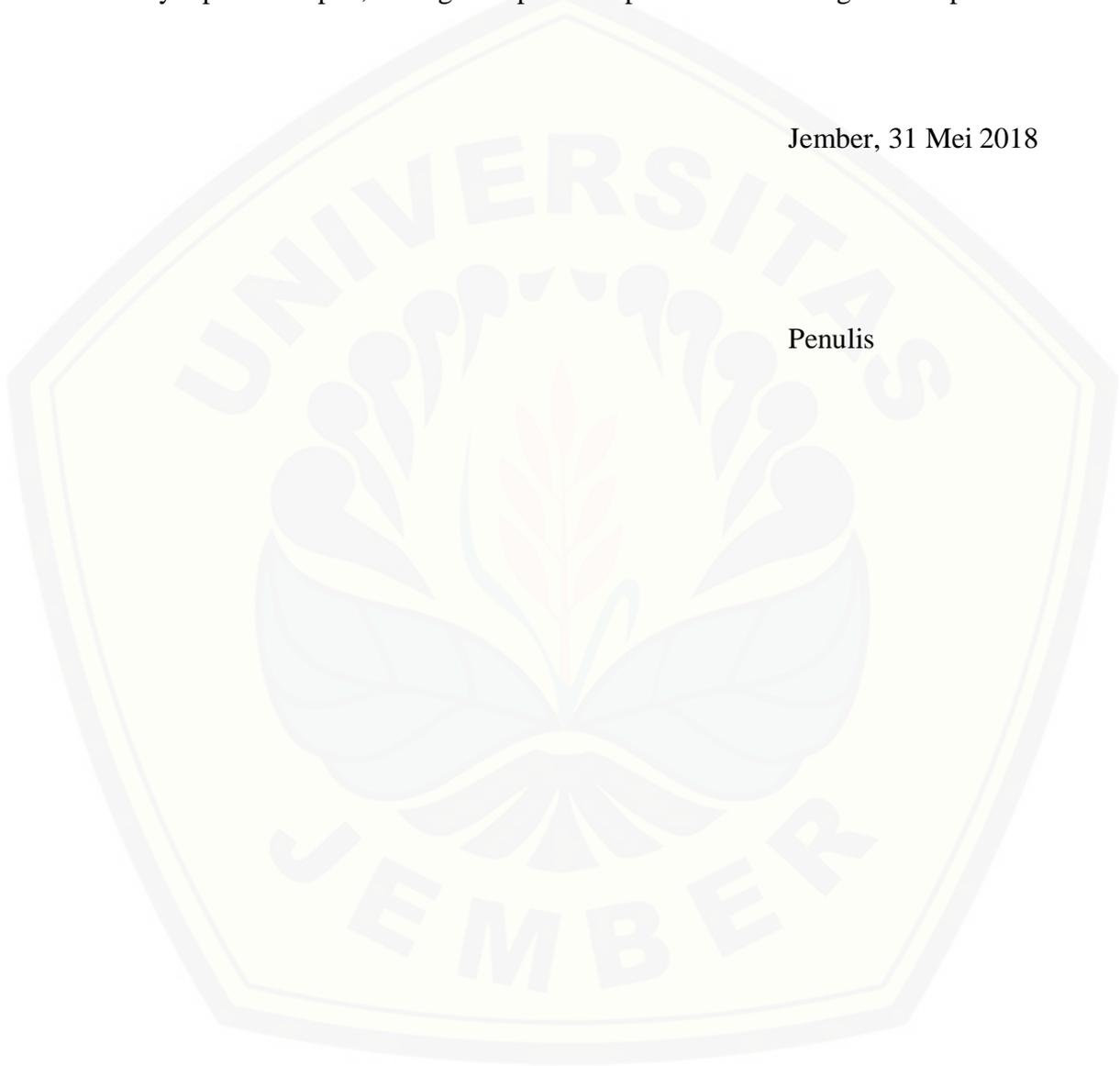
Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua, Ayah Mujadid dan Ibu Hanik Endang Susilowati yang sudah menjadi panutan dan tempat belajar yang luar biasa dalam hidup, serta terima kasih untuk semua doa, kasih sayang dan pengorbanan yang luar biasa.
2. Bapak Dr. Ardiyanto, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs. M Nur Hasan, M.Hum, selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu, pikiran, perhatian dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Adhiningasih Prabhawati, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing anggota dan dosen pembimbing akademik yang sudah sabar dan meluangkan banyak waktu untuk membimbing penulis selama proses pengerjaan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf karyawan di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember atas segala ilmu yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswa.
6. Teman–teman Hubungan Internasional 2013 yang telah menjadi teman sekaligus partner diskusi dalam kuliah.

Terima kasih banyak untuk semua bantuan dan dukungan semua pihak selama ini. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tentu masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini, dan tidak berlebihan kiranya apabila penulis menyelipkan harapan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 31 Mei 2018

Penulis



**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	<b>1</b>
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan.....	<b>8</b>
1.2.1 Batasan Materi.....	<b>9</b>
1.2.2 Batasan Waktu .....	<b>9</b>
1.3 Rumusan Masalah .....	<b>10</b>
1.4 Tujuan Penelitian.....	<b>10</b>
1.5 Kerangka Konseptual .....	<b>10</b>
1.5.1 Konsep Hubungan Bilateral .....	<b>11</b>
1.6 Argumen Utama .....	<b>14</b>
1.7 Metode Penelitian.....	<b>15</b>
1.7.1 Metode Pengumpulan Data .....	<b>15</b>
1.7.2 Metode Analisis Data.....	<b>16</b>
1.8 Sistematika Penulisan .....	<b>16</b>

<b>BAB 2. HUBUNGAN AMERIKA SERIKAT DENGAN FILIPINA PADA MASA PEMERINTAHAN BARACK OBAMA.....</b>	<b>18</b>
2.1 Hubungan Amerika Serikat Dengan Filipina Pada Periode Pertama Masa Jabatan Barack Obama .....	19
2.1.1 Kerja Sama Dalam Bidang Ekonomi.....	21
2.2 Hubungan Amerika Serikat Dengan Filipina Pada Periode Kedua Masa Jabatan Barack Obama .....	22
2.2.1 Kerja Sama Dalam Bidang Pertahanan Dan Keamanan Antara Amerika Serikat Dengan Filipina Pada Masa Pemerintahan Barack Obama.....	22
2.3 Isu-Isu Aktual Dan Dampaknya Terhadap Hubungan Amerika Serikat Dan Filipina .....	29
2.3.1 Kebijakan Narkoba Presiden Rodrigo Duterte.....	29
2.3.2 Dampak Yang Terjadi Terhadap Hubungan Amerika Serikat Dan Filipina.....	33
2.3.3 Ancaman Pengusiran Militer Amerika Serikat Di Filipina	33
2.3.4 Ancaman Pengusiran Diplomat Uni Eropa Di Filipina .....	34
<b>BAB 3. SIKAP AMERIKA SERIKAT DIBAWAH KEPEMIMPINAN DONALD TRUMP TERHADAP FILIPINA.....</b>	<b>36</b>
3.1 Kemenangan Donald Trump .....	36
3.2 Kebijakan Amerika Serikat pada Masa Pemerintahan Donald Trump .....	37
3.3 Hubungan Bilateral Amerika Serikat dan Filipina Masa Pemerintahan Sebelum Donald Trump .....	45
3.4 Amerika Serikat dengan Filipina Masa Pemerintahan Donald Trump .....	47
3.5 Kerja Sama Amerika Serikat dan Filipina yang Terjalin Pada Masa Pemerintahan Donald Trump .....	49
3.5.1 Bantuan Amerika Serikat terhadap Kebijakan Narkoba di Filipina.....	50

3.5.2 Amerika Serikat dan Filipina Melanjutkan Latihan Militer Gabungan .....	52
3.5.3 Kerja Sama Amerika Serikat dan Filipina dalam Memberantas Kelompok Militan ISIS di Filipina.....	54
3.5.4 Amerika Serikat dan Filipina dalam Memperkuat Perdagangan.....	55

**BAB 4. FAKTOR – FAKTOR YANG MELANDASI KEPENTINGAN  
AMERIKA SERIKAT DI ERA PEMERINTAHAN DONALD TRUMP  
UNTUK TETAP MELANJUTKAN KERJA SAMA BILATERAL  
DENGAN FILIPINA ..... 57**

4.1 Adanya kepentingan yang sama antara Presiden Donald Trump dengan Presiden Rodrigo Duterte mengenai perang melawan Narkoba .....	57
4.2 Munculnya ancaman keamanan bersama antara Amerika Serikat dengan Filipina masa Pemerintahan Donald Trump dalam memerangi ISIS di Filipina.....	62
4.3 Fakta yang terjadi pada kerja sama Amerika Serikat dengan Filipina untuk mengimbangi pengaruh China dalam Sengketa Laut China Selatan .....	65

**BAB 5. KESIMPULAN ..... 70**

**DAFTAR PUSTAKA ..... 72**

**LAMPIRAN ..... 85**

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 U.S – Philippines Defense Treaties ..... 18



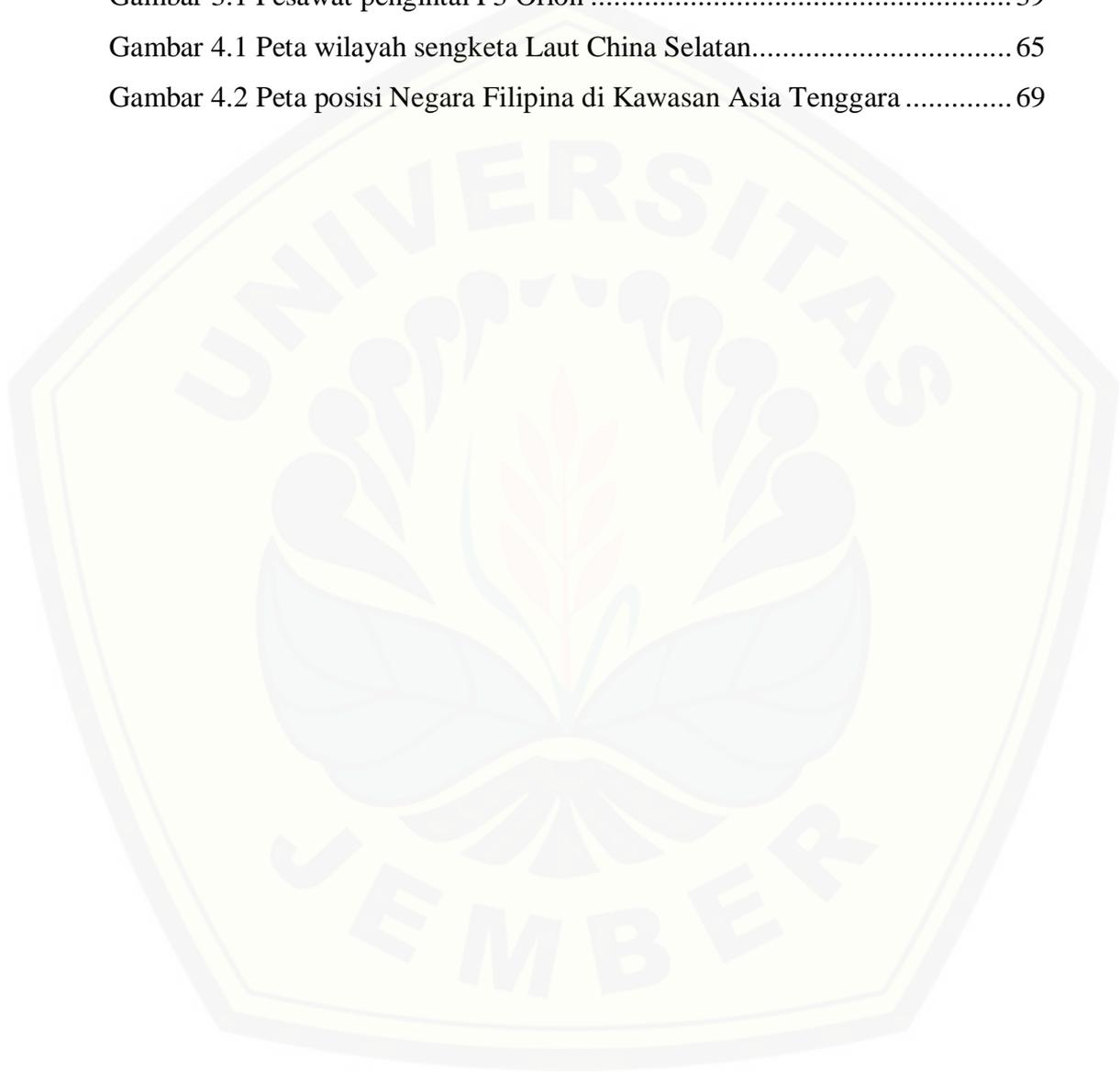
**DAFTAR GRAFIK**

Grafik 2.1 Anggaran militer Filipina ..... 23



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.2 Bantuan keamanan AS kepada Negara–Negara di Asia Tenggara.....	27
Gambar 3.1 Pesawat pengintai P3 Orion .....	39
Gambar 4.1 Peta wilayah sengketa Laut China Selatan.....	65
Gambar 4.2 Peta posisi Negara Filipina di Kawasan Asia Tenggara .....	69



**DAFTAR SINGKATAN**

AFP	: <i>Armed Forces of the Philippines</i>
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
ATS	: <i>Amphetamine – Type Stimulants</i>
COC	: <i>Code of Conduct</i>
CSIS	: <i>Centre of Strategic and International Studies</i>
EDCA	: <i>Enhanced Defense Cooperation Agreement</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
INL	: <i>International Narcotics and Law Enforcement</i>
ISIS	: <i>Islamic State of Iraq and Syria</i>
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
MBA	: <i>Military Base Agreement</i>
MDT	: Mutual Defense Treaty
Narkoba	: Narkotika, psikotropika dan obat terlarang
NATO	: <i>North Atlantic Treaty Organization</i>
OBOR	: <i>One Belt One Road</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa – Bangsa
UNCLOS	: <i>United Nations Convention on the Law of the Sea</i>
UNODC	: United Nations Office on Drugs and Crime
VFA	: <i>Visiting Forces Agreement</i>

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Amerika Serikat dan Filipina telah menjalin hubungan kerja sama selama kurang lebih dari 70 tahun. Salah satu kerja sama yang dilakukan adalah dalam bidang pertahanan dan keamanan. Filipina juga merupakan salah satu sekutu dari Amerika Serikat di wilayah Asia Tenggara. Pada tahun 1898 sampai tahun 1946, Filipina adalah wilayah dari Amerika Serikat dan pada tahun 1946 Amerika Serikat memberikan kemerdekaan kepada Filipina.

Pada tahun 1947, Amerika Serikat dan Filipina mulai melakukan kerja sama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Berawal dari melakukan penandatanganan *Republic Philippines – United States Military Base Agreement* (RP – US MBA), perjanjian ini mengatur tentang pangkalan militer Amerika Serikat, yaitu *Clark* dan *Subic Bay* di Filipina. Perjanjian selanjutnya adalah *Republic Philippines – United States Military Assistance* (RP – US MA). Perjanjian ini mengatur mengenai pemberian bantuan militer Amerika Serikat kepada Filipina dengan tujuan untuk membangun dan mempertahankan keamanan nasional Filipina (Gumilar, 2013:3).

Pada tahun 1951, Amerika Serikat dan Filipina kembali melakukan perjanjian timbal balik di bidang pertahanan dan keamanan yang ditandai dengan dibentuknya perjanjian pertahanan dalam penandatanganan *Mutual Defense Treaty*, dengan tujuan yaitu untuk saling melindungi apabila salah satu negara mendapat serangan dari luar atau serangan dari pihak lain. Kemudian pada tahun 1954, Amerika Serikat dan Filipina tergabung dalam *South East Asia Treaty Organization* (SEATO) dengan tujuan untuk mencegah masuknya pengaruh komunis di Asia Tenggara. Sejak melakukan perjanjian timbal balik di bidang pertahanan, Amerika Serikat dan Filipina mulai melakukan beberapa kerja sama dalam berbagai bidang, seperti dalam bidang politik dan bidang ekonomi dengan tujuan untuk saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

Pada tahun 1998, hubungan kerja sama dalam bidang pertahanan dan keamanan kembali dilakukan melalui penandatanganan *Visiting Forces*

*Agreement* (VFA) dengan tujuan untuk membuka jalan bagi penambahan kunjungan pasukan, kapal ke berbagai pelabuhan di Filipina dan latihan gabungan antara *Armed Forces of the Philippines* (AFP) dengan angkatan militer Amerika Serikat dalam skala yang besar (Gumilar, 2013:3).

Pada tahun 2014, Amerika Serikat dan Filipina melakukan kerja sama pertahanan yang dilakukan melalui penandatanganan *Enhanced Defense Cooperation Agreement*. Dalam perjanjian tersebut tercantum mengenai perizinan Amerika Serikat dalam mendapatkan akses ke tempat yang disetujui oleh kedua pihak (*Agreed Locations*) secara bergantian. Dalam perjanjian ini juga mengatur hal – hal yang boleh dilakukan oleh Amerika Serikat dalam wilayah teritori Filipina, yaitu: *security cooperation exercises, joint and combined training, humanitarian assistance, and disaster relief activities* dan beberapa kegiatan lain yang di setujui oleh kedua belah pihak kedepannya (Official Gazette, 2014).

Salah satu alasan Amerika Serikat ingin melanjutkan kerja sama di bidang pertahanan dengan Filipina adalah karena Amerika Serikat ingin tetap mempertahankan pengaruhnya di wilayah Asia Pasifik (Sari, 2017). Hubungan baik dalam bidang pertahanan dan keamanan antara kedua negara ini pun berlangsung dengan stabil dan harmonis dalam waktu yang cukup lama. Namun kemudian, pada awal masa jabatan Presiden Rodrigo Duterte di Filipina mulai berlangsung, hubungan kerja sama tersebut terganggu dan mengalami ketegangan, yaitu pada saat Presiden Amerika Serikat Barack Obama (yang menjabat sebelum Presiden Donald Trump) mengkritik Presiden Filipina Rodrigo Duterte dalam memerangi Narkoba di negaranya. Amerika Serikat menilai dalam kebijakan pemberantasan Narkoba yang dilakukan oleh Presiden Rodrigo Duterte tersebut dinilai telah melanggar hak asasi manusia, karena telah menewaskan ribuan orang tanpa adanya proses hukum yang jelas (BBC Indonesia, 2016).

Kantor berita Reuters mengatakan bahwa Pemerintah Amerika Serikat pada masa Pemerintahan Barack Obama telah menghentikan penjualan persenjataan sejumlah 26.000 – 27.000 pucuk senapan kepada Filipina terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam kebijakan pemberantasan Narkoba di bawah Pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte. Amerika Serikat khawatir jika

persenjataan tersebut disalahgunakan untuk tindakan yang melanggar hak asasi manusia (Tribun Jateng, 2016).

Keputusan mengenai pemberhentian penjualan persenjataan ini berasal dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, dimana senator senior Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Ben Cardin menyatakan untuk menolaknya. Dalam hal ini, Ben Cardin meragukan Amerika Serikat jika tetap menyuplai persenjataan dapat memunculkan kekhawatiran dalam melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Presiden Rodrigo Duterte menanggapi pernyataan dari Amerika Serikat mengenai hal itu dengan mengatakan bahwa ia dapat membeli persenjataan dari Rusia dan China yang lebih simpatik terhadap Filipina (CNN Indonesia, 2016).

Sikap Amerika Serikat terhadap Filipina menjadikan hubungan kurang baik antara kedua negara. Dalam perspektif Presiden Rodrigo Duterte, sebagai mitra kerja sama seharusnya Amerika Serikat mendukungnya dalam kebijakan pemberantasan Narkoba. Namun demikian, yang telah mengecam kebijakan perang melawan Narkoba dari Presiden Rodrigo Duterte bukan hanya Pemerintah Amerika Serikat, tetapi pemerintah Filipina juga mendapat kecaman dari PBB dan Uni Eropa (BBC Indonesia, 2016). Hingga saat ini, kebijakan perang melawan Narkoba tersebut, telah menewaskan kurang lebih 4.100 orang (BBC Indonesia, 2017).

Sebagai reaksi atas kritik dari Presiden Barack Obama tersebut, Presiden Rodrigo Duterte yang mulai menjabat pada 30 Juni 2016 mengumumkan kepada publik internasional bahwa Filipina memutuskan hubungan secara diplomatik dengan Amerika Serikat. Presiden Rodrigo Duterte mengumumkan pernyataan tersebut pada tanggal 20 Oktober 2016 pada saat acara kunjungan kenegaraan di China. Pada saat itu Presiden Rodrigo Duterte menyatakan bahwa ia menginginkan untuk berpisah dengan Amerika Serikat dalam bidang militer, sosial, maupun ekonomi (Suara, 2016).

Presiden Rodrigo Duterte merasa tidak puas dengan pernyataan Barack Obama yang tidak mendukung kebijakannya dalam pemberantasan Narkoba dan menuduh telah melanggar hak asasi manusia. Terkait kebijakan perang melawan Narkoba di Filipina, Barack Obama mengatakan, “Akan mengakibatkan

konsekuensi apabila anda melakukannya dengan cara yang salah, orang yang tak bersalah bisa tersakiti dan akan ada konsekuensi tak diinginkan yang tidak menyelesaikan masalah” (CNN Indonesia, 2016).

Presiden Rodrigo Duterte pun telah menyampaikan kekecewaannya yang ditujukan kepada Pemerintah Amerika Serikat di dalam sebuah pidatonya pada saat konvensi yang dilaksanakan bersama dengan beberapa pejabat di Filipina. Kekesalannya terhadap Amerika tersebut membuat Presiden Rodrigo Duterte berkeinginan untuk memutuskan hubungan kerja sama antara Filipina dengan Amerika Serikat. Filipina menginginkan untuk putus hubungan dengan Amerika Serikat dengan alasan bahwa pemerintah Filipina tidak terima dengan kecaman mengenai pelanggaran HAM dari Amerika Serikat, dan karena Filipina ingin lebih dekat dengan China.

Salah satu alasan Filipina memutuskan hubungan dengan Amerika Serikat adalah karena Filipina ingin lebih dekat dengan China. China telah memberikan akses kepada kapal – kapal penangkap ikan Filipina di Dangkalan Laut China Selatan. Hal ini merupakan langkah baru yang di ambil oleh China dalam rangka untuk membantu meredakan ketegangan dengan Filipina. Beberapa hari setelah Presiden Rodrigo Duterte berkunjung ke China pada tanggal 18 Oktober sampai tanggal 21 Oktober 2016, para nelayan Filipina diberi kebebasan untuk mengakses Scarborough Shoal<sup>3</sup>. Pada saat kunjungan Presiden Rodrigo Duterte di China, Presiden Rodrigo Duterte membahas mengenai hak penangkapan ikan di Scarborough Shoal dengan Presiden Xi Jinping dan mengisyaratkan perkembangan pada masalah ini. Pada tanggal 28 Oktober 2016, Juru bicara kepresidenan Filipina mengatakan bahwa, “Selama 3 hari terakhir ini, tidak ada lagi kapal penjaga pantai China yang menghentikan kapal nelayan Filipina, sehingga saat ini para nelayan Filipina dapat memancing di daerah tersebut tanpa

---

<sup>3</sup> Wilayah Scaborough Shoal merupakan wilayah yang telah di klaim oleh kedua negara yaitu Filipina dan China. Namun demikian, dalam hal ini Filipina tidak dapat memasuki wilayah tersebut karena China telah memperkuat pasukan militernya di wilayah tersebut. VOA Indonesia. 2017. *China Beri Filipina Akses ke Kawasan Penangkapan Ikan yang Disengketakan*. Dikutip dari VOA Indonesia. Diakses melalui: <https://www.voaindonesia.com/a/china-beri-filipina-akses-ke-kawasan-penangkapan-ikan-yang-disengketakan/4003554.html> pada tanggal 9 Juli 2018.

di cegat”. Sebelumnya, para nelayan Filipina yang mengakses kawasan Scarborough Shoal akan diganggu oleh penjaga pantai China (Rappler, 2016).

Terdapat beberapa hal yang dilakukan Presiden Rodrigo Duterte mengenai pemutusan hubungan diplomasi dengan Amerika Serikat, salah satunya adalah pemutusan hubungan militer oleh Presiden Rodrigo Duterte. Presiden Rodrigo Duterte mengatakan bahwa ia menginginkan pasukan Militer Amerika Serikat untuk keluar dari Filipina. Presiden Rodrigo Duterte menyatakan hal tersebut secara terang – terangan bahwa ia menentang keberadaan tentara Amerika Serikat yang ada di wilayah Mindanao Selatan, dengan alasan bahwa di wilayah tersebut tidak pernah ada perdamaian sejak ada pasukan Amerika Serikat. Namun demikian, Pemerintah Amerika Serikat mengaku bahwa tidak menerima permintaan resmi dari Filipina mengenai penarikan pasukan Amerika Serikat dari Filipina Selatan (Sindo News, 2016).

Dalam kekecewaannya terhadap sikap Amerika Serikat dibawah Pemerintahan Barack Obama, Presiden Filipina tersebut melontarkan perkataan yang kurang pantas, dengan mengatakan bahwa “Bukannya membantu kita, yang pertama mengecam justru berasal dari departemen luar negeri Amerika Serikat, jadi anda dapat pergi ke neraka saja, Obama!”. Tidak hanya itu, Presiden Rodrigo Duterte juga mengancam Barack Obama untuk tidak mengkritik terkait kebijakan Presiden Rodrigo Duterte dalam memberantas Narkoba yang dinilai telah melanggar HAM, dengan mengatakan bahwa “Anda seharusnya lebih menghormati, tidak begitu saja melemparkan pertanyaan dan pernyataan. Anak pelacur, saya akan mengutuk anda di forum itu” (Detik News, 2016).

Barack Obama menyikapi pernyataan dari Presiden Rodrigo Duterte, dengan melakukan pembatalan pertemuan dengan Presiden Filipina tersebut yang rencananya dilakukan di sela – sela pertemuan puncak Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN yang bertempat di Vientiane, Laos pada tanggal 6 September 2016. Namun pada akhirnya, Barack Obama dan Presiden Rodrigo Duterte bertemu dalam pertemuan tersebut pada saat sebelum acara makan malam berlangsung (Tempo, 2016).

Pada tanggal 22 Oktober 2016, Presiden Rodrigo Duterte menjelaskan maksud dari pernyataannya yang telah diumumkan sebelumnya, yaitu pada tanggal 20 Oktober 2016. Bahwa maksud dari pernyataannya adalah pemutusan hubungan secara diplomatik. Presiden Rodrigo Duterte menambahkan bahwa Filipina tidak bisa berpisah dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki pengaruh yang sangat tinggi terhadap Filipina. Karena dalam bidang militer, pemasok senjata terbesar Filipina adalah dari Amerika Serikat (CNN Indonesia, 2016).

Presiden Rodrigo Duterte juga mengatakan bahwa maksud dari pernyataannya tersebut adalah mengambil jalan yang berbeda dari negara – negara Barat terkait kebijakan luar negerinya. Presiden Rodrigo Duterte mengatakan bahwa kebijakan luar negeri Filipina tidak perlu meniru kebijakan luar negeri dari Amerika Serikat. Selama melakukan hubungan kerja sama dengan Amerika Serikat, Filipina selalu mengikuti kebijakan luar negeri Amerika Serikat, yang artinya Filipina selalu mengikuti isyarat yang disampaikan oleh Amerika Serikat. Namun demikian, setelah Rodrigo Duterte terpilih menjadi Presiden Filipina, ia berencana untuk menghilangkan hal tersebut, yang artinya Filipina tidak akan mengikuti isyarat – isyarat yang diberikan oleh Amerika Serikat lagi. Langkah yang telah diambil Presiden Rodrigo Duterte dalam pemutusan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat ini salah satunya karena upaya dari Presiden Rodrigo Duterte untuk menjalin hubungan yang lebih dekat antara Filipina dengan China (CNN Indonesia, 2016).

Pada saat kepemimpinan Barack Obama telah usai dan digantikan oleh Donald Trump pada tanggal 20 Januari 2017, Amerika Serikat kembali berkeinginan untuk memperbaiki hubungan kerja samanya dengan Filipina. Hubungan bilateral antara Amerika Serikat dengan Filipina mulai membaik pada saat Presiden Donald Trump mengundang Presiden Rodrigo Duterte melalui percakapan telepon untuk hadir di Gedung Putih, percakapan ini terjadi pada tanggal 29 April 2017. Salah satu yang dibahas dalam percakapan yang dilakukan melalui telepon tersebut adalah pembahasan mengenai Korea Utara (CNN, 2017).

Hubungan kerja sama pun tetap berlanjut, yang nantinya Amerika Serikat dan Filipina berencana untuk membahas mengenai aliansi kedua negara dalam mengatasi masalah Korea Utara. Percakapan ini dilanjutkan dengan pernyataan dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang memberikan apresiasi dan menyampaikan bagaimana ia memahami tantangan yang dihadapi Presiden Rodrigo Duterte di Filipina, khususnya untuk masalah kejahatan Narkoba di Filipina.

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat pun mengatakan bahwa Filipina merupakan sekutu Amerika Serikat yang penting di kawasan Asia Pasifik dan mengatakan bahwa Amerika Serikat tetap melanjutkan kerja sama bilateral dengan Filipina (Aljazeera, 2016). Pada masa Pemerintahan Presiden Donald Trump saat ini, tanggapan yang diberikan untuk Filipina mengenai kebijakan Narkoba berbeda dengan ketika masa Pemerintahan Barack Obama. Presiden Donald Trump menanggapi perang atas Narkoba yang dilakukan oleh Presiden Rodrigo Duterte dengan tanggapan yang lebih baik. Presiden Rodrigo Duterte juga mengatakan bahwa Presiden Donald Trump telah memuji tindakannya dalam menanggulangi salah satu kejahatan terbesar di dunia tersebut. Presiden Donald Trump juga mengatakan bahwa “kamu sama seperti aku”, pernyataan tersebut ditujukan kepada Presiden Filipina, Rodrigo Duterte. Presiden Donald Trump juga memberikan selamat atas kebijakan pemberantasan Narkoba yang dilakukan oleh Presiden Rodrigo Duterte (Huffington Post, 2017).

Sejauh ini yang sudah dicapai oleh Amerika Serikat dan Filipina dalam memperbaiki hubungan kerja samanya adalah dengan melakukan kerja sama dalam bidang pertahanan dan keamanan, salah satunya adalah pemberian bantuan Amerika Serikat terhadap Filipina dalam memberantas aksi terorisme ISIS di Marawi, di Filipina yang berlangsung pada tanggal 23 Mei 2017. Serangan terorisme tersebut telah menewaskan ratusan orang (CNN Indonesia, 2017). Dalam upaya untuk menghentikan penyerangan terorisme tersebut, Filipina dan Amerika Serikat bekerja sama untuk mencari pemimpin dalam aksi terorisme ini yang diduga berada di kota Marawi, Filipina (Voa Indonesia, 2017).

Pada tanggal 9 Juni 2017 lalu, Amerika Serikat mengirim sebuah pesawat P3 Orion pada Filipina. Penyerangan yang terjadi di kota Marawi di Mindanao Utara ini setidaknya merupakan serangan terorisme dengan korban terbanyak dalam sejarah Filipina akhir – akhir ini. Salah satu tentara Filipina mengatakan bahwa kelompok militan ISIS saat ini lebih terorganisir, mereka telah banyak mempelajari taktik perang di Timur Tengah, khususnya negara yang menjadi markas mereka yaitu di Irak dan Suriah (McKirdy dan Watson, 2017). Dalam penyerangan ini, setidaknya terdapat 666 anggota milisi, 147 tentara, 47 warga sipil yang tewas sejak ISIS menduduki Marawi (BBC Indonesia, 2017).

Latar belakang diatas telah dijelaskan bagaimana hubungan kerja sama dalam bidang pertahanan dan keamanan antara Amerika Serikat dengan Filipina berjalan, bahwa dalam suatu hubungan kerja sama tidak selalu berjalan dengan baik dan stabil. Hubungan antar negara dalam hubungan internasional memiliki dua konteks, kerja sama dan konflik (Mansbach, 2012). Oleh karena itu, dalam hal ini telah dijelaskan bahwa hubungan kerja sama antara Amerika Serikat pada masa Pemerintahan Barack Obama dengan Filipina dibawah kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte kurang berjalan dengan baik. Sedangkan pada masa Pemerintahan Presiden Donald Trump hubungan antara kedua negara tersebut mulai kembali berjalan dengan baik. Dalam karya ilmiah ini, penulis menganalisis faktor – faktor apa yang melandasi kepentingan Amerika Serikat di era Pemerintahan Donald Trump untuk tetap melanjutkan kerja sama bilateral dengan Filipina. Dalam menganalisis dari permasalahan tersebut, penulis menguraikan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: “Hubungan Amerika Serikat dan Filipina di Era Pemerintahan Donald Trump”

## **1.2 Ruang Lingkup Pembahasan**

Ruang lingkup pembahasan dalam karya ilmiah diperlukan dengan tujuan untuk membatasi permasalahan dan pembahasan yang ada dalam karya ilmiah. Ruang lingkup pembahasan diperlukan dengan tujuan agar pembahasan yang ada dalam karya ilmiah tersebut memiliki batasan permasalahan dan tidak meluas ke permasalahan lainnya.

Dalam hal ini, penulis membatasi penelitiannya dalam beberapa kategori, yaitu mencakup batasan materi dan batasan waktu:

### 1.2.1 Batasan Materi

Batasan materi yang diperlukan dalam sebuah karya ilmiah bertujuan untuk menjelaskan batas – batas dari materi yang di analisis dalam karya ilmiah tersebut. Batasan materi disini berarti merupakan suatu cakupan materi tertentu yang digunakan dalam menganalisis sebuah penelitian agar materi atau pembahasan yang digunakan dapat menjurus dalam permasalahan yang telah ditetapkan oleh penulis.

Batasan materi yang digunakan penulis dalam karya ilmiah yang bertemakan tentang kerja sama bilateral antara Amerika Serikat dan Filipina adalah mencakup tentang awal memburuknya hubungan Amerika Serikat dengan Filipina pada awal masa Pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte dan mulai membaiknya hubungan pada masa Pemerintahan Presiden Donald Trump, dan dilanjutkan dengan faktor – faktor apa yang melandasi kepentingan Amerika Serikat di era Pemerintahan Donald Trump untuk tetap melanjutkan kerja sama bilateral dengan Filipina.

### 1.2.2 Batasan Waktu

Selanjutnya untuk penggunaan batasan waktu dalam sebuah penulisan karya ilmiah bertujuan untuk membatasi waktu pada permasalahan yang diteliti, yang bertujuan untuk mempermudah dalam menganalisis suatu permasalahan tersebut.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan batasan waktu yang dimulai dari awal masa Pemerintahan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte yaitu pada tanggal 30 Juni 2016 yang merupakan awal dari memburuknya hubungan Filipina dengan Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Barack Obama. Kemudian dilanjutkan sampai pada bulan Maret 2018, dimana pada bulan Maret 2018 Presiden Amerika Serikat, Donald Trump memberikan sikap yang positif terhadap Presiden Rodrigo Duterte dengan mengusulkan untuk

memberikan hukuman mati bagi para pengedar Narkoba di Amerika Serikat, dimana hal tersebut memiliki persamaan dengan Presiden Rodrigo Duterte dalam memerangi Narkoba.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan dasar dari setiap karya ilmiah. Setiap permasalahan yang diteliti dalam karya ilmiah kemudian dirumuskan dalam satu atau beberapa pertanyaan yang kemudian menjadi landasan dalam penelitian tersebut. Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis telah merumuskan permasalahan yang diteliti dalam sebuah pertanyaan:

“Apa faktor – faktor yang melandasi kepentingan Amerika Serikat di era Pemerintahan Donald Trump untuk tetap melanjutkan kerja sama bilateral dengan Filipina?”

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah di jabarkan oleh penulis diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor – faktor yang melandasi kepentingan Amerika Serikat di era Pemerintahan Donald Trump untuk tetap melanjutkan kerja sama bilateral dengan Filipina.

### **1.5 Kerangka Konseptual**

Dalam setiap penelitian karya ilmiah, dibutuhkan adanya teori atau konsep yang bisa menopang penelitian tersebut dan untuk lebih menjelaskan hasil dari karya ilmiah tersebut secara logis dan objektif. Teori atau konsep disini berguna untuk membantu dalam menjelaskan penelitian dan membantu dalam menganalisis penelitian tersebut. Teori atau konsep yang digunakan dalam sebuah karya ilmiah harus relevan dengan topik dalam karya ilmiah tersebut karena kegunaannya adalah untuk membantu menjelaskan suatu karya ilmiah. Oleh karena itu dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan konsep

Hubungan Bilateral. Konsep ini dianggap relevan dengan permasalahan dalam karya ilmiah ini.

### 1.5.1 Konsep Hubungan Bilateral

Menurut Kusumohamidjojo, hubungan bilateral merupakan suatu bentuk kerja sama yang dilakukan antara dua negara baik antar negara yang memiliki letak geografis yang berdekatan maupun yang jauh di seberang lautan dengan sasaran utama yaitu untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kesamaan politik, kebudayaan, dan struktur ekonominya (Kusumohamidjojo, 1987: 3).

Seperti yang dikemukakan oleh Anak Agung Perwita dalam Amaral (2011: 32) bahwa hubungan bilateral adalah kerja sama yang dilakukan oleh dua negara yang sifatnya saling menguntungkan. Dalam hubungan ini terdapat perilaku saling mempengaruhi atau hubungan timbal balik satu sama lain yang berlangsung pada serangkaian pola aksi reaksi.

Holsti 1998, menyebutkan bahwa:

“Dalam hubungan internasional, hubungan bilateral selalu berada pada dua konteks yaitu kerja sama dan konflik. Kerja sama bilateral juga dapat diartikan sebagai suatu negara dengan kepentingan yang mendasari kesepakatan antara dua negara untuk melakukan interaksi dalam bidang tertentu dengan tujuan dan cara yang disepakati oleh kedua belah pihak (Holsti, 1998: 209).

Holsti menjelaskan bahwa terbentuknya kerja sama berdasarkan pada banyaknya kasus, sejumlah Pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan atau dengan membahas masalah, mengemukakan bukti – bukti teknis untuk menyetujui penyelesaian dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau pengertian tertentu yang memuaskan kedua belah pihak (Holsti, 1998: 209).

Konsep hubungan bilateral ini berbicara mengenai hubungan antara dua negara yang saling bekerja sama dalam berbagai bidang, baik dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, pertahanan keamanan, budaya maupun dalam bidang politik. Hubungan bilateral merupakan hubungan kerja sama yang dilakukan antara dua negara dengan tujuan kepentingan nasional. Hubungan bilateral

dilakukan oleh dua negara yang letak geografisnya tidak harus berdekatan, maka dengan hal ini tidak ada hambatan bagi negara – negara untuk dapat melakukan kerja sama dengan negara lain yang berada di luar letak geografis.

Salah satu tujuan melakukan hubungan kerja sama bilateral adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri atau kepentingan nasional setiap negara, yang nantinya menciptakan hubungan saling ketergantungan. Hal ini juga bertujuan untuk membangun hubungan yang harmonis antar negara. Karena pada dasarnya, kerja sama antar negara merupakan salah satu yang perlu dilakukan bagi setiap negara dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kepentingan pada masing – masing pihak dan termasuk dalam kebijakan politik luar negeri setiap negara. Politik luar negeri merupakan suatu jembatan antara politik domestik suatu negara kedalam sistem internasional dalam rangka untuk mencapai kepentingan nasional. Oleh karena itu, dalam hal ini suatu jembatan tersebut bertujuan untuk menjembatani batas – batas domestik kedalam luasnya atau tidak terbatasnya politik internasional (Hara, 2010: 16).

Didi Krisna menyebutkan definisi dari konsep hubungan bilateral dalam kamus politik internasional, yaitu:

“Hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadinya hubungan timbal balik antara dua belah pihak (dua negara)” (Krisna, 1993: 18).

Selanjutnya, berdasarkan pada pendapat yang telah dikemukakan oleh Plano dan Olton, hubungan bilateral merupakan:

“Hubungan kerja sama yang terjadi antara dua negara di dunia ini pada dasarnya tidak terlepas dari kepentingan nasional masing – masing negara. Kepentingan nasional merupakan unsur yang sangat vital yang mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi” (Plano, 1990: 7).

Salah satu kepentingan nasional Amerika Serikat dalam membangun hubungan kerja sama bilateral dengan Filipina adalah karena Amerika Serikat ingin tetap mempertahankan pengaruhnya di Asia Pasifik. Untuk membangun kekuatan Amerika Serikat di Asia Pasifik sebagai kawasan yang memiliki potensi dengan kekayaan yang melimpah, Amerika Serikat ingin tetap melakukan

hubungan kerja sama bilateral dengan Filipina, sebagai jalan untuk tetap mempertahankan posisinya di kawasan Asia Pasifik. Selain munculnya China pada sengketa Laut China Selatan, yang diprediksi bahwa China akan menjadi negara besar di wilayah Asia yang akan menyaingi kekuatan negara – negara barat. Filipina merupakan negara dengan wilayah yang strategis di laut China Selatan, khususnya di Pelabuhan Teluk Subic. Selain itu, pada masa Pemerintahan Presiden Barack Obama, Amerika Serikat membentuk strategi baru dalam bidang militer yang berfokus pada wilayah Asia – Pasifik. Amerika Serikat “merasa” bahwa hubungan kerja sama bilateral dengan Filipina menjadi sangat penting dan dapat menjadi buruk jika hubungan bilateral antara kedua negara ini putus.

Dalam hubungan internasional, kerja sama yang terjalin antara dua negara mengandung dua unsur yaitu kerja sama dan konflik (Holsti, 1998: 209). Kedua unsur tersebut selalu ada di dalam hubungan kerja sama, bergantung pada bagaimana kedua negara menyikapi kerja sama yang mereka jalankan. Hubungan kerja sama bilateral yang dijalankan oleh suatu negara dengan negara lain dapat mengatasi masalah/konflik yang muncul diantara kedua negara. Maka dapat dikatakan bahwa sisi lain yang bisa didapat dari hubungan bilateral adalah kerja sama dan konflik.

Terkait persamaan politik yang dapat mempengaruhi perdamaian dalam hubungan bilateral yang dikemukakan oleh Kusumohamidjojo, hubungan yang terjalin antara Amerika Serikat dan Filipina pada masa pemerintahan Donald Trump telah memiliki persamaan dalam kebijakannya, yaitu kebijakan dalam memerangi Narkoba. Pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte, Filipina menjalankan kebijakan mengenai perang melawan Narkoba dengan membunuh bagi siapapun yang terlibat dalam kejahatan Narkoba, baik pengedar maupun pengguna Narkoba yang menolak untuk ditangkap. Sama halnya dengan Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump, dimana Presiden Donald Trump mengusulkan hukuman mati bagi para pengedar Narkoba di Amerika Serikat.

Hubungan bilateral akan dapat menimbulkan hubungan timbal balik dan hubungan saling ketergantungan, seperti yang terjadi pada hubungan bilateral

antara Amerika Serikat dan Filipina yang menumbuhkan sikap untuk saling membantu satu sama lain, seperti yang telah dilakukan oleh kedua negara yaitu berupa bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat terhadap Filipina dalam memerangi kelompok militan ISIS yang sedang menyerang kota Marawi di Filipina.

Konsep hubungan bilateral merupakan konsep yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi pada hubungan kerja sama bilateral antara Amerika Serikat dengan Filipina. Hubungan kerja sama yang terjalin antara Amerika Serikat dengan Filipina yang sudah berjalan selama kurang lebih 70 tahun ini di dalamnya memuat kerja sama dan konflik. Kerja sama bilateral bisa membuat negara – negara di dunia berusaha untuk mengatasi masalah di dalam negara mereka, baik dalam mengatasi permasalahan ekonomi, politik, sosial maupun keamanan. Hubungan kerja sama dapat menimbulkan ketergantungan yang terjadi antar negara yang menjalin kerja sama, karena adanya kesepakatan antara kedua negara atau adanya suatu tujuan yang telah di sepakati bersama yang mendasari hubungan kedua negara.

### **1.6 Argumen Utama**

Argumen utama dalam penelitian ini membahas mengenai faktor – faktor apa yang melandasi kepentingan Amerika Serikat di era Pemerintahan Donald Trump untuk tetap melanjutkan kerja sama bilateral dengan Filipina. Faktor – faktor yang melandasi kepentingan Amerika Serikat di era Pemerintahan Donald Trump untuk tetap melanjutkan kerja sama bilateral dengan Filipina, adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kepentingan yang sama antara Presiden Donald Trump dengan Presiden Rodrigo Duterte mengenai perang melawan Narkoba
- b. Munculnya ancaman keamanan bersama antara Amerika Serikat dengan Filipina masa Pemerintahan Donald Trump dalam memerangi ISIS di Filipina
- c. Fakta yang terjadi pada Amerika Serikat terhadap Filipina untuk mengimbangi pengaruh China dalam sengketa Laut China Selatan

## 1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau metode yang digunakan dalam sebuah penelitian dalam rangka untuk menjelaskan bagaimana seorang peneliti mengumpulkan data yang diperoleh. Metode penelitian diartikan sebagai teknik pengumpulan data dan digunakan untuk mengolah data dalam sebuah karya ilmiah. Dengan adanya metode penelitian dalam sebuah karya ilmiah, menjadikan karya ilmiah tersebut lebih jelas dan lebih terstruktur. Untuk lebih memudahkan penulisan metode dalam penelitian, maka metode tersebut dibagi dalam beberapa bagian, yaitu metode pengumpulan data dan metode analisis data.

### 1.7.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data disini merupakan metode atau cara yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data – data yang diperoleh. Dalam hal ini, penulis menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan, dimana data – data tersebut diperoleh dari berbagai sumber yang valid yang berasal dari berbagai literatur. Dengan adanya data – data yang diperoleh secara valid, maka penulis dapat dengan baik menjelaskan dan mempertanggungjawabkan karya ilmiahnya. Data sekunder disini merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, dimana penulis tidak terjun langsung di lapangan, tetapi data – data tersebut diperoleh dari data – data yang sudah ada sebelumnya. Sumber dari data – data yang diperoleh penulis dalam melakukan penelitiannya diantaranya adalah berasal dari studi kepustakaan:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Jember
- b. Ruang Baca Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember

Data – data lain adalah berasal dari sumber literatur:

- a. Artikel dan Jurnal
- b. Buku
- c. Internet

### 1.7.2 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah – milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2013: 248).

Dalam metode analisis data, penulis menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Deskriptif disini berarti mendeskripsikan atau menggambarkan hasil dari penelitian secara jelas dan akurat. Pada jenis metode analisis data deskriptif kualitatif ini, peneliti diharuskan untuk menjelaskan dan menganalisis suatu kejadian atau fenomena yang terjadi secara jelas, yang lebih bersifat menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena secara nyata.

## 1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam karya ilmiah ini mencakup lima bab yang disusun sebagai berikut:

### **Bab 1. Pendahuluan**

Pada bab I ini, penulis menjabarkan Pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Ruang Lingkup Pembahasan yaitu Batasan Materi dan Batasan Waktu, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Argumen Utama, Metode Penelitian yang mencakup Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data, Sistematika Penulisan.

### **Bab 2. Hubungan Amerika Serikat Dengan Filipina Pada Masa Pemerintahan Barack Obama**

Bab ini menjelaskan tentang hubungan Amerika Serikat pada masa Pemerintahan Presiden Barack Obama pada periode pertama dan kedua dengan Filipina.

### **Bab 3. Sikap Amerika Serikat Dibawah Kepemimpinan Donald Trump Terhadap Filipina**

Pada bab ini membahas mengenai sikap dari Amerika Serikat pada masa Pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap Filipina dibawah

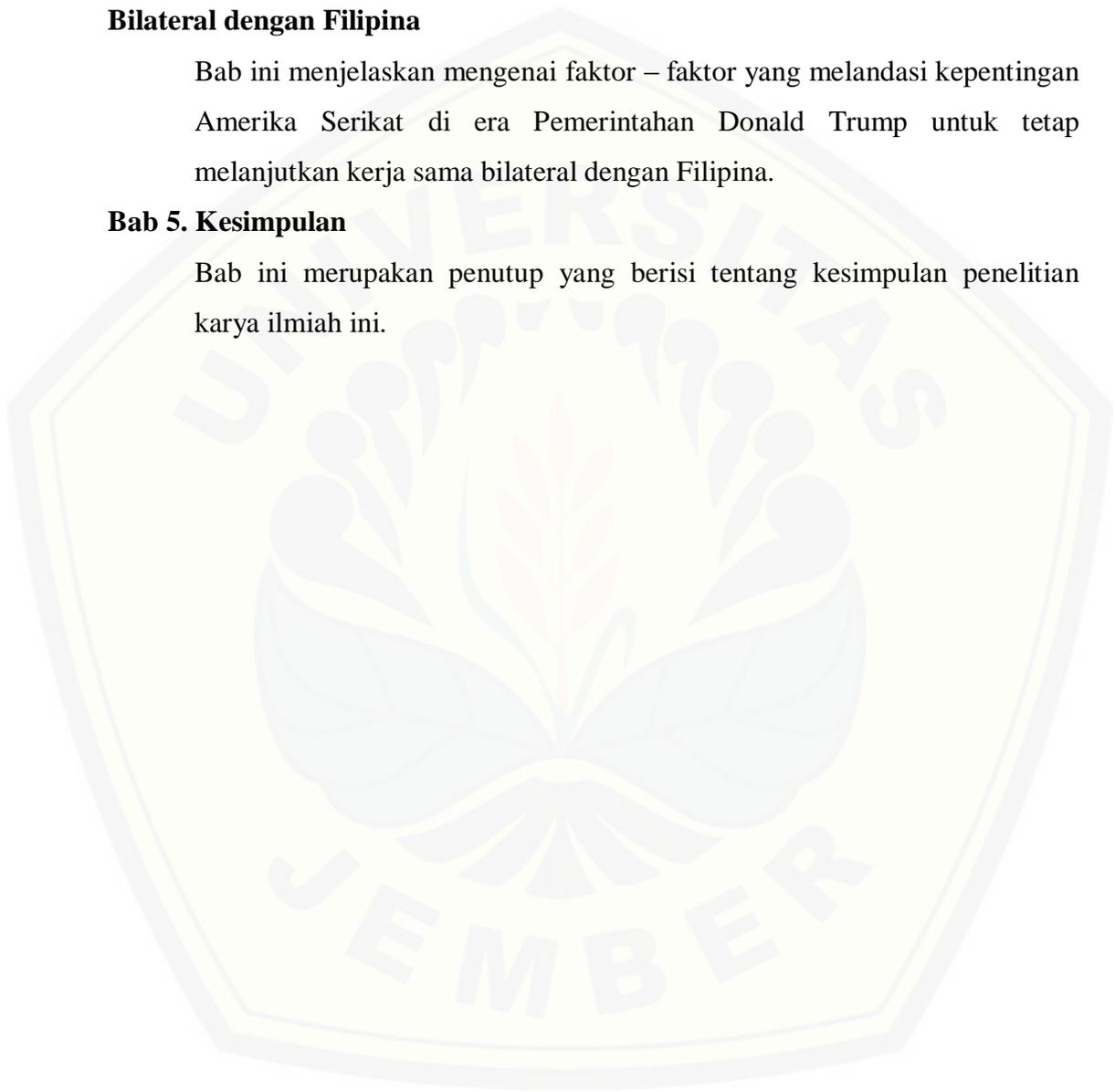
kepemimpinan Rodrigo Duterte yang membaik setelah sebelumnya mengalami kerenggangan dalam hubungan bilateralnya.

#### **Bab 4. Faktor – Faktor yang Melandasi Kepentingan Amerika Serikat di Era Pemerintahan Donald Trump Untuk Tetap Melanjutkan Kerja Sama Bilateral dengan Filipina**

Bab ini menjelaskan mengenai faktor – faktor yang melandasi kepentingan Amerika Serikat di era Pemerintahan Donald Trump untuk tetap melanjutkan kerja sama bilateral dengan Filipina.

#### **Bab 5. Kesimpulan**

Bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan penelitian karya ilmiah ini.



## **BAB 2. HUBUNGAN AMERIKA SERIKAT DENGAN FILIPINA PADA MASA PEMERINTAHAN BARACK OBAMA**

Bab ini menjelaskan tentang hubungan antara Amerika Serikat pada masa pemerintahan Barack Obama yang menjabat selama 2 periode yaitu pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2017 dengan Filipina. Pada masa ini, kerja sama yang terjalin yaitu dengan melanjutkan dan memperbaharui kerja sama yang sudah terjalin sebelumnya. Dalam hubungan kerja sama antar negara, tidak dapat dihindarkan adanya konflik di dalamnya, sama halnya dengan kerja sama yang terjalin antara Amerika Serikat dan Filipina yang juga mengalami pasang surut dalam hubungan kerja sama bilateral. Kerja sama tersebut tidak selalu berjalan dengan lancar. Namun demikian, kerja sama yang sudah terjalin selama kurang lebih 70 tahun ini tetap berjalan sesuai dengan tujuan.

Kerja sama yang terjalin antara Amerika Serikat dan Filipina salah satunya adalah bertujuan untuk mendamaikan beberapa konflik yang terjadi, salah satunya adalah konflik pada sengketa Laut China Selatan. Filipina disini merupakan negara dengan kawasan yang strategis yang berada di Laut China Selatan. Beberapa kerja sama yang dilakukan oleh kedua negara diantaranya adalah kerja sama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Kerja sama dalam bidang pertahanan dan keamanan yang telah dibentuk oleh Amerika Serikat dan Filipina adalah *Military Bases Agreement*, *Mutual Defense Treaty*, *Visiting Forces Agreement*, dan *Enhanced Defense Cooperation Agreement*.

Tabel 2.1 U.S – Philippines Defense Treaties

No.	Agreement	Signed
1.	Military Bases Agreement	1947
2.	Mutual Defense Treaty	1951
3.	Visiting Forces Agreement	1998
4.	Enhanced Defense Cooperation Agreement	2014

Sumber: Council on Foreign Relation. 2016. *The U.S – Philippines Defense Alliance*. Dikutip dari Council on Foreign Relation. Diakses melalui: <https://www.cfr.org/backgrounders/us-philippines-defense-alliance> Pada tanggal 21 Maret 2018

## 2.1 Hubungan Amerika Serikat dengan Filipina pada Periode Pertama Masa Jabatan Barack Obama

Barack Obama telah menjabat selama 2 periode sebagai Presiden Amerika Serikat, yaitu pada tahun 2009 sampai tahun 2017. Dalam masa jabatannya sebagai Presiden Amerika Serikat, Barack Obama telah banyak menjalin kerja sama dengan negara – negara lain. Salah satunya adalah melanjutkan hubungan kerja sama bilateral dengan Filipina. Amerika Serikat dan Filipina telah menjalin kerja sama selama kurang lebih 70 tahun. Beberapa kerja sama yang dilakukan antara Amerika Serikat dengan Filipina pada masa Pemerintahan Barack Obama dilakukan dengan tujuan untuk mempererat hubungan baik antara kedua negara.

Filipina merupakan kontribusi yang sangat besar bagi Amerika Serikat sebagai koordinator dari ASEAN untuk Amerika Serikat. Kerja sama yang dilakukan Amerika Serikat dan Filipina dilakukan dengan dasar saling menghargai. Meskipun dalam kerja sama tersebut tidak selamanya berjalan dengan lancar, tetapi kerja sama ini tetap pada tujuan yang sama. Seperti pada perjanjian *Mutual Defense Treaty* pada tahun 1951, kedua negara saling bersepakat dengan mewujudkan tujuan mereka untuk saling menjaga antar negara apabila salah satu negara mendapat serangan dari pihak lain. Hingga pada saat masa Pemerintahan Barack Obama, Amerika Serikat dan Filipina saling bekerja sama untuk saling melindungi satu sama lain.

Aliansi antara Amerika Serikat dengan Filipina ini merupakan dasar dari perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran yang ada di Asia – Pasifik. Menteri Luar Negeri Filipina hadir di Washington untuk kembali menegaskan Deklarasi Manila yang di tanda tangani pada tanggal 16 November 2011 dan memastikan bahwa aliansi antara Amerika Serikat dan Filipina tetap berjalan dengan baik dengan tujuan untuk memenuhi dinamika global yang terus berubah. Para Menteri Luar Negeri juga kembali menegaskan bahwa adanya kewajiban antara Amerika Serikat dengan Filipina dalam perjanjian *Mutual Defense Treaty* dengan bersama – sama membentuk komitmen dalam menuju perdamaian dan keamanan (US Department of State, 2012).

Terdapat beberapa kerja sama bilateral yang dilanjutkan pada masa Pemerintahan Barack Obama dengan tujuan untuk mempererat hubungan antara kedua negara. Peningkatan perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia – Pasifik merupakan salah satu tujuan kerja sama Amerika Serikat dengan Filipina yang juga merupakan salah satu kerja sama yang sudah dilakukan sebelumnya.

Amerika Serikat dan Filipina sama – sama melakukan dukungan dalam upaya untuk meningkatkan kerja sama dalam organisasi ASEAN, melakukan pertemuan dengan menteri pertahanan ASEAN, kerja sama Ekonomi Asia – Pasifik (APEC), dan kerja sama *East Asia Summit* (EAS). Kedua negara kembali berupaya dalam meningkatkan dan menjaga kebebasan perdagangan legal tanpa adanya hambatan, kedua negara juga turut mengatur dalam menyelesaikan persaingan pada wilayah maritim melalui proses damai, kolaboratif, dan diplomatik berdasarkan pada hukum internasional yang ada, seperti yang terdapat dalam Konvensi PBB mengenai Hukum Laut (US Department of State, 2012).

Kerja sama lain juga dilanjutkan pada masa Pemerintahan Barack Obama yaitu memperkuat kerja sama bilateral maupun regional melalui kegiatan bantuan kemanusiaan, bergabung dalam menganggapi bencana alam, sama – sama mendukung dalam kerja sama antiterorisme pada tingkat regional melalui pembagian koordinasi dalam upaya untuk pengawasan dan pemberantasan teroris, mengurangi tingkat kerusakan lingkungan termasuk diantaranya adalah penangkapan ikan secara ilegal, penggundulan hutan, perburuan spesies yang terancam punah, perubahan iklim, dan penghancuran terumbu karang, dan mencegah dan memberantas pembajakan (US Department of State, 2012).

Amerika Serikat dan Filipina pun saling bekerja sama dalam upaya untuk mempromosikan pelucutan senjata nuklir, non – proliferasi nuklir, dan penggunaan energi nuklir secara damai pada tingkat regional dan internasional termasuk KTT Asia Timur. Amerika Serikat dan Filipina bersepakat untuk patuh dan melaksanakan komitmen untuk tidak melakukan penyebaran persenjataan PBB yang relevan (US Department of State, 2012).

### 2.1.1 Kerja Sama dalam Bidang Ekonomi

Dalam bidang ekonomi, Amerika Serikat dan Filipina berusaha untuk meningkatkan perdagangan dan investasi bilateral antar negara. Kedua negara juga selalu memperhatikan masalah – masalah yang ada pada negara masing – masing untuk kemudian saling bekerja sama dalam memecahkan masalah tersebut. Dalam bidang ekonomi, pada masa Pemerintahan Barack Obama, Amerika Serikat melanjutkan kesepakatan *Millennium Challenge Corporation*, yang mengalokasikan sekitar \$434 juta (USD) yang dilakukan antara Amerika Serikat dengan Filipina dalam rangka untuk mengurangi kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan peluang baru bagi perekonomian di Filipina. Selain itu, Amerika Serikat dan Filipina juga saling bekerja sama dalam mendukung program dalam rangka untuk meningkatkan pertukaran kepariwisataan dengan mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang ada pada masalah kepariwisataan tersebut (US Department of State, 2012).

*Millennium Challenge Corporation* merupakan lembaga bantuan luar negeri Amerika Serikat, dengan tujuan untuk membantu memimpin dalam berjuang melawan kemiskinan global yang dibentuk oleh Kongres Amerika Serikat pada bulan Januari 2004. *Millennium Challenge Corporation* memberikan hibah yang mempromosikan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat lembaga. Investasi ini tidak hanya mendukung stabilitas dan kemakmuran di negara – negara mitra tetapi juga meningkatkan kepentingan Amerika Serikat (MCC, 2004).

Kerja sama yang terjalin antara Amerika Serikat dengan Filipina tetap menjadi elemen penting yang mendasari perdamaian dan keamanan regional. Hubungan kerja sama ini terus meningkat dengan tujuan untuk mengatasi tantangan dan peluang di kawasan regional yang lebih baik yang dihadapi oleh kedua negara ini. Oleh karena itu, Amerika Serikat dan Filipina tetap melanjutkan koordinasi mengenai isu masing – masing.

## 2.2 Hubungan Amerika Serikat dengan Filipina pada Periode Kedua Masa Jabatan Barack Obama

Salah satu yang dilakukan antara Amerika Serikat dengan Filipina pada masa Pemerintahan Barack Obama dalam menjalin hubungan baik adalah dengan mempererat hubungan diplomatik dan pertahanan. Salah satunya yaitu dengan melakukan penambahan pelatihan dan latihan untuk pasukan militer Filipina. Latihan keamanan maritim juga dilakukan, dan beberapa hal yang dilakukan lainnya adalah penanggulangan bencana, dan kegiatan kemanusiaan.

Filipina memandang Amerika Serikat sebagai pihak yang dapat membantunya dalam menempatkan posisinya dengan lebih baik. Pada saat Amerika Serikat mempertahankan posisi netralnya dalam sengketa di Laut China Selatan, disini Amerika Serikat memberikan konsultasi pertahanan kepada Filipina sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Pertahanan Bersama. Hubungan antara kedua negara tersebut telah mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir ini, khususnya peningkatan dalam kerja sama di beberapa bidang, diantaranya adalah dalam bidang militer, bidang ekonomi, dan dalam bidang politik (VOA Indonesia, 2012).

### 2.2.1 Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan antara Amerika Serikat dengan Filipina pada Masa Pemerintahan Barack Obama

Hubungan kerja sama yang terjalin antara Amerika Serikat dengan Filipina tidak lepas dari hubungan kerja sama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Kedua negara ini saling bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang pertahanan dan keamanan sejak awal melakukan hubungan kerja sama, yang dimulai setelah Amerika Serikat memberikan kemerdekaan kepada Filipina. Kerja sama khususnya dalam bidang pertahanan dan keamanan ini pertama kali dilakukan pada tahun 1947, melalui penandatanganan *Military Bases Agreement*. *Military Bases Agreement* ini merupakan perjanjian antara Amerika Serikat dan Filipina yang mengatur tentang kehadiran pangkalan militer Amerika Serikat di Filipina, dan merupakan dasar untuk melanjutkan perjanjian – perjanjian yang dibentuk selanjutnya (Gumilar, 2013: 3).

Perjanjian selanjutnya yang dilakukan dalam bidang pertahanan dan keamanan adalah perjanjian *Mutual Defense Treaty* atau perjanjian pertahanan bersama yang dibentuk pada tahun 1951, yang mengatur tentang kedua negara yaitu Amerika Serikat dan Filipina yang saling mendukung jika salah satu mendapatkan serangan dari pihak lain (Gumilar, 2013: 3). Perjanjian yang dibentuk selanjutnya dalam bidang pertahanan dan keamanan adalah perjanjian *Visiting Forces Agreement*, yang dibentuk pada tahun 1998, dan mulai berlaku pada tahun 1999. Perjanjian ini berisi mengenai membuka jalan bagi penambahan kunjungan pasukan militer Amerika Serikat, kapal ke berbagai pelabuhan di Filipina dan latihan gabungan antara militer Amerika Serikat dengan Filipina (Gumilar, 2013: 3).

Grafik 2.1 Anggaran militer Filipina



Sumber: SIPRI. 2018. *Sipri Military Expenditure Database*. Dikutip dari SIPRI. Diakses melalui: <https://www.sipri.org/databases/milex> Pada tanggal 12 Juni 2018

Pada masa Pemerintahan Barack Obama, Amerika Serikat dan Filipina kembali melakukan kerja sama pertahanan yaitu kerja sama dalam perjanjian *Enhanced Defense Cooperation Agreement* (EDCA), pada tanggal 28 April 2014. Dalam penandatanganan kerja sama ini, Barack Obama mengatakan bahwa perjanjian pertahanan antara kedua negara yang baru saja ditandatangani tersebut

bisa membantu memperkuat kemampuan pertahanan Filipina dan mendorong perdamaian dan kestabilan kawasan. Perjanjian ini berlaku selama 10 tahun mengenai perizinan Amerika Serikat untuk berhak dalam mendekati secara lebih besar pangkalan – pangkalan militer, pelabuhan dan bandara Filipina (VOV World, 2014).

Perjanjian *Enhanced Defense Cooperation Agreement*, ini dilakukan pada masa Pemerintahan Benigno Aquino III. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 28 April 2014. Hubungan antara Presiden Amerika Serikat, Barack Obama dengan Presiden Filipina, Benigno Aquino III berjalan cukup baik. Pada saat kemenangan Benigno Aquino III, Barack Obama memberikan ucapan selamat. Gedung Putih mengatakan bahwa Barack Obama dan Benigno Aquino III bersepakat untuk membawa kedua negara menuju kerja sama kepada level yang baru dan mengadakan pertemuan pada waktu yang tepat (Detik News, 2010).

Kerja sama militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Filipina pada masa Pemerintahan Barack Obama ini dilakukan salah satunya dengan tujuan untuk menyusun strategi baru Pemerintah Amerika Serikat, yaitu merupakan strategi baru militer kebijakan Barack Obama yang berfokus pada wilayah Asia – Pasifik. Filipina merupakan wilayah yang cukup strategis yang ada di Asia – Pasifik. Selama ini, Amerika Serikat aktif melancarkan propaganda luas dan mengancam negara China sebagai bahaya yang ada di kawasan tersebut. Hal ini dilakukan Amerika Serikat dengan tujuan untuk mendukung Pemerintah Manila. Perjanjian *Enhanced Defense Cooperation Agreement* ini merupakan perjanjian antara Amerika Serikat dengan Filipina dengan tujuan untuk memperkuat pertahanan keamanan Filipina dan mendorong perdamaian dan kestabilan di kawasan Asia Pasifik.

Berikut ini merupakan perjanjian antara Amerika Serikat dan Filipina dalam bidang pertahanan dan keamanan yang dilakukan pada masa pemerintahan Barack Obama:

### ***Enhanced Defense Cooperation Agreement***

*“The Embassy of the United States of America presents its compliments to the Department of Foreign Affairs of the Republic of the Philippines and has the honor to refer to discussions between our two Governments regarding Agreed Locations under paragraph 4 of Article II of the Agreement Between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of the Philippines on Enhanced Defense Cooperation, done at Quezon City on April 28, 2014 (the "Agreement").*

*The Embassy has the honor to propose that the attached Annex A, with attached maps, indicating Agreed Locations be appended to and form an integral part of the Agreement pursuant to paragraph 3 of Article XII of the Agreement.*

*If the foregoing proposal is acceptable to the Government of the Republic of the Philippines, the Embassy proposes that this note, with attachment, and the Department's note in reply to that effect shall constitute an agreement between our two Governments, which shall enter into force on the date of the Department's note. The Embassy confirms that the Government of the United States of America has completed all necessary internal procedures for entry into force of the agreement.*

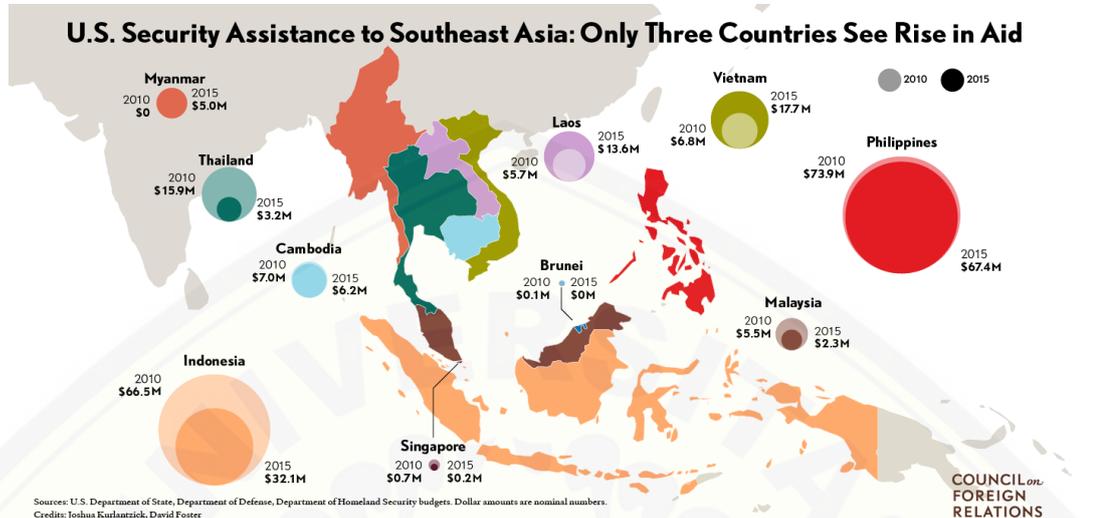
*The Embassy of the United States of America avails itself of this opportunity to renew to the Department of Foreign Affairs of the Republic of the Philippines the assurances of its highest consideration” (US Department of State, 2016).*

Penjelasan dari perjanjian di atas adalah bahwa strategi baru Pemerintah Amerika Serikat yang merupakan kebijakan Barack Obama ini salah satunya dilakukan dengan melalui kerja sama *Enhanced Defense Cooperation Agreement* (EDCA). Dalam kerja sama tersebut, disebutkan adanya tawaran pangkalan militer Filipina untuk Amerika Serikat. Menteri pertahanan Filipina, Voltaire T. Gazmin mengatakan bahwa Filipina menawarkan 8 pangkalan militer kepada Amerika Serikat, sehingga Amerika Serikat dapat membangun berbagai fasilitas yang digunakan untuk keperluan militer, seperti tempat untuk penyimpanan peralatan persenjataan, arsenal dan berbagai suplai lainnya (Ebri, 2016: 8).

Dalam tawaran pangkalan militer untuk Amerika Serikat tersebut, 5 diantaranya adalah lapangan udara militer, 2 pangkalan angkatan laut, dan 1 kemah pelatihan hutan. Terdapat 3 pangkalan militer yang terletak di Pulau Luzon yaitu berada di sebelah utara Filipina. Termasuk juga pangkalan udara Clark, yang sebelumnya pernah ditempati oleh Amerika Serikat dan 2 lainnya berada di pulau barat Palawan yang berada di dekat Laut China Selatan. Amerika Serikat juga mencari akses untuk 3 pelabuhan dan bandara sipil yang ada di pulau Luzon, termasuk diantaranya adalah Teluk Subic yang sebelumnya juga pernah menjadi basis angkatan laut Amerika Serikat (Reuters, 2016).

Filipina telah menerima 27.200 pucuk senapan M4 yang berasal dari produsen senjata api Remington di Amerika Serikat pada tahun 2014. Senapan M4 tersebut menggantikan senapan M16 di Filipina yang ada sejak sekitar tahun 1960. Kemudian Pemerintah Filipina melakukan pembelian 63.000 senapan M4 tersebut dengan menghabiskan biaya US\$ 54,88 juta. Amerika Serikat juga memberikan 114 kendaraan berlapis baja M113 dalam rangka untuk membantu pasukan militer Filipina. Amerika Serikat juga memberikan sejumlah dana kepada Filipina dengan jumlah US\$ 79 juta yang diberikan pada tahun 2015, dan US\$ 140 juta pada tahun 2016 yang digunakan untuk menjaga keamanan maritim (Ebri, 2016).

Gambar 2.2 Bantuan keamanan Amerika Serikat kepada Negara – Negara di Asia Tenggara (dalam juta US\$)



Sumber: Council on Foreign Relations. 2016. *Rebalance to Asia Led to Drop in Security Assistance for Southeast Asia*. Dikutip dari Council on Foreign Relations. Diakses melalui: [https://www.cfr.org/interactives/rebalance-asia?utm\\_source=redirect&utm\\_medium=earned&utm\\_campaign=legacy\\_campaign&utm\\_marketing\\_use=rebalancetoasia#!/rebalance-asia?utm\\_source=redirect&utm\\_medium=earned&utm\\_campaign=legacy\\_campaign&utm\\_marketing\\_use=rebalancetoasia](https://www.cfr.org/interactives/rebalance-asia?utm_source=redirect&utm_medium=earned&utm_campaign=legacy_campaign&utm_marketing_use=rebalancetoasia#!/rebalance-asia?utm_source=redirect&utm_medium=earned&utm_campaign=legacy_campaign&utm_marketing_use=rebalancetoasia) Pada tanggal 28 Mei 2018

Selain tawaran pangkalan militer Filipina untuk militer Amerika Serikat dan bantuan Latihan militer Amerika Serikat untuk Filipina, kedua negara juga melakukan latihan militer gabungan antara kedua negara ini bernama *Balikatan*. Latihan gabungan *Balikatan* pada tahun 2014 yaitu pada masa Pemerintahan Barack Obama melibatkan 3000 tentara Filipina dan 2.500 tentara Amerika Serikat. Latihan gabungan *Balikatan* yang dilakukan pada 5 Mei 2014 ini dilakukan selama 10 hari, diantaranya bertempat di Provinsi Zambales dan Palawan yang berada di dekat wilayah sengketa Laut China Selatan. Latihan militer gabungan ini merupakan hasil dari penandatanganan dalam perjanjian *Mutual Defence Treaty* pada tahun 1951 yang berarti “bahu membahu”, dimana dalam perjanjian tersebut dilakukan latihan perang setiap satu tahun sekali. Perjanjian tersebut memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan kerja sama militer (Ebri, 2016: 8).

Pada latihan militer gabungan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Filipina ini, jumlah personel dari Amerika Serikat yang datang ke Filipina

tergantung pada kerja sama militer yang diselenggarakan di Filipina. Personil dari Amerika Serikat tersebut tidak ditempatkan secara permanen pada perjanjian *Enhanced Defense Cooperation Agreement*, hal ini bergantung pada apa yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak (Ebri, 2016: 8).

Kerja sama yang terjalin antara Amerika Serikat dan Filipina pada awalnya didasarkan pada kebutuhan militer yang saling ketergantungan. Filipina membutuhkan bantuan dari Amerika Serikat di bidang militer untuk membeli pasokan senjata dengan tujuan untuk memperkuat keamanan di Filipina dan bersama dengan Amerika Serikat melakukan latihan militer gabungan. Sedangkan dari pihak Amerika Serikat, Amerika Serikat membutuhkan kerja sama dengan Filipina untuk mendapatkan akses yang mudah di kawasan Asia – Pasifik, karena Filipina merupakan negara yang memiliki letak strategis di kawasan Asia – Pasifik, khususnya untuk kepentingan pada sengketa Laut China Selatan. Amerika Serikat telah melakukan kerja sama patroli angkatan laut dengan Filipina di Laut China Selatan.

Kerja sama yang terjalin antara Amerika Serikat dan Filipina tidak hanya menguntungkan salah satu pihak saja, tetapi pada kerja sama ini kedua belah pihak sama – sama diuntungkan. Filipina telah melakukan modernisasi dalam bidang pertahanan dan keamanan dengan membeli beberapa peralatan persenjataan yang juga di bantu oleh Amerika Serikat. Pembelian peralatan dalam bidang pertahanan dan keamanan ini salah satunya adalah membeli 2 alutsista. Alutsista tersebut adalah kapal patroli bekas Hamilton yang dibeli dari Amerika Serikat.

Kerja sama yang terjalin antara Amerika Serikat dengan Filipina terkait kerja samanya dalam bidang militer maupun kepentingannya dalam sengketa Laut China Selatan sudah cukup banyak. Pada masa Pemerintahan Barack Obama, beberapa kerja sama tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan hubungan baik yang terjalin antara kedua negara yang sudah terjalin selama 70 tahun.

### **2.3 Isu – Isu Aktual dan Dampaknya Terhadap Hubungan Amerika Serikat dan Filipina**

Pada saat Filipina melakukan pergantian Presiden dan dimenangkan oleh Rodrigo Duterte, hubungan kerja sama bilateral antara Amerika Serikat dengan Filipina mulai merenggang. Pada saat itu, Barack Obama sedang menjabat pada periode kedua masa jabatan Presiden di Amerika Serikat. Barack Obama telah menjabat selama dua periode, yaitu periode pertama pada tahun 2009 sampai tahun 2013, dan dilanjutkan pada periode kedua tahun 2013 sampai pada tahun 2017. Ketegangan hubungan antara kedua negara ini mulai terjadi pada tahun 2016, dimana Presiden Rodrigo Duterte mulai menjabat menjadi Presiden Filipina dan kemudian mulai menerapkan kebijakannya dalam memberantas Narkoba di Filipina, yang merupakan awal dari kerenggangan hubungan Amerika Serikat dan Filipina.

Presiden Rodrigo Duterte mulai menjabat pada tanggal 30 Juni 2016. Pemilihan Presiden yang dimenangkan oleh Rodrigo Duterte ini terjadi setelah pesaing dari Rodrigo Duterte yaitu Manue Roxas mengundurkan diri dari persaingan dan mengakui kealahannya. Dalam pemilihan Presiden ini, Rodrigo Duterte mendapatkan banyak dukungan dari rakyat Filipina berkat dari janji – janji Rodrigo Duterte untuk memberantas kejahatan di Filipina dan menyingkirkan para pejabat yang melakukan korupsi. Rodrigo Duterte pun menjabat sebagai Presiden Filipina menggantikan Benigno Aquino III (BBC Indonesia, 2016).

#### **2.3.1 Kebijakan Narkoba Presiden Rodrigo Duterte**

Negara Filipina merupakan salah satu negara yang berada di wilayah Asia yang menjadi tempat sebagai laboratorium industri rumah tangga yang memproduksi Narkoba, yang nantinya didistribusikan di wilayah Asia. Pada saat terpilih menjadi Presiden Filipina ke – 16, Presiden Rodrigo Duterte telah memperingatkan kepada para pengedar Narkoba dan para pelaku kejahatan Narkoba bahwa Presiden Rodrigo Duterte berencana untuk membunuh mereka, “Jangan menghancurkan negara kami, karena saya akan membunuh anda”, kata

Presiden Rodrigo Duterte. Presiden Rodrigo Duterte mengatakan bahwa ia akan membunuh 100.000 pelaku kriminal Narkoba dalam waktu enam bulan pertama pada masa pemerintahannya. Pemberantasan terhadap pelaku kejahatan Narkoba tersebut dilakukan dengan membunuh tanpa menggunakan keadilan (BBC Indonesia, 2016).

Sebagian besar warga Filipina yang menjadi korban dari kejahatan Narkoba yang jasadnya ditemukan di lingkungan kumuh adalah para penduduk dari kalangan bawah atau penduduk miskin, seperti buruh, tukang becak, dan para penduduk yang tidak bekerja (pengangguran). Ketika jasad tersebut ditemukan, seringkali terdapat peringatan berupa tulisan di kertas untuk tidak terlibat dalam kejahatan Narkoba (BBC Indonesia, 2016). Hingga saat ini, dalam kebijakan perang melawan Narkoba tersebut, telah menewaskan sekitar 4.100 orang (BBC Indonesia, 2017).

Dalam aksi pemberantasan Narkoba tersebut, Presiden Rodrigo Duterte lebih banyak mengandalkan administrasi desa untuk mencatat daftar nama – nama penduduk yang terlibat dalam aksi kejahatan Narkoba (yang diduga mengkonsumsi maupun yang mengedarkan Narkoba). Bagi kepala desa yang tidak menyerahkan daftar, maka dianggap sebagai orang yang terlibat dalam kejahatan Narkoba dan mendapat ancaman untuk dibunuh. Presiden Rodrigo Duterte juga menyerukan kepada para penduduk Filipina untuk ikut serta dalam memberantas pelaku kejahatan Narkoba bagi siapa saja yang memiliki senjata dan mengetahui pengedar maupun pecandu Narkoba yang menolak untuk diamankan. Tidak sedikit dari warga sipil Filipina yang menjadi pembunuh bayaran untuk membantu Pemerintah dalam aksi pemberantasan Narkoba tersebut. Setiap warga sipil di Filipina yang turut dalam aksi tersebut mendapatkan upah sebesar 430 Dolar AS atau sekitar 5.5 juta rupiah pada setiap nyawa (DW, 2017).

Amerika Serikat sebagai partner kerja sama Filipina memberikan pernyataan bahwa kebijakan pemberantasan Narkoba tersebut telah melanggar hak asasi manusia. Hal ini tidak sesuai dengan komitmen pada prinsip mengenai hak asasi manusia yang sudah tercantum dalam Deklarasi Universal PBB, yang diantaranya mengenai Konvensi PBB dalam melawan korupsi, dan instrumen

internasional lainnya yang terkait dengan hak asasi manusia (Suara, 2016). Presiden Rodrigo Duterte pun menanggapi pernyataan dari Pemerintah Amerika Serikat dengan mengumumkan kepada publik internasional untuk berpisah dengan Amerika Serikat. Presiden Rodrigo Duterte mengumumkan pernyataan tersebut pada tanggal 20 Oktober 2016 pada saat acara kunjungan kenegaraan di China. Pada saat itu Presiden Rodrigo Duterte menyatakan bahwa ia berkeinginan untuk memutuskan hubungan secara diplomatik dengan Amerika Serikat dalam bidang militer, sosial, maupun ekonomi.

Presiden Rodrigo Duterte merasa kecewa dengan Amerika Serikat yang tidak mendukung Pemerintah Filipina dalam kebijakannya dalam memberantas kejahatan Narkoba. Presiden Rodrigo Duterte menyampaikan kekecewaannya yang ditujukan kepada Amerika Serikat dalam sebuah pidatonya pada saat konvensi yang dilaksanakan bersama dengan beberapa pejabat di Filipina. Kekesalannya terhadap Amerika Serikat tersebut membuat Presiden Rodrigo Duterte berkeinginan untuk memutuskan hubungan kerja sama antara Filipina dengan Amerika Serikat.

Presiden Rodrigo Duterte yang dikenal sebagai sosok yang kasar dalam berbicara, menjadikan hubungan antara Filipina dengan Amerika Serikat pada masa Pemerintahan Barack Obama menjadi kurang harmonis. Ketidaksetujuan Pemerintah Amerika Serikat terhadap kebijakan Presiden Rodrigo Duterte mengenai perang melawan Narkoba ini merupakan awal merenggangnya hubungan antara kedua negara. Sikap Amerika Serikat mengenai kebijakan pemberantasan Narkoba oleh Presiden Rodrigo Duterte tersebut juga mendapatkan tanggapan yang pedas dari Presiden Rodrigo Duterte yang ditujukan untuk Barack Obama dengan mengatakan "*son of the bitch, i will swear at you*" dan memperingatkan pemimpin Amerika Serikat itu agar tidak mengangkat masalah hak asasi manusia. Presiden Rodrigo Duterte merasa berang terhadap Barack Obama, karena ikut campur dengan kebijakan dalam negeri Filipina. Namun demikian tidak hanya Amerika Serikat yang mengecam kebijakan dari Presiden Rodrigo Duterte tersebut, melainkan juga Uni Eropa dan PBB (Sindo News, 2016).

Presiden Rodrigo Duterte mengatakan bahwa “Presiden Amerika Serikat Barack Obama bisa 'pergi ke neraka' karena kecamannya terhadap perang brutal yang dilancarkan Filipina terhadap Narkoba”. Presiden Rodrigo Duterte juga mengatakan “Lebih baik memilih api penyucian, purtagori, karena neraka sudah penuh”, yang ditujukan untuk Uni Eropa (BBC Indonesia, 2016).

Akibat dari kebijakan Presiden Rodrigo Duterte yang telah mendapatkan kecaman dari berbagai pihak tersebut, membuat pakar hak asasi manusia PBB berinisiatif untuk memeriksa Presiden Filipina, sebagai orang yang membuat kebijakan. Presiden Rodrigo Duterte pun bersedia apabila pakar hak asasi manusia dari PBB tersebut datang ke Filipina dan menyelidiki aksi pembunuhan massal yang dilancarkan atas kebijakan pemberantasan Narkoba di Filipina. Namun demikian PBB belum mendapatkan undangan secara resmi dari Filipina atas bersedianya Presiden Rodrigo Duterte untuk diselidiki (Jakarta Greater, 2016).

Menteri Luar Negeri Filipina, Perfecto Yasay mengatakan kepada khalayak internasional untuk tidak ikut campur urusan dalam negeri Filipina. “Presiden Rodrigo Duterte memiliki hak untuk membersihkan negara Filipina dari kejahatan Narkoba dan korupsi, dan saat ini negara Filipina sedang berupaya untuk memenuhi hak tersebut,” kata Menteri Luar Negeri Filipina tersebut. “Pemerintahan Rodrigo Duterte memiliki tekad untuk membebaskan negara Filipina dari praktik stagnan korup dan lainnya, termasuk manufaktur, distribusi dan penggunaan obat-obatan terlarang. Tindakan kita, bagaimanapun, telah memegang kedua berita utama nasional dan perhatian internasional untuk semua alasan yang salah,” tambah Yasay pada Sidang Umum PBB (Jakarta Greater, 2016).

Presiden Rodrigo Duterte telah membuat kebijakan yang cukup keras dan cukup menyita perhatian para penduduk nasional maupun internasional, dimana seorang Presiden mengizinkan kepada para penegak hukum di Filipina maupun warga sipil Filipina untuk ikut serta dalam pembunuhan massal para pelaku kejahatan Narkoba di Filipina. Bahkan bagi orang yang turut serta dalam pembunuhan tersebut mendapatkan upah dari Pemerintah dan mendapatkan perlindungan.

### 2.3.2 Dampak yang Terjadi Terhadap Hubungan Amerika Serikat dan Filipina

Hubungan Amerika Serikat dan Filipina yang sedang mengalami ketegangan tersebut menjadikan beberapa masalah yang muncul pada hubungan kerja sama antara kedua negara. Akibat dari ketidaksetujuan Amerika Serikat terhadap kebijakan dalam negeri Filipina dibawah Pemerintahan Rodrigo Duterte mengenai perang melawan Narkoba, Rodrigo Duterte yang menjabat sebagai Presiden Filipina menyatakan untuk putus hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat.

Putus hubungan disini dimaksudkan Presiden Rodrigo Duterte sebagai putus hubungan secara diplomatik. Pemutusan hubungan ini dinyatakan oleh Presiden Rodrigo Duterte pada saat acara kunjungan kenegaraan di China yaitu pada tanggal 20 Oktober 2016. Presiden Rodrigo Duterte memberikan pernyataan untuk putus hubungan secara diplomatik dengan Amerika Serikat dengan alasan karena dalam menjalin kerja sama dengan Amerika Serikat selama kurang lebih 70 tahun, kerja sama tersebut lebih banyak menguntungkan pihak Amerika Serikat dari pada Filipina. Dalam masa pemerintahannya saat ini, Presiden Rodrigo Duterte tidak ingin Filipina kembali dikuasai oleh Amerika Serikat, dan Filipina tidak lagi selalu mengikuti kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

Dalam pemutusan hubungan secara diplomatik yang dilakukan oleh Presiden Rodrigo Duterte, terdapat beberapa hal yang dilakukan oleh Presiden Rodrigo Duterte terkait kerja sama Filipina dengan Amerika Serikat. Beberapa yang dilakukan adalah pernyataan dari Presiden Rodrigo Duterte yang mengancam untuk mengusir militer Amerika Serikat yang ditempatkan di Filipina, dan ancaman pengusiran diplomat Uni Eropa di Filipina.

### 2.3.3 Ancaman Pengusiran Militer Amerika Serikat di Filipina

Sebagai seorang Presiden yang dalam kebijakannya mendapatkan banyak kecaman dari berbagai pihak. Presiden Filipina, Rodrigo Duterte yang juga dikenal sebagai orang yang memiliki gaya bicara yang kasar, merasa tidak terima dengan yang dikatakan publik internasional mengenai kebijakan kerasnya dalam pemberantasan Narkoba di Filipina. Pada akhirnya pun ada beberapa hal yang

dilakukan oleh Presiden Rodrigo Duterte untuk membuktikan bahwa Filipina dapat berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dari pihak yang telah mengecam kebijakannya, salah satunya adalah Amerika Serikat. Presiden Rodrigo Duterte mengancam Amerika Serikat dengan mengusir pasukan militer Amerika Serikat yang ditempatkan di Filipina.

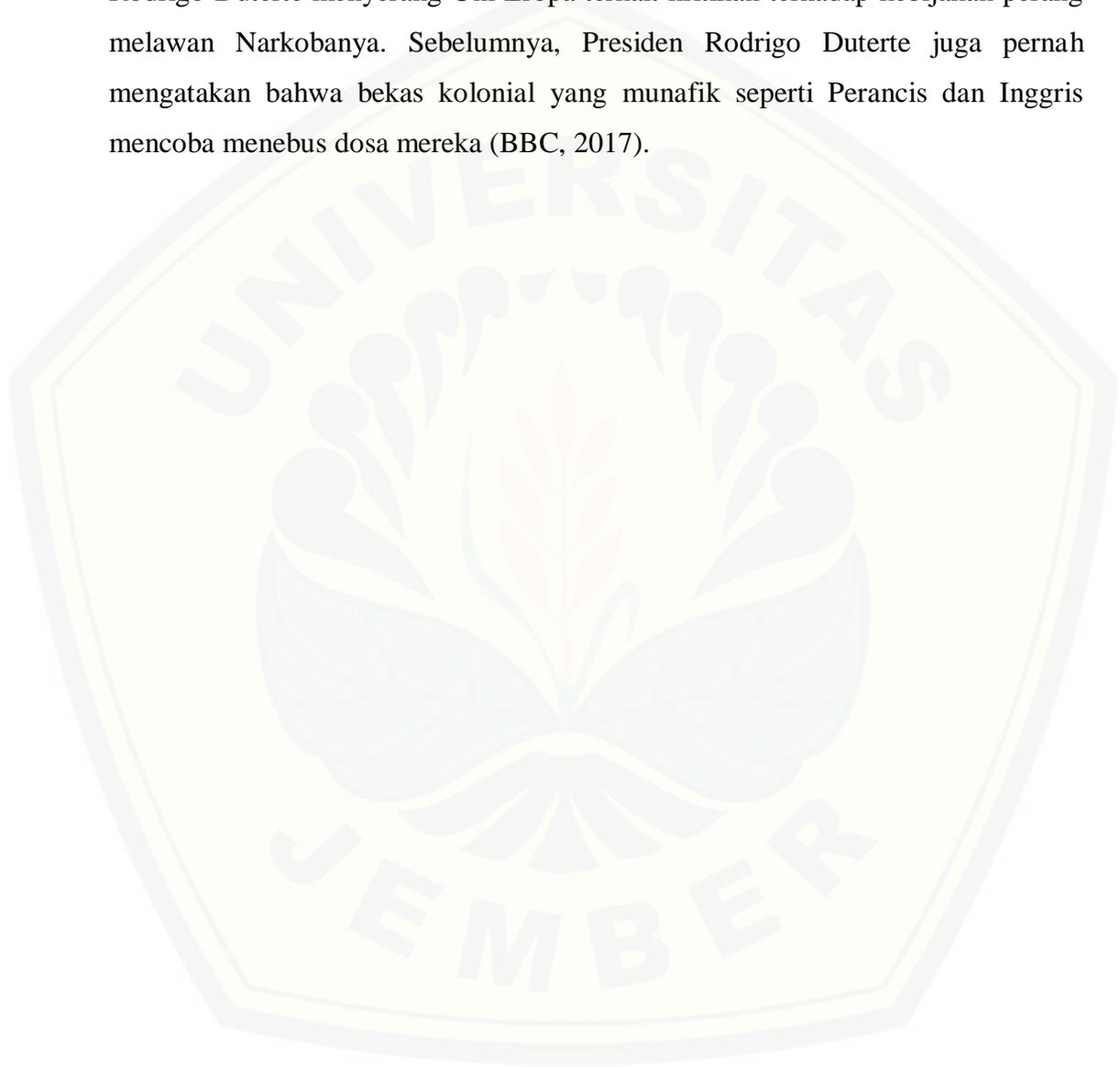
Pada tanggal 12 September 2016, Presiden Filipina, Rodrigo Duterte kembali memberikan pernyataan mengenai hubungannya dengan Amerika Serikat khususnya dalam bidang militer dengan mengatakan bahwa semua anggota pasukan khusus Amerika Serikat harus keluar dari Filipina. Pernyataan tersebut membuat hubungan kedua negara semakin memanas. Presiden Rodrigo Duterte mengatakan “Pasukan khusus Amerika Serikat ini, mereka harus pergi dan Mindanao,” kata Presiden Rodrigo Duterte dalam pidatonya di depan para pegawai negeri Filipina (Tribun News, 2016).

Pengusiran militer Amerika Serikat oleh Presiden Rodrigo Duterte ini masih dalam sebatas pernyataan, belum ada konfirmasi secara langsung dari Presiden Rodrigo Duterte terhadap Pemerintah Amerika Serikat. Presiden Rodrigo Duterte juga tidak menjelaskan berapa pasukan militer Amerika Serikat yang harus meninggalkan Filipina dan kapan itu dilakukan. Sebelumnya terdapat kurang lebih 500 pasukan militer Amerika Serikat yang di tempatkan di Mindanao, Filipina. Namun demikian pada tahun 2014, menteri pertahanan Filipina, Voltaire Guzman mengurangi jumlahnya hingga menjadi 200 personel (Tribun News, 2016).

#### 2.3.4 Ancaman Pengusiran Diplomat Uni Eropa Di Filipina

Setelah mengancam pasukan militer Amerika Serikat untuk keluar dari wilayah Mindanao di Filipina pada Oktober 2017, Presiden Rodrigo Duterte mengancam untuk mengusir diplomat Uni Eropa di Filipina dalam waktu 24 jam, “Anda harus meninggalkan negeri saya dalam waktu 24 jam, anda semua”, kata Presiden Rodrigo Duterte. Presiden Rodrigo Duterte menuduh Uni Eropa bersekongkol untuk mengeluarkan Filipina dari PBB terkait kebijakannya dalam memberantas kejahatan Narkoba yang dinilai melanggar hak asasi manusia.

Dalam pidatonya tersebut, Presiden Rodrigo Duterte mengatakan bahwa Filipina akan di singkirkan dari PBB, dan menambahkan “Kalian mencampuri urusan dalam negeri karena kami miskin, kalian memberi uang dan kemudian mengatur apa yang harus dilakukan”. Hal ini bukan merupakan pertama kalinya Presiden Rodrigo Duterte menyerang Uni Eropa terkait kritikan terhadap kebijakan perang melawan Narkobanya. Sebelumnya, Presiden Rodrigo Duterte juga pernah mengatakan bahwa bekas kolonial yang munafik seperti Perancis dan Inggris mencoba menebus dosa mereka (BBC, 2017).



### **BAB 3. SIKAP AMERIKA SERIKAT DIBAWAH KEPEMIMPINAN DONALD TRUMP TERHADAP FILIPINA**

Bab 3 dalam penelitian ini menjelaskan tentang sikap Amerika Serikat melakukan kerja sama bilateral dengan Filipina pada masa Pemerintahan Donald Trump. Pada masa Pemerintahan Donald Trump saat ini, hubungan Amerika Serikat dengan Filipina mulai berjalan dengan baik. Setelah sebelumnya, pada masa terakhir Pemerintahan Barack Obama, mengalami ketegangan hubungan yang mengarah pada putusnya hubungan secara diplomatik. Hubungan Amerika Serikat dengan Filipina pada masa Pemerintahan Presiden Donald Trump saat ini berusaha untuk mengembalikan hubungan yang harmonis seperti sediakala, yaitu dengan menjalankan kembali beberapa kerja sama yang sebelumnya sempat memburuk.

#### **3.1 Kemenangan Donald Trump**

Amerika Serikat merupakan negara dengan sistem Pemerintahan Presidensial dan memiliki masa jabatan Presiden selama empat tahun, dengan maksimal dua kali masa jabatan. Pemilihan Presiden di Amerika Serikat menggunakan sistem *electoral college*, *electoral* ini yang mewakili rakyat untuk memilih calon Presiden. *Electoral college* ini berjumlah 538 dari 50 negara bagian. Untuk menjadi Presiden, maka dibutuhkan setidaknya 270 *electoral college*. Pada pemilihan umum tahun 2016, tepatnya pada pemilihan umum Presiden yang ke – 45, Presiden Donald Trump telah memegang lebih dari 270 *electoral college* dan resmi menjadi pemenang pemilihan umum Presiden Amerika Serikat yang ke – 45. Pada tanggal 20 Desember 2016, Donald Trump sebagai calon Presiden dari partai Republik telah berhasil memenangkan 304 *electoral college*, sementara lawannya yaitu Hillary Clinton mendapatkan 227 suara (CNN Indonesia, 2016).

Donald Trump adalah Presiden Amerika Serikat yang menjabat ke – 45. Berdasarkan data yang diperoleh, kemenangan Donald Trump atas Hillary Clinton berdasarkan pada banyaknya pemilih Donald Trump yang berasal dari wilayah

pedesaan. Hal ini menjadikan jumlah *vote* terhadap Donald Trump lebih banyak dari pada jumlah *vote* terhadap Hillary Clinton yang berasal dari wilayah perkotaan. Sebagian besar jumlah pemilih dari Donald Trump adalah berasal dari wilayah industri, yaitu dari Minneapolis, Iowa, Michigan, Tennessee, Ohio, Pennsylvania dan Wisconsin. Sebaliknya, pendukung dari Hillary Clinton yang sebagian besar berasal dari wilayah perkotaan yang ternyata berjumlah lebih sedikit (Merdeka, 2016).

Pada wilayah – wilayah perindustrian tersebut sebagian besar penduduknya adalah berkulit putih dan memiliki pendidikan yang rendah. Para penduduk tersebut merasa frustrasi dengan pendapatan mereka yang turun secara drastis sejak resesi melanda Amerika Serikat, yaitu antara tahun 2007 hingga tahun 2014, pendapatan menurun hingga mencapai 14 persen. Dengan adanya janji – janji dari Donald Trump mengenai pemulihan industri lama dengan cara transaksi perdagangan dinegosiasi ulang dan menerapkan tarif atas impor tersebut membuat para penduduk di beberapa wilayah tersebut merasa senang dan berharap untuk dapat bangkit kembali dari menurunnya pendapatan (Merdeka, 2016).

### **3.2 Kebijakan Amerika Serikat pada Masa Pemerintahan Donald Trump**

Sebagai calon Presiden, Donald Trump memiliki beberapa visi dan kebijakan yang diberlakukan ketika memenangkan pemilihan umum di Amerika Serikat. Berikut merupakan sebagian dari visi dan kebijakan dari Presiden Donald Trump yang terkait dengan hubungan bilateralnya dengan Filipina:

#### **a. Kebijakan tentang isu terorisme**

Kebijakan mengenai terorisme menjadi prioritas utama dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Pemerintahan Donald Trump mengatakan bahwa mengalahkan ISIS dan kelompok teroris Islam radikal lainnya menjadi prioritas yang utama bagi Pemerintahan Donald Trump. Bagi Pemerintahan Donald Trump, terorisme merupakan masalah yang paling utama untuk diselesaikan. Dalam rangka untuk memberantas kelompok militan ISIS dan yang sejenisnya, Pemerintahan Donald Trump melakukan kerja sama agresif dan koalisi militer

apabila diperlukan. Beberapa hal yang dilakukan oleh Pemerintahan Donald Trump dalam rangka untuk memberantas kelompok militan ISIS dan sejenisnya adalah dengan memperluas jaringan berbagai data inteligen dan menggunakan sumber daya siber dengan tujuan untuk mengetahui dan menghindari perekrutan ISIS (Antara Jateng, 2017).

Sebelumnya pada masa Pemerintahan Barack Obama, strategi tersebut juga dilakukan yaitu dengan melakukan kerja sama dengan Eropa dan Timur Tengah dalam kampanye pengeboman yang menargetkan pemimpin ISIS dan infrastruktur minyaknya, melakukan operasi pasukan khusus Amerika Serikat terhadap kelompok ISIS, dan menggunakan sanksi dan metode lainnya untuk memotong pembiayaan ISIS (Antara Jateng, 2017).

Pada saat melakukan kampanye, Donald Trump memberikan pernyataan terhadap publik dengan mengkritik Presiden sebelumnya, yaitu Barack Obama dan pesaingnya, yaitu Hillary Clinton karena mereka tidak menggunakan kalimat “kelompok teroris Islam radikal” untuk menggambarkan ISIS dan kelompok militan lainnya. Barack Obama berpendapat bahwa apabila menggunakan kalimat tersebut dapat memunculkan masalah karena telah menyamakan “pembunuh” dengan “miliaran Muslim yang ada di seluruh dunia, termasuk di negeri ini, yang damai”. Selain itu, Hillary Clinton juga mengatakan bahwa apabila menggunakan kalimat tersebut, maka dapat menggambarkan Amerika Serikat seperti sedang melakukan perang dengan Islam (Antara Jateng, 2017).

Kebijakan dari Presiden Donald Trump mengenai isu terorisme ini terkait dengan bantuan Amerika Serikat kepada Filipina pada saat memberantas kelompok militan ISIS. Pada bulan Mei 2017, Filipina mendapat serangan dari kelompok militan ISIS. Sebagai partner kerja sama, Amerika Serikat pada masa Pemerintahan Donald Trump memberikan bantuan terhadap Filipina dalam rangka untuk memberantas kelompok militan ISIS yang sedang menyerang kota Marawi, Filipina. Amerika Serikat telah memberikan bantuan dalam memberantas aksi terorisme tersebut yang terjadi di Filipina yang berlangsung pada tanggal 23 Mei 2017 di kota Marawi. Serangan terorisme tersebut telah menewaskan ratusan

orang. Bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat tersebut berupa pengiriman sebuah pesawat pengintai, P3 Orion (CNN Indonesia, 2017).

Gambar 3.1 Pesawat pengintai P3 Orion



Sumber: Inquirer. 2017. *US spy planes helping Philippine troops in Marawi*. Dikutip dari Inquirer. Diakses melalui: <http://globalnation.inquirer.net/157864/us-spy-planes-helping-philippine-troops-marawi> Pada tanggal 5 Juni 2018

#### b. Isu mengenai Hak Asasi Manusia

Pada masa Pemerintahan Presiden Donald Trump, hak asasi manusia di Amerika Serikat mengalami penurunan. Hal ini terkait bahwa hak asasi manusia di Amerika Serikat saat ini berhubungan langsung dengan pendapatan minyak dan kepentingan finansial. Oleh karena itu hak asasi manusia akan berarti jika kepentingan finansial Amerika Serikat terpenuhi. Hal ini dapat dibuktikan dengan dukungan yang diberikan oleh Amerika Serikat terhadap Arab Saudi, dimana Arab Saudi telah banyak melanggar hak asasi manusia, salah satunya terkait bombardir dan blokade yang dilakukan Arab Saudi terhadap Yaman. Arab Saudi yang dikenal sebagai negara yang kaya dengan minyaknya membuat Amerika Serikat sebagai negara adidaya merasa bahwa bekerja sama dengan Arab Saudi lebih penting dari pada kepentingan hak asasi manusia (Pars Today, 2017).

Hal ini dapat membuktikan bahwa Amerika Serikat pada masa Pemerintahan Donald Trump lebih condong untuk mengabaikan hak asasi manusia. Selain itu, pada awal tahun 2018 persediaan minyak mentah Amerika Serikat menurun. Badan Informasi Energi (EIA) Amerika Serikat melaporkan bahwa persediaan minyak mentah di Amerika Serikat terus menurun. Pemakaian minyak mentah pada sektor penyulingan lebih rendah dari rata-rata minggu sebelumnya (Metro TV News, 2018).

Berbicara mengenai hak asasi manusia, kebijakan Filipina mengenai perang melawan Narkoba juga dinilai telah melanggar hak asasi manusia oleh beberapa pihak, namun Presiden Donald Trump memberikan apresiasi kepada Presiden Filipina dalam kebijakan tersebut. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa Presiden Donald Trump memang sependapat dengan Presiden Rodrigo Duterte dalam kebijakan Narkoba di Filipina. Dalam kebijakan tersebut, banyak pihak yang mengecam dengan alasan dalam kebijakan tersebut telah melanggar hak asasi manusia karena telah membunuh ribuan orang tanpa jalur hukum yang jelas, yaitu dengan membunuh setiap pelaku kejahatan narkoba yang menolak untuk ditangkap.

Dalam kebijakan perang melawan Narkoba oleh Presiden Rodrigo Duterte, Amerika Serikat pada masa Pemerintahan Donald Trump dan Filipina kembali berusaha untuk saling membantu dalam menyelesaikan masalah antar kedua negara. Dalam hal ini yang dilakukan oleh kedua negara dalam kebijakan perang melawan Narkoba di Filipina adalah dengan pemberian bantuan Amerika Serikat untuk Filipina. Pemberian bantuan tersebut diberikan kepada Badan Anti – Narkoba Filipina oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat yang digunakan untuk operasi anti – Narkoba di Filipina (Mata – Mata Politik, 2017).

Pemberian bantuan berupa dana senilai US\$2 juta atau 27 miliar rupiah yang diberikan Amerika Serikat terhadap Filipina ini dilakukan dengan tujuan untuk pencegahan Narkoba, penegakan hukum, dan untuk pelatihan polisi. Filipina merupakan negara yang terbukti menjadi sindikat transnasional besar

seperti Kartel Sinaloa<sup>4</sup> dan Kartel Triad<sup>5</sup>. Oleh karena itu, hal ini bisa menjadi masalah yang serius bagi Amerika Serikat dan juga negara – negara yang menjadi sekutu Filipina apabila hal ini terus terjadi. Amerika Serikat memiliki kepentingan dalam kebijakan Filipina mengenai perang melawan Narkoba, karena Amerika Serikat tidak ingin negara Filipina menjadi negara dengan pusat kartel internasional (Mata Mata Politik, 2017).

Namun demikian, Amerika Serikat juga harus berpikir dua kali ketika harus memberikan bantuan terhadap Filipina, mengingat bahwa dalam kebijakan perang melawan Narkoba tersebut telah menewaskan ribuan orang dan tidak sedikit dari pihak luar yang telah mengecam kebijakan tersebut telah melanggar hak asasi manusia. Tom Lantos, dari Komisi hak asasi manusia, mengatakan bahwa “Bagaimana Amerika Serikat harus mengimbangi kekhawatirannya dalam melindungi hak asasi manusia, dan keinginan Amerika Serikat untuk tetap mempertahankan persekutuan bilateralnya dengan Filipina” (Mata Mata Politik, 2017).

#### c. Visi dan kebijakan Donald Trump dalam bidang keamanan

Pada masa Pemerintahan Donald Trump saat ini, Presiden Amerika Serikat ini telah mengusulkan anggaran untuk militer sebesar US\$ 54 miliar atau sekitar Rp 700 triliun, yang digunakan untuk belanja pesawat, kapal, dan tunjangan untuk tentara. Usulan untuk anggaran tersebut sesuai dengan janji kampanye Donald Trump untuk meningkatkan belanja Pentagon atau anggaran pertahanan Amerika Serikat. Anggaran militer Amerika Serikat sendiri sejak tahun 2013 sebesar US\$ 569,3 miliar atau Rp 7.393,5 triliun (Harian Sejarah, 2017).

Mick Mulvaney, selaku direktur anggaran Gedung Putih mengatakan bahwa peningkatan belanja untuk anggaran pertahanan Amerika Serikat akan

---

<sup>4</sup> Kartel Sinaloa merupakan sindikat penyelundup obat – obatan, seperti Narkoba dan lain – lain, yang menjadi kartel Narkoba paling dominan dan yang terbesar di Meksiko. CNN Indonesia. 2015. *Kartel Sinaloa, kerajaan Narkoba ‘Si Pendek’*. Dikutip dari CNN, melalui: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150714115526-134-66273/kartel-sinaloa-kerajaan-narkoba-si-pendek> Pada tanggal 3 Februari 2018

<sup>5</sup> Kartel Triad merupakan sindikat bawah tanah paling berbahaya di China dan Hong Kong, dengan perdagangan narkoba yang memberikan sumbangan besar untuk Triad. Vice. 2017. *Upaya Berbahaya Melacak Jejak Anggota Triad*. Dikutip dari Vice, melalui: [https://www.vice.com/id\\_id/article/wnzpbb/upaya-berbahaya-melacak-jejak-anggota-triad](https://www.vice.com/id_id/article/wnzpbb/upaya-berbahaya-melacak-jejak-anggota-triad) Pada tanggal 3 Februari 2018

mencapai US\$ 605 miliar atau sekitar 7.800 triliun, anggaran ini pun belum termasuk operasi militer di luar negeri. Amerika Serikat telah menghabiskan dana yang cukup besar untuk anggaran pertahanan termasuk juga untuk NATO. Presiden Donald Trump pun diprediksi akan mengeluarkan kebijakan kontroversial di bidang pertahanan dan keamanan Amerika Serikat (Harian Sejarah, 2017).

Seorang analis politik, Stuart Rothenberg mengatakan bahwa banyak dari pakar sebelumnya yang berpendapat bahwa fokus mengenai keamanan dapat membantu kandidat, seperti Jeb Bush untuk membangun momentum bagi dirinya, namun kenyataannya tidak. Stuart Rothenberg juga mengatakan bahwa “Krisis kebijakan luar negeri atau kondisi pertahanan dan keamanan nasional tadinya dikira dapat membantu meningkatkan dukungan terhadap kandidat yang memiliki pengalaman dalam kebijakan luar negeri dan keamanan nasionalnya. Faktanya, sejauh ini malah membantu kandidat yang paling bombastis, yaitu Donald Trump” (VOA Indonesia, 2016).

Visi keamanan oleh Presiden Donald Trump tidak hanya diberlakukan untuk keamanan nasional, namun demikian Presiden Donald Trump juga melakukan kerja sama keamanan dengan beberapa negara, salah satunya adalah membentuk kerja sama keamanan dengan beberapa negara anggota ASEAN, seperti Filipina, Thailand, Indonesia, dan Malaysia. Amerika Serikat memiliki keuntungan dengan melakukan kerja sama keamanan internasional dengan negara – negara anggota ASEAN, dimana negara – negara anggota ASEAN merupakan negara – negara yang memiliki wilayah strategis karena menjadi akses bagi perdagangan internasional dilihat dari potensi kekayaan alam dan geografisnya. Disini Amerika Serikat melihat ancaman yang cukup besar dari negara Tiongkok yang tidak segan – segan untuk memperluas wilayahnya di Asia. Oleh karena itu, dalam hal ini Amerika Serikat tidak ingin melepaskan kendalinya di wilayah Asia Tenggara (Dwi Ardiyanti, 2017:107).

Filipina merupakan negara yang cukup berpengaruh dilihat dari perkembangan yang semakin membaik di ASEAN. Filipina juga merupakan negara yang memiliki peran penting di dalam ASEAN. Pada tahun 2017, Filipina

menjadi ketua ASEAN. Visi yang akan di capai oleh Filipina sebagai ketua ASEAN adalah dapat menyelesaikan COC (Code of Conduct)<sup>6</sup> di Laut China Selatan. Duta besar Filipina untuk ASEAN, Elizabeth Buensuceso mengatakan bahwa selama kepemimpinan Filipina ini, kami berharap bisa menyelesaikan dokumen untuk melindungi para pekerja migran dan memberikan perlindungan sosial bagi warga ASEAN. Pada saat acara penutupan KTT ASEAN yang ke – 31, tepatnya pada bulan November 2017, Presiden Rodrigo Duterte mengatakan bahwa Filipina telah melaksanakan tanggung jawab sebagai ketua ASEAN pada tahun 2017. KTT ASEAN yang bertempat di Filipina ini sekaligus menjadi akhir dari keketuaan Filipina di ASEAN dan kemudian diberikan kepada Singapura (Metro TV news, 2017).

#### d. Kebijakan Laut China Selatan

Amerika Serikat telah menjalin beberapa kerja sama dengan negara – negara anggota ASEAN, termasuk Filipina dan Indonesia. Sebagian besar negara – negara anggota ASEAN memang mengandalkan kerja sama dengan negara maju, seperti Amerika Serikat. Hal ini terkait dengan negara China yang semakin memperbesar kekuatannya di Laut China Selatan. Kerja sama juga dilakukan Amerika Serikat dengan negara – negara anggota ASEAN dengan tujuan mencegah semakin besarnya kekuatan China (Dwi Ardiyanti, 2017:108).

Pada saat Donald Trump terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat, ia mulai berkeinginan untuk memperbaiki hubungan kerja sama dengan Filipina. Salah satu yang dilakukan adalah dengan melanjutkan kerja sama dalam mengatasi masalah sengketa Laut China Selatan. Dalam membangun hubungan bilateral antara Amerika Serikat dengan Filipina, Amerika Serikat ingin tetap mempertahankan pengaruhnya yang ada di wilayah Asia Pasifik. Selain munculnya China pada sengketa Laut China Selatan, yaitu China merupakan negara besar

---

<sup>6</sup>Code of Conduct: Kode Etik: Memiliki fungsi yang digunakan untuk acuan ketika terdapat masalah maupun ketegangan yang muncul dan sebagai dasar dalam kode etik untuk negosiasi formal mengenai isu – isu dalam Laut China Selatan. Kompasiana. 2017. *Mengenal DOC dan COC untuk Laut Tiongkok Selatan*. Dikutip dari Kompasiana. Diakses melalui: [https://www.kompasiana.com/makenyok/mengenal-doc-dan-coc-untuk-laut-tiongkok-selatan\\_5944a61154188365033c75b2](https://www.kompasiana.com/makenyok/mengenal-doc-dan-coc-untuk-laut-tiongkok-selatan_5944a61154188365033c75b2) Pada 7 Februari 2018

yang berada di Asia Timur yang diprediksi akan menjadi titik awal bagi negara – negara di benua Asia dalam menyaingi negara – negara barat.

Dalam konflik sengketa Laut China Selatan, Presiden Donald Trump menawarkan diri untuk menjadi mediator untuk mengatasi konflik tersebut. Presiden Donald Trump mengatakan, “saya adalah seorang mediator dan arbiter yang sangat baik. Saya dapat membantu dalam cara apapun, bilang saja”. Walaupun Amerika Serikat tidak memiliki posisi di dalam sengketa Laut China Selatan, akan tetapi Amerika Serikat telah memberikan kritik terhadap China yang telah sewenang – wenang melakukan perluasan wilayahnya yang juga diklaim oleh negara – negara lain di Asia Tenggara (Kabar 24, 2017).

Kerja sama yang terjalin antara Amerika Serikat dan Filipina berdasarkan adanya hubungan saling ketergantungan. Bagi Filipina, Amerika Serikat merupakan partner kerja sama yang cukup penting dilihat dari sejarah kerja sama sebelumnya, dimana Amerika Serikat telah banyak membantu Filipina khususnya dalam bidang pertahanan dan keamanan. Sedangkan dari pihak Amerika Serikat, Filipina merupakan negara yang cukup penting untuk dipertahankan sebagai parter kerja samanya. Amerika Serikat membutuhkan akses yang mudah untuk berada di kawasan Asia – Pasifik, mengingat pentingnya kawasan tersebut sebagai jalur perdagangan. Khususnya untuk kepentingan pada sengketa Laut China Selatan, Amerika Serikat telah melakukan kerja sama patroli angkatan laut dengan Filipina di Laut China Selatan.

#### e. Kebijakan ‘America First’

Kebijakan *America First* merupakan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintahan Donald Trump dengan maksud Amerika Serikat yang menjadi prioritas utama. Seperti yang dinyatakan oleh Presiden Donald Trump dalam pidato usai pelantikannya yang disiarkan langsung di berbagai media massa, ia menyatakan bahwa "Kebijakan – kebijakan baru disampaikan di setiap kota dan negara bagian. Mulai hari ini dan seterusnya visi yang baru mulai berlaku di negara kita, yaitu menempatkan Amerika Serikat sebagai yang pertama (America First)". Presiden Donald Trump juga mengatakan, "Kita tetap menjalin hubungan yang bersahabat dan beritikad baik dengan berbagai negara dengan tetap

mendahulukan kepentingan Amerika Serikat. Hal ini merupakan hak setiap bangsa untuk mendahulukan kepentingan nasionalnya”. Presiden Donald Trump juga menekankan bahwa Pemerintahan baru Amerika Serikat di bawah kepemimpinannya menerapkan kebijakan – kebijakan ekonomi yang mendahulukan kepentingan nasional dan kepentingan warga negara Amerika Serikat.

Ia mengatakan bahwa kebijakan ekonomi Amerika Serikat yang baru mengikuti dua aturan utama, yaitu membeli produk – produk dalam negeri Amerika Serikat (Buy American) dan mempekerjakan warga Amerika Serikat (Hire American). Seperti yang dikatakan oleh Presiden Donald Trump yaitu "Kita akan membuat warga Amerika Serikat kembali bekerja dan membangun negara ini dengan “tangan” warga Amerika Serikat. Beli produk Amerika dan pekerjaan orang Amerika" (Tirto, 2017).

Terkait hubungan kerja sama antara Amerika Serikat dan Filipina, kebijakan *America First* yang dibuat oleh Presiden Donald Trump telah mendapatkan tanggapan yang positif dari Presiden Rodrigo Duterte. Presiden Filipina tersebut tertarik dengan kebijakan *America First* yang diterapkan di Amerika Serikat. Juru bicara kepresidenan Filipina, Andanar, mengatakan bahwa Presiden Amerika Serikat memiliki kepercayaan pada proteksionisme “*America First*” yang mendorong rakyatnya untuk melayani kepentingan negara mereka sendiri, disini Amerika Serikat dan Filipina telah berbagi kebijakan tersebut, juru bicara kepresidenan tersebut mengatakan bahwa Filipina memiliki kebijakan luar negeri yang bebas, dan Presiden Rodrigo Duterte beranggapan bahwa melayani kepentingan negara adalah suatu hal yang sangat penting (Okezone News, 2017).

### **3.3 Hubungan Bilateral Amerika Serikat dan Filipina Masa Pemerintahan Sebelum Donald Trump**

Amerika Serikat dan Filipina pada masa Pemerintahan Barack Obama telah membangun kerja sama yang cukup baik. Pada masa Pemerintahan Barack Obama, beberapa kerja sama telah dilakukan oleh kedua negara ini baik kerja sama yang sebelumnya pernah dilakukan maupun kerja sama yang baru. Namun

disini hubungan Amerika Serikat dan Filipina mulai merenggang terjadi pada saat akhir masa jabatan Barack Obama, yaitu terjadi pada akhir tahun 2016, dimana setelah Filipina melakukan pergantian Presiden yang dimenangkan oleh Rodrigo Duterte. Awal Amerika Serikat dan Filipina mengalami hubungan yang merenggang yaitu terjadi ketika Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Barack Obama tidak sependapat terhadap kebijakan yang dijalankan oleh Presiden Rodrigo Duterte mengenai perang melawan Narkoba. Pada akhirnya Presiden Filipina, Rodrigo Duterte mengeluarkan pernyataan untuk putus hubungan secara diplomatik dengan Amerika Serikat.

Namun putus hubungan yang dikatakan oleh Pemerintah Filipina disini tidak benar – benar dilakukan, pernyataan tersebut hanya merupakan emosi sementara dari Pemerintah Filipina terhadap Amerika Serikat karena ketidaksetujuan Amerika Serikat terhadap kebijakan Filipina mengenai perang melawan Narkoba. Kerenggangan yang terjadi antara Amerika Serikat dan Filipina ini menimbulkan beberapa hal atau beberapa bentuk kerja sama yang sempat akan dihentikan, yang sebelumnya telah dijalankan oleh kedua negara tersebut. Salah satu bentuk kerja sama yang sempat akan dihentikan pada masa Pemerintahan Barack Obama dan Rodriogo Duterte adalah latihan militer bersama, atau dalam kerja sama kedua negara ini disebut *Balikatan*. Presiden Rodrigo Duterte menyatakan bahwa latihan militer pada tahun 2016 menjadi latihan militer bersama yang terakhir kalinya antara Amerika Serikat dengan Filipina (BBC Indonesia, 2016).

Namun demikian pada tahun 2017, pada saat Presiden Amerika Serikat sudah digantikan oleh Donald Trump, pada tahun ini latihan militer bersama tetap dilakukan. Latihan militer bersama pun kembali dilakukan pada tahun 2017 walaupun dengan jumlah pasukan tentara yang lebih sedikit dari tahun sebelumnya (VOA Indonesia, 2017). Selain digelar kembali latihan militer yang sebelumnya sempat diberhentikan dan kini kembali dilakukan, ancaman pengusiran diplomat Uni Eropa oleh Presiden Rodrigo Duterte juga telah dibatalkan. Juru bicara kepresidenan Filipina mengatakan bahwa hal tersebut merupakan berita yang salah terkait pengusiran dute besar Eropa, ia mengatakan

bahwa tidak ada perintah untuk mengusir mereka. Juru bicara kepresidenan Filipina mengatakan bahwa kemarahan Presiden Rodrigo Duterte dipicu oleh adanya laporan dari media yang salah, yang menganggap bahwa Uni Eropa telah bersekongkol untuk mengeluarkan Filipina dari PBB (Suara Merdeka, 2017).

Hubungan Amerika Serikat dan Filipina akhirnya mulai membaik setelah sebelumnya mengalami hubungan yang merenggang. Amerika Serikat dan Filipina mulai kembali melakukan beberapa kerja sama yang sebelumnya sempat terhambat karena masalah yang terjadi. Hal tersebut dilakukan oleh Amerika Serikat dan Filipina mengingat adanya hubungan saling ketergantungan oleh kedua negara. Kedua negara terus berupaya untuk melanjutkan hubungan kerja sama bilateral mereka yang sudah terjalin selama kurang lebih 70 tahun.

### **3.4 Amerika Serikat dengan Filipina Masa Pemerintahan Donald Trump**

Pada bulan November 2017, Donald Trump menyampaikan niatnya untuk berkunjung ke Filipina. Kunjungan ini dilakukan sekaligus untuk menghadiri acara puncak pertemuan Asia Timur bersama dengan beberapa pemimpin dunia lainnya. Sedangkan dalam percakapan melalui telepon pada tanggal 29 April 2017, kedua pemimpin yaitu Presiden Donald Trump dan Presiden Rodrigo Duterte membahas sejumlah pembahasan, dimana selain membahas mengenai aliansi kedua negara juga membahas mengenai penanggulangan Narkoba yang juga dibicarakan oleh Presiden Rodrigo Duterte dan Presiden Donald Trump. Dalam percakapan tersebut, mereka juga membahas mengenai kemungkinan ancaman program nuklir Korea Utara. Pembicaraan yang dilakukan juga mencakup keprihatinan masing – masing mengenai isu keamanan regional (Republika, 2017).

Presiden Donald Trump pun mengunjungi Filipina, tepatnya pada tanggal 12 November 2017. Kunjungan tersebut sekaligus merupakan acara pertemuan puncak Perhimpunan Bangsa – Bangsa di Asia Tenggara (ASEAN). Kunjungan di Filipina merupakan kunjungan terakhir setelah mengunjungi beberapa negara anggota ASEAN, diantaranya adalah Jepang, Korea Selatan, China, Vietnam, dan Filipina. Presiden Donald Trump dan Presiden Rodrigo Duterte pun bertemu dan

saling menyampaikan pendapat mereka, salah satunya adalah berbicara mengenai kebijakan pemberantasan Narkoba oleh Presiden Rodrigo Duterte. Pada masa Pemerintahan Donald Trump saat ini, Amerika Serikat mendukung atas kebijakan Presiden Rodrigo Duterte. Kebijakan ini sebelumnya mendapat kecaman dari Barack Obama, sebagai Presiden Amerika Serikat yang memerintah sebelum Presiden Donald Trump (National Public Radio, 2017).

Kunjungan ini pun sekaligus digunakan sebagai pertemuan dalam rangka untuk memperbaiki hubungan Amerika Serikat dan Filipina yang sebelumnya sempat merenggang akibat dari kebijakan Presiden Rodrigo Duterte mengenai perang melawan Narkoba. Presiden Donald Trump dan Presiden Rodrigo Duterte bertemu dalam acara tersebut dan membicarakan hubungan baik yang terjalin antara Amerika Serikat dan Filipina.

Namun demikian, sejauh ini yang terjadi adalah kedua negara tersebut tidak benar – benar putus hubungan. Hal tersebut hanya emosi sementara dari pihak Pemerintah Filipina karena kecaman yang diberikan dari Amerika Serikat. Dalam pertemuan di Manila tersebut, Dindo Manhit, Presiden Stratbase ADR Institute, Manila mengatakan yaitu "Pembentukan pertahanan dan militer tidak benar – benar goyah dalam keinginan Pemerintah Filipina untuk melanjutkan kerja sama, dukungan, dan aliansi dengan Amerika Serikat." Seorang Profesor di De La Salle University di Manila, Renato De Castro juga mengatakan, "Tidak ada yang berubah dan tidak terjadi apa – apa, pasukan militer Filipina menghadap dan bertanya kepadanya, apa yang anda maksud dengan perpisahan?, Ia berkata itu bukan perpisahan, itu tidak berarti memutuskan hubungan kita dengan Amerika Serikat, hanya merencanakan sebagai kebijakan luar negeri yang independen" (National Public Radio, 2017).

Menteri Luar Negeri Filipina juga mengatakan yaitu "Walaupun pertemuan antara Presiden Donald Trump dan Presiden Rodrigo Duterte tidak akan menyelesaikan semua masalah antara kedua negara, namun demikian hal itu akan memperbaiki hubungan keduanya. Prasangka negatif dan naik turun hubungan Amerika Serikat dan Filipina memang ada, terutama pada akhir masa

Pemerintahan Barack Obama, akan tetapi hal itu sudah diperbaiki oleh Presiden Donald Trump” (Kabar 24, 2017).

Kedua negara ini pun bisa dikatakan sudah membaik. Hal ini didukung dengan kesepakatan antara kedua pemimpin yaitu Presiden Donald Trump dan Presiden Rodrigo Duterte mengenai kebijakan perang melawan Narkoba di Filipina. Sejauh ini yang terjadi adalah kesepakatan antara Amerika Serikat dan Filipina untuk kembali melakukan kerja sama dan memperbaiki hubungan yang lebih baik.

Masa Pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump memang baru berjalan satu tahun, akan tetapi dalam memperbaiki hubungan yang sebelumnya sempat merenggang, hal ini merupakan perkembangan yang cukup signifikan. Karena disini kedua negara yaitu Amerika Serikat dan Filipina sudah cukup lama menjalin kerja sama, yang memang dapat sangat mengganggu berjalannya beberapa kerja sama antara kedua negara yang sudah berjalan dengan baik apabila hubungan kedua negara ini tidak diperbaiki.

### **3.5 Kerja Sama Amerika Serikat dan Filipina yang Terjalin Pada Masa Pemerintahan Donald Trump**

Terdapat beberapa kerja sama yang terjalin antara Amerika Serikat dan Filipina pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump. Bermula pada saat Presiden Donald Trump mengundang Presiden Duterte melalui percakapan telepon untuk hadir di Gedung Putih, percakapan ini terjadi pada tanggal 29 April 2017. Salah satu yang dibahas dalam percakapan yang dilakukan melalui telepon tersebut adalah pembahasan mengenai Korea Utara (CNN, 2017).

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump juga memberikan apresiasi terhadap Presiden Rodrigo Duterte dan menyampaikan bagaimana ia memahami tantangan yang dihadapi Presiden Rodrigo Duterte di Filipina, khususnya untuk masalah kejahatan Narkoba di Filipina, pernyataan tersebut memberikan tanda bahwa Presiden Donald Trump menyetujui kebijakan yang diterapkan oleh Filipina. Terdapat beberapa kerja sama yang terjalin antara Amerika Serikat dan Filipina yang sudah dilakukan pada masa Pemerintahan Presiden Donald Trump.

Beberapa kerja sama tersebut diantaranya adalah bantuan dari Amerika Serikat kepada Filipina terhadap kebijakan Narkoba yang dijalankan oleh Presiden Rodrigo Duterte di Filipina, melanjutkan latihan militer bersama yang digelar setiap tahun oleh kedua negara, dimana sebelumnya pada masa Pemerintahan Barack Obama, Presiden Rodrigo Duterte sempat mengatakan bahwa latihan militer bersama pada tahun 2016 menjadi latihan militer bersama yang terakhir. Kerja sama lain yang dilakukan adalah dengan pemberian bantuan oleh Amerika Serikat kepada Filipina terkait pemberantasan kelompok militan ISIS yang menyerang Filipina.

### 3.5.1 Bantuan Amerika Serikat terhadap Kebijakan Narkoba di Filipina

Filipina merupakan negara yang berada di wilayah Asia Tenggara dengan kejahatan Narkoba yang cukup besar. Menurut laporan UNODC<sup>7</sup>, Filipina menjadi negara penghasil jenis Narkoba *methamphetamine hydrochlorid* atau yang lebih sering dikenal dengan sabu terbesar di dunia. Selain itu, Filipina juga menjadi negara di wilayah Asia tenggara yang menjadi transit perdagangan Narkoba, seperti *methamphetamine* kristal dan ganja. Jenis Narkoba yang menjadi dominan di negara Filipina sendiri adalah *methamphetamine* kristal, ganja, dan inhalas (Anggraini, 2015: 42).

Menurut UNODC, pada tahun 2014, permintaan Narkoba di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur mengalami peningkatan. Hal ini dipicu oleh semakin tingginya jumlah dari jenis – jenis Narkoba yang disita secara global, dimana wilayah Asia Timur, Asia Tenggara, dan Amerika Utara yang memiliki jumlah yang cukup tinggi dibandingkan wilayah lain. Dapat diartikan bahwa jumlah Narkoba di wilayah Asia telah berkembang pesat, khususnya untuk jenis Narkoba *Amphetamine – Type Stimulants* (ATS). Filipina dan Myanmar telah menjadi

---

<sup>7</sup>UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime): Merupakan sebuah kantor yang didirikan oleh PBB yang khusus mengatur tentang urusan Narkoba, melakukan kontrol pada Narkoba dan pencegahan kejahatan, yang dibentuk pada tahun 1997. UNODC. 2014. *Laporan UNODC: Penyitaan Sabu di Asia dan Amerika Utara Mendongkrak Rekor Tertinggi di Tingkat Global*. Dikutip dari UNODC. Diakses melalui: [https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/2014/05/gsa/2014\\_05\\_14\\_Bahasa\\_ID\\_N\\_UNODC\\_PressRelease\\_Global\\_Synthetic\\_Drugs\\_2014\\_EMBARGOED\\_to\\_1100\\_TOKYO\\_20.05.14.pdf](https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/2014/05/gsa/2014_05_14_Bahasa_ID_N_UNODC_PressRelease_Global_Synthetic_Drugs_2014_EMBARGOED_to_1100_TOKYO_20.05.14.pdf) Pada 7 Maret 2018

negara yang menjadi produsen berskala besar yang telah memenuhi permintaan Narkoba jenis sabu dan zat psikoaktif di wilayah Asia (UNODC, 2014).

Sebagai negara yang memiliki kejahatan Narkoba yang cukup besar di wilayah Asia Tenggara, Presiden Rodrigo Duterte telah membuat kebijakan untuk memberantas kejahatan Narkoba di Filipina, dengan membunuh para pelaku kejahatan Narkoba, baik para pengedar Narkoba maupun para pengguna Narkoba yang menolak untuk ditangkap. Sejauh ini, Presiden Rodrigo Duterte telah memberikan peringatan kepada para pelaku kejahatan Narkoba bahwa ia bertujuan untuk membunuh siapapun yang terlibat dalam kejahatan Narkoba di Filipina, ia berkata “Jangan menghancurkan negara kami, karena saya akan membunuh anda” (BBC Indonesia, 2016).

Asisten Deputi *International Narcotics and Law Enforcement* (INL), James Walsh mengatakan yaitu, “Kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mengatasi suplai Narkoba di Filipina”. Walsh juga mengatakan yaitu, “Filipina dan negara – negara lain tengah menghadapi isu Narkoba, disini seharusnya kebijakan tersebut diterapkan untuk penyuplai dan proses produksi”. Walsh juga menjelaskan seharusnya yang dilakukan oleh Pemerintahan Rodrigo Duterte adalah menggalakkan program pengurangan permintaan obat (*supply reduction program*), penguatan kapasitas sistem peradilan pidana, dan penguatan maritim dengan tujuan untuk menjawab tantangan rute distribusi via laut. Amerika Serikat terus mendukung dan memantau Pemerintah Filipina dengan program *supply reduction program*, peraturan perundangan, dan bantuan maritim (Liputan 6, 2018).

Kerja sama yang terjalin antara Amerika Serikat dan Filipina yang sudah berjalan cukup lama telah menimbulkan sikap untuk saling membantu dalam menyelesaikan masalah antar kedua negara. Dalam hal ini yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk Filipina dalam kebijakan perang melawan Narkoba di Filipina adalah dengan pemberian bantuan berupa dana. Pemberian bantuan tersebut diberikan kepada Badan Anti – Narkoba Filipina oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat yang digunakan untuk operasi anti – Narkoba di Filipina.

Bantuan dana yang diberikan Amerika Serikat untuk Filipina ini sebesar US\$2 juta atau 27 miliar rupiah. Bantuan dana yang diberikan ini digunakan untuk membantu Filipina dalam operasi perang melawan kejahatan Narkoba dibawah Pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte. Juru bicara kepresidenan Filipina mengatakan bahwa Filipina sangat mengapresiasi bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat (CNN Indonesia, 2017).

Namun demikian, Amerika Serikat sebagai partner kerja sama bagi Filipina juga harus mengatur bagaimana memberikan bantuan terhadap Filipina untuk kebijakan perang melawan Narkoba yang dinilai telah melanggar hak asasi manusia. Amerika Serikat sebagai negara yang cukup berpengaruh di dunia, juga harus mengimbangi bahwa Amerika Serikat menjadi panutan bagi negara – negara lain di dunia. Dalam hal ini, Amerika Serikat harus berpikir dua kali dalam menyikapi masalah tersebut, bahwa sebagai negara besar Amerika Serikat harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun disisi lain, Amerika Serikat juga tetap mempertahankan Filipina sebagai sekutunya yang sudah menjalin kerja sama selama 70 tahun (Mata Mata Politik, 2017).

### 3.5.2 Amerika Serikat dan Filipina Melanjutkan Latihan Militer Gabungan

Amerika Serikat dan Filipina membentuk latihan militer gabungan yang dinamakan “*Balikatan*”. *Balikatan* merupakan latihan militer bersama yang diadakan setiap tahun di bawah *Mutual Defence Treaty* (MDT) pada tahun 1951 yang artinya bahu membahu. Kerja sama dalam bidang militer ini telah mencerminkan pertumbuhan tekad Filipina dan Amerika Serikat dalam meningkatkan kemampuan melakukan kerja sama militer (Ebri, 2016).

Pada tahun 2014 dalam latihan militer gabungan *Balikatan*, Filipina melibatkan kurang lebih 3.000 tentara dan Amerika Serikat melibatkan 2.500. Latihan gabungan *Balikatan* yang dilakukan pada tanggal 5 Mei 2014 ini dilakukan selama 10 hari, diantaranya bertempat di Provinsi Zambales dan Palawan yang berada di dekat wilayah sengketa Laut China Selatan. Kemudian pada tahun 2015, Filipina melibatkan 5.000 tentara dan Amerika Serikat melibatkan 6.500 (Ebri, 2016).

Amerika Serikat berkomitmen mendukung Filipina dalam menghadapi Tiongkok setelah adanya *Enhanced Defense Cooperation Agreement* (EDCA). Lebih dari 1.000 tentara Angkatan Darat Amerika Serikat bergabung melaksanakan latihan di pangkalan militer di kawasan hutan di Filipina. Latihan militer yang dilakukan selama 10 hari di Pulau Luzon, Pulau Palawan dan Pulau Panay dilaksanakan di dekat wilayah perairan yang disengketakan Tiongkok. Marinir Amerika Serikat Christopher Mahoney mengatakan latihan tahun 2015 melibatkan pendaratan amfibi, latihan tembak menembak dan pengawasan maritim yang lebih canggih. Jumlah personil Amerika Serikat yang mengunjungi Filipina bergantung kepada skala aktivitas kerja sama militer yang diselenggarakan di pangkalan militer Angkatan Bersenjata Filipina. Penempatan personil Amerika Serikat tidak ditempatkan secara permanen di bawah *Enhanced Defense Cooperation Agreement* (EDCA) sesuai yang disetujui oleh kedua belah pihak (Ebri, 2016).

Pada tahun 2016, Filipina melakukan pergantian Presiden dan dimenangkan oleh Rodrigo Duterte. Ia memberikan pernyataan bahwa, pada tahun 2016 menjadi tahun untuk latihan militer gabungan yang terakhir bagi Amerika Serikat dan Filipina. Pernyataan tersebut terkait dengan kekecewaan Presiden Rodrigo Duterte kepada Pemerintah Amerika Serikat yang telah menilai Filipina melanggar HAM dalam kebijakannya memberantas kejahatan Narkoba yang diterapkan di Filipina. Presiden Rodrigo Duterte memberikan pernyataan pada saat berkunjung ke Hanoi pada tanggal 28 September 2016 yaitu, “Saya sampaikan kepada kalian, bahwa itu akan menjadi latihan militer gabungan terakhir antara Filipina dengan Amerika Serikat, terakhir kalinya” (CNN Indonesia, 2016).

Namun pada awal masa Pemerintahan Presiden Donald Trump saat ini, Amerika Serikat dan Filipina kembali berusaha untuk memperbaiki hubungan yang sebelumnya sempat merenggang. Beberapa hal yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump dalam memperbaiki hubungan dengan Filipina adalah dengan melanjutkan latihan militer gabungan, atau yang disebut dengan *Balikatan*. Latihan militer gabungan kembali dilakukan pada tahun 2017.

Latihan militer yang sebelumnya sempat berhenti tersebut akhirnya kembali diadakan pada tanggal 8 Mei 2017, namun pada tahun ini latihan militer dilakukan dengan jumlah personel yang lebih sedikit dari tahun sebelumnya, yaitu sekitar 5.400 personel, dibandingkan sebelumnya yaitu 11.500 pasukan militer. Latihan militer bersama tahun ini diadakan selama sepuluh hari dan lebih dikhususkan untuk penanggulangan bencana dan pertempuran anti – terorisme, tidak diikuti latihan untuk operasi pertahanan (VOA Indonesia, 2017).

### 3.5.3 Kerja Sama Amerika Serikat dan Filipina dalam Memberantas Kelompok Militan ISIS di Filipina

Terjadinya penyerangan oleh kelompok militan ISIS di Marawi, Filipina berawal dari salah satu keluarga yang berpengaruh di Mindanao. Keluarga ini merupakan keluarga kaya raya yang memiliki dendam terhadap Pemerintah Filipina. Farhana Maute, seorang ibu yang berusia 60 tahun yang dikenal sebagai seorang perempuan yang pendiam. Sebagai keluarga dengan kekayaan yang melimpah, keluarga Farhana tidak banyak menyita perhatian publik. Namun ternyata diam – diam Farhana Maute telah memelihara milisi bersenjata (Kompas, 2017).

Dendam yang muncul tersebut berawal dari dua tahun lalu, pada saat keluarga Maute berseteru dengan Wali Kota Butig, yaitu Dimnatang Pansar pada saat pemilihan pemenang tender proyek Pemerintah. Masalah pun terjadi, militer Filipina *turun tangan* untuk membela Pansar. Keluarga Maute yang terdesak pun mengumpulkan kelompok militan ISIS yang kemudian mendeklarasikan perang terhadap Pemerintah Filipina (Kompas, 2017).

Seorang peneliti senior di Rajaratnam *School of International Studies*, Joseph Franco yang sering melakukan kerja sama dengan militer Filipina menduga bahwa keluarga Maute menyatakan kesetiaan pada ISIS hanya sebagai gertakan untuk menakut – nakuti klan Pansar. Dalam hal ini Franco menyatakan tidak menemukan bukti bahwa Farhana Maute mendapat pengaruh radikalisasi dari pihak lain (Kompas, 2017).

Sebagai sekutu dari Filipina, Amerika Serikat berusaha untuk membantu menyelesaikan konflik yang terjadi antara Filipina dengan kelompok militan ISIS yang terjadi kota Marawi, dengan memberikan bantuan. Pemberian bantuan tersebut berupa pengiriman sebuah pesawat pengintai, P3 Orion pada tanggal 9 Juni 2017. Aksi penyerangan tersebut setidaknya telah menewaskan ratusan orang, diantaranya adalah 666 anggota milisi, 147 tentara Filipina, dan 47 warga sipil yang tewas sejak kelompok militan ISIS tersebut menduduki kota Marawi di Filipina (CNN Indonesia, 2017).

Pada tanggal 17 September 2017, Pemerintah Filipina mengklaim telah berhasil merebut pusat komando kelompok militan ISIS di kota Marawi. Pemimpin militer Filipina, Jenderal Eduardo Ano mengatakan, “Aksi perebutan komando ISIS oleh militer Filipina ini digelar dengan baku tembak yang mematikan”. Ia mengatakan bahwa keberhasilan militer Filipina dalam merebut pusat komando kelompok militan ISIS ini membuat kelompok radikal tersebut menjadi lemah. Militer Filipina terus melakukan operasi pembersihan untuk mengusir kelompok militan ISIS di Filipina, khususnya di kota Marawi (BBC Indonesia, 2017).

#### 3.5.4 Amerika Serikat dan Filipina dalam Memperkuat Perdagangan

Amerika Serikat dan Filipina telah melakukan pertemuan pada bulan Juli 2017, dalam rangka untuk membahas perjanjian *ASEAN – US trade and investment framework agreement* (TIFA), yaitu perjanjian antara ASEAN dengan Amerika Serikat yang dibentuk pada tahun 2006 dengan tujuan untuk memperkuat perdagangan dan investasi ASEAN dengan Amerika Serikat. Pada pertemuan tersebut, Amerika Serikat dan Filipina bersepakat untuk saling bekerja sama dalam rangka untuk mengembangkan perdagangan bebas yang adil dan seimbang antara kedua negara. Pertemuan tersebut diselenggarakan dengan tujuan untuk memperluas hubungan perdagangan antara Amerika Serikat dengan negara – negara di kawasan Asia Pasifik di bawah Pemerintahan Presiden Donald Trump (Executive Office of the President, 2017).

Pertemuan TIFA ini diketuai oleh Asistan Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat, Barbara Weisel dan Menteri Perdagangan Filipina Ceferino Rodolfo. Pada pertemuan tersebut, Amerika Serikat dan Filipina membahas mengenai isu – isu perdagangan bilateral, diantaranya membahas mengenai pertanian, bea cukai, investasi, dan lain – lain. Selain itu, Amerika Serikat dan Filipina saling bersepakat untuk bekerja sama dengan tujuan untuk memajukan agenda perdagangan dan investasi Amerika Serikat dengan ASEAN (Executive Office of the President, 2017).

Pada pertemuan ini, dihadiri oleh pejabat kantor perwakilan dagang Amerika Serikat, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Pertanian, Perdagangan, dan badan pembangunan internasional Amerika Serikat. Sedangkan dari Filipina, dihadiri oleh pejabat Departemen Perdagangan dan Industri, Pertanian, keuangan, Biro Bea Cukai, Dewan Investasi, Otoritas Zona Ekonomi Filipina, Otoritas Pengembangan Ekonomi Nasional, Badan Pengadaan dan Kebijakan Pemerintah (Executive Office of the President, 2017).

## BAB 5. KESIMPULAN

Amerika Serikat dan Filipina telah menjalin hubungan kerja sama selama kurang lebih 70 tahun, yang berawal setelah Amerika Serikat memberikan kemerdekaan kepada Filipina yaitu pada tahun 1947. Sebagai negara yang sudah lama melakukan hubungan kerja sama, tidak dapat dihindarkan adanya konflik di dalam hubungan kerja sama tersebut. Salah satunya masalah yang terjadi pada masa Pemerintahan Barack Obama, mengenai kebijakan pemberantasan kejahatan Narkoba di Filipina yang menimbulkan kontroversi dari beberapa pihak. Kebijakan tersebut dinilai telah melanggar hak asasi manusia, karena telah menewaskan kurang lebih 4.100 pelaku kejahatan Narkoba tanpa melalui jalur hukum yang jelas. Dalam kebijakan tersebut, banyak pihak yang mengecam Pemerintah Filipina, salah satunya adalah Amerika Serikat.

Beberapa masalah pun terjadi, berawal dari emosi sementara dari pihak Filipina, seperti kerja sama yang akan dihentikan, dan lain – lain. Namun demikian, seiring berjalannya waktu terkait diadakannya pergantian Presiden di Amerika Serikat yang dimenangkan oleh Donald Trump, hubungan kerja sama antara Amerika Serikat dan Filipina semakin membaik. Pada masa ini, Pemerintah Amerika Serikat menyadari bahwa hubungan kerja sama dengan Filipina harus tetap dipertahankan. Mengingat bahwa hubungan kerja sama tersebut sudah dilakukan sejak 70 tahun yang lalu. Amerika Serikat menyadari bahwa apabila hubungan kerja sama dengan Filipina putus, dapat menimbulkan berbagai masalah yang muncul terkait keberadaan Amerika Serikat yang ada di wilayah Asia Pasifik.

Filipina memiliki peran penting bagi Amerika Serikat di wilayah Asia Pasifik. Kekuasaan Amerika Serikat di wilayah Asia Pasifik bergantung pada kerja samanya dengan Filipina. Oleh karena itu yang harus dilakukan oleh Amerika Serikat, khususnya pada masa Pemerintahan Presiden Donald Trump adalah dengan memperbaiki hubungan yang sebelumnya sempat memburuk, dengan tujuan untuk menghindari putusnya hubungan kerja sama antara kedua negara.

Terdapat beberapa faktor yang melandasi kepentingan Amerika Serikat di era pemerintah Donald Trump untuk tetap melanjutkan kerja sama bilateral dengan Filipina, diantaranya adalah faktor adanya pemahaman yang sama antara Presiden Donald Trump dengan Presiden Rodrigo Duterte mengenai perang melawan Narkoba. Kebijakan Narkoba Filipina merupakan pemicu keretakan hubungan antara Amerika Serikat dengan Filipina, karena adanya ketidaksepahaman antara Barack Obama dengan Presiden Rodrigo Duterte. Namun demikian, saat ini yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat pada masa Pemerintahan Presiden Donald Trump adalah memberikan dukungan atas kebijakan tersebut. Dukungan ini pun membuat hubungan kerja sama antara kedua negara menjadi lebih baik.

Faktor kedua adalah munculnya ancaman keamanan bersama antara Amerika Serikat dengan Filipina masa Pemerintahan Donald Trump dalam memerangi ISIS di Filipina. Pada saat itu Amerika Serikat mengirim bantuan terhadap Filipina berupa pesawat pengintai P3 Orion untuk membantu mengatasi serangan yang terjadi. Sebagaimana yang sudah tercantum didalam perjanjian pertahanan oleh kedua negara dalam *Mutual Defense Treaty* yang berisi tentang kedua negara akan saling melindungi apabila salah satu negara mendapat ancaman dari pihak luar.

Faktor yang ketiga adalah adanya kepentingan Amerika Serikat terhadap Filipina untuk mengimbangi pengaruh China dalam sengketa Laut China Selatan. Sebagai negara besar, Amerika Serikat tidak ingin jika China mengunggulinya. Salah satu yang dilakukan Amerika Serikat dalam mengatasi masalah tersebut adalah dengan mempererat hubungannya kerja samanya dengan negara – negara di Asia. Terkait sengketa Laut China Selatan, bisa dikatakan bahwa China membuat konflik tersebut semakin rumit, dengan memperluas kekuasaannya di wilayah tersebut yang membuat negara – negara lain di wilayah Asia menjadi geram. Hal ini menjadi kesempatan bagi Amerika Serikat untuk menjadi penengah di dalam konflik tersebut, dengan memanfaatkan Filipina sebagai salah satu negara yang menempati wilayah strategis di sengketa Laut China Selatan.

**DAFTAR PUSTAKA****BUKU**

- Hara, Abubakar Eby. 2010. Pengantar Analisis Politik Luar Negeri dari Realisme sampai Konstruktifis. Jogjakarta: Nuansa Cendekia
- Holsti, K.J. 1998. Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis , Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga
- Krisna, Didi. 1993. Kamus Politik Internasional. Jakarta : Grasindo
- Kusumohamidjojo, Budiono. 1987. Hubungan Internaional: Kerangka Suatu Analisis. Bandung: Binacipta.
- Moleong, Lexy J. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Perwita, A.A dan Y. M, Yani. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Plano, Jack. C, dan Roy Olton. 1990. Kamus Hubungan Internasional. Bandung: Abardan.
- Richard W. Mansbach. 2008. Introduction to Global Politics. London and New York: Routledge.
- Rifhan, Arif. 2010, hal 424. Al – Qur’an Tiga Bahasa. Depok: Al – Huda Kelompok Gema Insani
- Rifhan, Arif. 2010, hal 527. Al – Qur’an Tiga Bahasa. Depok: Al – Huda Kelompok Gema Insani

**JURNAL**

- Asano, Diba Amalia. 2017. Kerjasama Pertahanan Amerika Serikat dan Filipina dalam Konteks Buckpassing Tahun 2014 – 2016. *JOM FISIP* Vol. 4 No. 2.
- Planifolia, Vanilla. 2017. Strategi Rebalancing Amerika Serikat di Kawasan Asia Pasifik. *Jurnal Hubungan Internasional* Vol. 6 No. 1.

Suryadi, Agita. 2015. Kepentingan Indonesia Menyetujui Kerjasama Ekonomi Dengan Slovakia Dalam Bidang Energi Dan Infrastruktur. *JOM FISIP* Vol 2:2.

#### INTERNET

Amanda Puspita Sari. 2016. *AS Yakin Hubungan Dengan Filipina Dapat Membaik*. Dikutip dari CNN Indonesia. Diakses melalui: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20161025075922-106-167693/as-yakin-hubungan-dengan-filipina-dapat-membaik/> Pada tanggal 6 Maret 2018

Anggraini, Devi. 2015. *Kebijakan ASEAN dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika dan Obat – Obatan Berbahaya di Asia Tenggara*. Dikutip dari *Jurnal Unair*. Diakses melalui: <http://www.journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahia4c94d642efull.pdf> Pada tanggal 9 Mei 2018

Antara Jateng. 2017. *Kebijakan Utama Presiden Donald Trump Perang Terhadap Terorisme*. Dikutip dari Antara Jateng. Diakses melalui: <https://jateng.antaranews.com/detail/kebijakan-utama-presiden-donald-trump-perang-terhadap-terorisme.html> Pada tanggal 8 Mei 2018

APEC. 2017. Dikutip dari APEC. Diakses melalui: <https://www.apec.org/About-Us/About-APEC/Member-Economies> Pada tanggal 9 Mei 2018

Ardiyanti, Dwi. 2017. *Imprediktabilitas Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat: Tantangan Dan Ancaman Rezim Donald Trump Terhadap Asean*. Diakses melalui: <https://media.neliti.com/media/publications/196359-ID-imprediktabilitas-kebijakan-luar-negeri.pdf> Pada tanggal 10 Februari 2018

Ariefana, Pebriansya. 2016. *Filipina Nyatakan Putus Hubungan Sekutu dengan Amerika Serikat*. Diakses melalui: <http://www.suara.com/news/2016/10/21/052732/filipina-nyatakan-putus-hubungan-sekutu-dengan-amerika-serikat> Pada tanggal 21 Desember 2017

Armandhanu, Denny. 2016. *Duterte Akan Setop Latihan Militer Gabungan AS – Filipina*. Dikutip melalui CNN Indonesia. Diakses melalui:

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160929095014-106-161991/duterte-akan-setop-latihan-militer-gabungan-as-filipina> Pada tanggal 25 Desember 2017

BBC Indonesia. 2015. *Kekayaan Asia Mengalahkan Eropa*. Dikutip dari BBC Indonesia. diakses melalui:

[http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/06/150616\\_majalah\\_kaya\\_asia](http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/06/150616_majalah_kaya_asia) Pada tanggal 9 Januari 2018

-----, 2016. *Duterte kutuk lagi presiden AS: Pergilah ke neraka, Obama!*. Dikutip dari BBC Indonesia. Diakses melalui:

[http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/10/161005\\_dunia\\_duterte\\_kutuk\\_obama](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/10/161005_dunia_duterte_kutuk_obama) Pada tanggal 4 Maret 2018

-----, 2016. *Filipina akan Tunda Latihan Bersama dengan Amerika Serikat*. Dikutip melalui BBC Indonesia. diakses melalui:

[http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/10/161007\\_dunia\\_filipina\\_amerika\\_serikat](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/10/161007_dunia_filipina_amerika_serikat) Pada tanggal 9 Januari 2018

-----, 2017. *Presiden Duterte mengusir Seluruh Diplomat Uni Eropa dalam 24 Jam*. Dikutip dari BBC Indonesia. diakses melalui:

<http://www.bbc.com/indonesia/dunia-41605203> Pada tanggal 6 Maret 2018

-----, 2017. *Tentara Filipina Klaim Rebut Pusat Komando ISIS di Marawi*. Dikutip dari BBC Indonesia. Diakses melalui:

<http://www.bbc.com/indonesia/dunia-41303362> Pada tanggal 20 April 2018

-----, 2018. *Presiden Trump Usulkan Hukuman Mati bagi Pengedar Narkoba*. Dikutip dari BBC Indonesia. Diakses melalui:

<http://www.bbc.com/indonesia/dunia-43466874> Pada tanggal 16 April 2018

Chandran, Nyshka. 2017. *Mengapa Hubungan Amerika – Filipina Menjadi Kunci Dua Masalah Terbesar Asia*. Dikutip dari Mata – Mata Politik. Diakses melalui:

<https://www.matamatapolitik.com/mengapa-hubungan-amerika-filipina-menjadi-kunci-dua-masalah-terbesar-asia/> Pada tanggal 17 April 2018

CNN Indonesia. 2015. Kartel Sinaloa, Kerajaan Narkoba 'Si Pendek'. Dikutip dari CNN Indonesia. Diakses dari:  
[https://www.vice.com/id\\_id/article/wnzpbb/upaya-berbahaya-melacak-jejak-anggota-triad](https://www.vice.com/id_id/article/wnzpbb/upaya-berbahaya-melacak-jejak-anggota-triad) Pada tanggal 3 Februari 2018

-----, 2016. *Obama Minta Duterte Perangi Kejahatan dengan Cara yang Benar*. Dikutip melalui CNN Indonesia. diakses melalui:  
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160908172724-106-1571105/obama-minta-duterte-perangi-kejahatan-dengan-cara-yang-benar> Pada tanggal 24 Desember 2018

-----, 2017. *Duterte Berhenti Kritik AS Demi Bantuan Lawan ISIS Marawi*. Dikutip dari CNN Indonesia. Diakses melalui:  
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170929152946-106-244970/duterte-berhenti-kritik-as-demi-bantuan-lawan-isis-marawi> Pada tanggal 16 Januari 2018

-----, 2017. *Perang ISIS di Marawi Masuki Bulan Ketiga Filipina Krisis*. Dikutip dari CNN Indonesia. Melalui:  
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170724073132-106-229830/perang-isis-di-marawi-masuki-bulan-ketiga-filipina-krisis/> Pada tanggal 16 Januari 2018

-----, 2017. *Trump Beri 27 M untuk Perang Narkoba Kontroversial Duterte*. Dikutip dari CNN Indonesia. Diakses melalui:  
<https://m.cnnindonesia.com/internasional/20171117075042-134-256254/trump-beri-27-m-untuk-perang-narkoba-kontroversial-duterte> Pada tanggal 15 Maret 2018

Council on Foreign Relations. 2016. *Rebalance to Asia Led to Drop in Security Assistance for Southeast Asia*. Dikutip dari Council on Foreign Relations. Diakses melalui:  
[https://www.cfr.org/interactives/rebalance-asia?utm\\_source=redirect&utm\\_medium=earned&utm\\_campaign=legacy\\_campaignotr-marketing\\_use-rebalancetoasia#!/rebalance-asia?utm\\_source=redirect&utm\\_medium=earned&utm\\_campaign=legacy\\_campaignotr-marketing\\_use-rebalancetoasia](https://www.cfr.org/interactives/rebalance-asia?utm_source=redirect&utm_medium=earned&utm_campaign=legacy_campaignotr-marketing_use-rebalancetoasia#!/rebalance-asia?utm_source=redirect&utm_medium=earned&utm_campaign=legacy_campaignotr-marketing_use-rebalancetoasia) Pada tanggal 28 Mei 2018

Council on Foreign Relation. 2016. *The U.S – Philippines Defense Alliance*. Dikutip dari Council on Foreign Relation. Diakses melalui:

<https://www.cfr.org/backgrounder/us-philippines-defense-alliance> Pada tanggal 21 Maret 2018

Cullinane, Susannah. 2017. *Trump Invites Philippines' Duterte to the White House*. Dikutip dari CNN. Diakses melalui: <http://edition.cnn.com/2017/04/30/politics/philippines-duterte-trump/> Pada tanggal 18 Februari 2018

Detik News. 2016. *Presiden Filipina Rodrigo Duterte sebut Obama 'Anak Pelacur'*. Dikutip dari Detik News. Diakses melalui: <https://news.detik.com/internasional/3291692/presiden-filipina-rodrigo-duterte-sebut-obama-anak-pelacur> Pada tanggal 25 Oktober 2017

Ebri, Shindy Apvionita. 2016. *Motivasi Filipina Melakukan Kerjasama Pertahanan Dan Keamanan Dengan Amerika Serikat Dalam Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) Tahun 2014*. Diakses melalui: <http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=439446> Pada tanggal 13 Oktober 2017

Executive Office of the President. 2017. *United States and Philippines Strengthen Engagement on Trade*. Dikutip melalui Executive Office of the President. Diakses melalui <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2017/july/united-states-and-philippines> Pada tanggal 9 November 2017

Global Affairs Canada. 2016. *The ASEAN Member Countries*. Dikutip dari Global Affairs Canada. Diakses melalui: [http://www.international.gc.ca/asean/asean\\_countries-pays\\_anase.aspx?lang=eng](http://www.international.gc.ca/asean/asean_countries-pays_anase.aspx?lang=eng) Pada tanggal 18 April 2018

Gumilar, Dodo Argo. 2013. *Kerjasama Antara Filipina dan Amerika Serikat Dalam Menghadapi Ancaman Abu Sayyaf Group di Filipina Selatan*. Diakses melalui: <http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/58924/Dodo%20Argo%20Gumilar.pdf?sequence=1> Pada tanggal 3 Oktober 2017

Harian Sejarah. 2017. *Proyeksi Kebijakan Militer Presiden Donld Trump*. Dikutip melalui harian Sejarah. Diakses melalui:

<http://www.hariansejarah.id/2017/03/proyeksi-kebijakan-militer-presiden-donal-trump.html> Pada tanggal 9 Januari 2018

Haryadi, Malvyandie. 2016. *Presiden Duterte Usir Tentara AS, Hubungan Filipina dan Amerika Kembali Memanas*. Dikutip dari Tribun News. Diakses melalui:

<http://www.tribunnews.com/internasional/2016/09/13/presiden-duterte-usir-tentara-as-hubungan-filipina-dan-amerika-kembali-memas> Pada tanggal 18 Februari 2018

Huffington Post. 2017. *Trump to Duterte: 'You're Just Like Me'*. Diakses melalui: [http://www.huffingtonpost.com/entry/trump-to-duterte-youre-just-like-me\\_us\\_5930312de4b07572bdbf9a8e](http://www.huffingtonpost.com/entry/trump-to-duterte-youre-just-like-me_us_5930312de4b07572bdbf9a8e) Pada tanggal 9 Oktober 2018

Inquirer. 2017. *US spy planes helping Philippine troops in Marawi*. Dikutip dari Inquirer. Diakses melalui:

<http://globalnation.inquirer.net/157864/us-spy-planes-helping-philippine-troops-marawi> Pada tanggal 5 Juni 2018

IRIB Indonesia. 2014. *Akses Militer Amerika Serikat di Filipina*. Dikutip dari IRIB Indonesia. Diakses melalui :

[http://indonesian.irim.ir/editorial/fokus/item/77977Akses\\_Militer\\_Amerika\\_Serikat\\_di\\_Filipina](http://indonesian.irim.ir/editorial/fokus/item/77977Akses_Militer_Amerika_Serikat_di_Filipina) Pada tanggal 8 November 2017

Jakarta Greater. 2016. *Kebijakan Duterte Berantas Narkoba Melanggar HAM?*. Dikutip dari Jakarta Greater. Diakses melalui:

<https://jakartagreater.com/kebijakan-duterte-berantas-narkoba-melanggar-ham/> Pada tanggal 23 Februari 2018

Kabar 24. 2017. *Di Bawah Trump, AS Menjalin Hubungan Erat dengan Duterte*. Dikutip dari kabar 24. Diakses melalui:

<http://kabar24.bisnis.com/read/20171113/19/708518/di-bawah-trump-as-menjalin-hubungan-erat-dengan-duterte-> Pada tanggal 17 Maret 2018

-----, 2017. *Trump Tawarkan Diri jadi Mediator Konflik laut China Selatan*. Dikutip dari Kabar 24. Diakses melalui:

<http://kabar24.bisnis.com/read/20171113/19/708416/trump-tawarkan-diri-jadi-mediator-konflik-laut-china-selatan> Pada tanggal 19 Maret 2018

Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBI. 2018. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses melalui: <https://kbbi.web.id/> Pada 10 Februari 2018

Kemlu. 2009. *Indonesia dan Filipina menjadi Icon Demokrasi di Asia Tenggara*. Dikutip dari Website Kemlu. Diakses melalui: <https://www.kemlu.go.id/manila/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/INDONESIA-DAN-FILIPINA-MENJADI-ICON-DEMOKRASI-DI-ASIA-TENGGARA.aspx> Pada tanggal 21 Februari 2018

Killalea, Debra. 2017. *China bisa Singkirkan Amerika dari Laut China Selatan Tanpa Perang*. Dikutip dari Mata – Mata Politik. Diakses melalui: <https://www.matamatapolitik.com/mungkinkah-china-kalahkan-amerika-di-laut-china-selatan-tanpa-perang/> Pada tanggal 3 Mei 2018

Kompas. 2016. *Ketegangan di Laut China Selatan Pengaruhi Perdagangan Global*. Dikutip dari Kompas. Diakses melalui: <https://ekonomi.kompas.com/read/2016/07/20/143000626/Ketegangan.di.Laut.China.Selatan.Pengaruhi.Perdagangan.Global> Pada tanggal 9 Mei 2018

------. 2016. *Laut China Selatan, Perairan Menggiurkan Sumber Sengketa 6 Negara*. Dikutip dari Kompas. Diakses melalui: <https://internasional.kompas.com/read/2016/07/13/17401251/laut.china.selatan.perairan.menggiurkan.sumber.sengketa.6.negara> Pada tanggal 28 Mei 2018

------. 2017. *Duterte Tarik Ucapan Pengusiran Diplomat UE*. Dikutip melalui *Press Reader*. Diakses melalui: <https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20171014/281741269645447> Pada tanggal 4 Desember 2017

------. 2017. *Siapa Farhana Maute? Ibu Penebus Dendam Keluarga di Marawi?*. Dikutip melalui Kompas. Diakses melalui: <http://internasional.kompas.com/read/2017/06/23/21475541/siapa.farhana.maute.ibu.penebus.dendam.keluarga.di.marawi> Pada tanggal 19 Januari 2018

Kompasiana. 2017. *Mengenal DOC dan COC untuk Laut Tiongkok Selatan*. Dikutip dari Kompasiana. Diakses melalui:

[https://www.kompasiana.com/makenyok/mengenai-doc-dan-coc-untuk-laut-tiongkok-selatan\\_5944a61154188365033c75b2](https://www.kompasiana.com/makenyok/mengenai-doc-dan-coc-untuk-laut-tiongkok-selatan_5944a61154188365033c75b2) Pada tanggal 7 Februari 2018

-----, 2018. *Bagaimana Kebijakan AS Terhadap Asia – Pasifik Setelah Presiden Trump Setahun Berkantor?. Dikutip dari Kompasiana.* Diakses melalui:

<https://www.kompasiana.com/makenyok/5a671a20bde57560e03a4323/bagaimana-kebijakan-as-terhadap-asia-pasifik-setelah-presiden-trump-setahun-berkantor> Pada tanggal 5 Juni 2018

Liputan 6. 2016. *10 Faktor Pemicu Donald Trump Menang dan Hillary Clinton 'Keok'.* Dikutip dari Liputan 6. Diakses melalui:

<http://global.liputan6.com/read/2649039/10-faktor-pemicu-donald-trump-menang-dan-hillary-clinton-keok> Pada tanggal 12 Mei 2018

-----, 2017. *Asia Pasifik Bakal Jadi Wilayah Terkaya di Dunia Pada 2019.* Dikutip dari Liputan 6. Diakses melalui:

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/2990447/asia-pasifik-bakal-jadi-wilayah-terkaya-di-dunia-pada-2019> Pada tanggal 19 April 2018

-----, 2018. *Biro Narkotik AS: Kebijakan 'War On Drugs' Filipina Tak Sukses.* Dikutip dari Liputan 6. Diakses melalui:

<http://global.liputan6.com/read/3244759/biro-narkotik-as-kebijakan-war-on-drugs-filipina-tak-sukses> Pada tanggal 8 Juni 2018

Mata – Mata Politik. 2017. *Mengapa Hubungan Amerika – Filipina Menjadi Kunci Dua Masalah Terbesar Asia.* Dikutip dari Matamata Politik. Diakses melalui:

<https://www.matamatapolitik.com/mengapa-hubungan-amerika-filipina-menjadi-kunci-dua-masalah-terbesar-asia/> Pada tanggal 2 Maret 2018

MCC, 2004. *About MCC.* Diakses melalui:

<https://www.mcc.gov/about> Pada tanggal 4 Mei 2018

McKirby, Euan and Ivan Watson. 2017. *Bloodied and Broken: Rising Toll of Philippines' War with ISIS.* Dikutip dari CNN. Diakses melalui:

<http://edition.cnn.com/2017/06/25/asia/philippines-marawi-isis/index.html> Pada tanggal 18 Februari 2018

- Metro TV News. 2017. *50 tahun ASEAN, Filipina Sampaikan Visi Keketuaan*. Dikutip dari Metro TV News. Diakses melalui:  
<http://internasional.metrotvnews.com/asia/wkBqARlb-50-tahun-asean-filipina-sampaikan-visi-keketuaan> Pada tanggal 24 Februari 2018
- , 2018. *Persediaan Minyak Mentah AS Menurun*. Dikutip dari Metro TV News. Dikutip dari:  
<http://internasional.metrotvnews.com/amerika/Wb72pq0N-persediaan-minyak-mentah-as-menurun> Pada tanggal 18 Juli 2018
- Muhaimin. 2016. *Duterte: Semua Pasukan AS Harus Henggang Dari Filipina Selatan*. Dikutip dari Sindonews. Diakses melalui:  
<https://international.sindonews.com/read/1138766/40/duterte-semua-pasukan-as-harus-henggang-dari-filipina-selatan-1473726530> Pada tanggal 18 Oktober 2017
- National Public Radio. 2017. *Trump and Duterte Could Reset the Shaky U.S – Philippine Alliance*. Dikutip Melalui National Public Radio. Diakses melalui:  
<https://www.npr.org/2017/11/11/563475763/trump-to-meet-philippines-duterte> Pada tanggal 15 Desember 2017
- Official Gazette. 2014. *Document: Enhanced Defense Cooperation Agreement between the Philippines and the United States*. Dikutip dari Official Gazette. Diakses melalui:  
<http://www.officialgazette.gov.ph/2014/04/29/document-enhanced-defense-cooperation-agreement/> Pada tanggal 19 Oktober 2017
- Okezone News. 2017. *Presiden Filipina Lirik Kebijakan Trump untuk Ditiru*. Dikutip dari Okezone News. Diakses melalui:  
<https://news.okezone.com/read/2017/01/23/18/1598467/presiden-filipina-lirik-kebijakan-trump-untuk-ditiru> Pada tanggal 17 Mei 2018
- Orandain, Simone. 2012. *Filipina dan AS Pererat Hubungan Diplomatik dan Pertahanan*. Diakses melalui:  
<https://www.voaindonesia.com/a/filipina-dan-as-pererat-hubungan-diplomatik-dan-pertahanan/1563872.html> Pada tanggal 18 Mei 2018
- Pars Today. 2017. *Kebohongan HAM dari Politik AS dan Kroninya*. Dikutip dari Pars Today. Diakses melalui:

[http://parstoday.com/id/news/world-i46263-kebohongan\\_ham\\_dari\\_politik\\_as\\_dan\\_kroninya](http://parstoday.com/id/news/world-i46263-kebohongan_ham_dari_politik_as_dan_kroninya) Pada tanggal 19 Juli 2018

Pratomo, Yulistyo. 2016. *Ini Penyebab Kemenangan Donald Trump di Pemilu AS*. Dikutip dari:

<https://www.merdeka.com/dunia/ini-penyebab-kemenangan-donald-trump-di-pemilu-as.html> Pada tanggal 21 April 2018

Rappler. 2016. *Filipino fishermen able to access Scarborough Shoal – Palace*. Dikutip dari Rappler. Diakses melalui:

<https://www.rappler.com/nation/150646-filipino-fishermen-access-scarborough-shoal> Pada tanggal 19 Juli 2018

Regencia, Ted. 2016. *Philippines: Duterte wants end to ‘war games’ with US*. Dikutip dari Aljazeera. Diakses melalui:

<http://www.aljazeera.com/news/2016/09/philippines-duterte-war-games-160928153948773.html> Pada tanggal 4 Februari 2018

Republika. 2017. *AS dan Filipina Kemabli Bangun Aliansi*. Diakses melalui:

<http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/global/17/04/30/op88ce284-as-dan-filipina-kembali-bangun-aliansi> Pada tanggal 25 Februari 2018

Riva Dessthania Suastha. 2016. *AS Batalkan Penjualan, Duterte Beli Senjata ke Rusia*. Dikutip dari CNN Indonesia. Diakses melalui:

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20161102182205-106169785/as-batalkan-penjualan-duterte-beli-senjata-ke-rusia/> Pada tanggal 21 Agustus 2017

Samosir, Hana Azarya. 2017. *Trump Beri 27 M untuk Perang Narkoba Kontroversial Duterte*. Dikutip dari CNN Indonesia. Diakses melalui:

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20171117075042-134-256254/trump-beri-27-m-untuk-perang-narkoba-kontroversial-duterte> Pada tanggal 14 Februari 2018

Sari, Apeca Ratna. 2017. *Perjanjian Kerjasama Pertahanan antara Amerika Serikat dan Filipina melalui Penandatanganan Enhanced Defense Cooperation Agreement Tahun 2014*. Diakses melalui:

<http://www.iisip.ac.id/content/perjanjian-kerjasama-pertahanan-antara-amerika-serikat-dan-filipina-melalui-pendandatanganan-pada-tanggal-28-Agustus-2017>

SIPRI. 2018. Sipri Military Expenditure Database. Dikutip dari SIPRI. Diakses melalui: <https://www.sipri.org/databases/milex> Pada tanggal 12 Juni 2018

Suara Merdeka. 2017. *Duterte Batal usir Diplomat Eropa*. Dikutip dari Suara Merdeka. Diakses melalui: <http://www.suaramerdeka.com/smcetak/detail/8494/Duterte-Batal-Usir-Diplomat-Eropa-Pada-tanggal-28-Desember-2017>

Suastha, Riva Dessthania. 2016. *Menang Electoral College, Trump Resmi jadi Presiden Baru AS*. Dikutip melalui CNN Indonesia. Diakses melalui: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20161220093956-134-180907/menang-electoral-college-trump-resmi-jadi-presiden-baru-as> Pada tanggal 9 April 2018

Tempo. 2016. *Sempat dibatalkan, Obama Akhirnya Mau Bertemu Duterte*. Diakses melalui: <https://m.tempo.co/read/news/2016/09/08/118802583/sempat-dibatalkan-obama-akhirnya-mau-bertemu-duterte> Pada tanggal 17 Oktober 2017

Tirto. 2017. *Tantangan Kebijakan Trump di Asia*. Dikutip melalui Tirto. Diakses melalui: <https://tirto.id/tantangan-kebijakan-trump-di-asia-czrW> Pada tanggal 7 Maret 2018

-----, 2017. *Trump Tekankan Kebijakan "America First"*. Dikutip melalui Tirto. Diakses melalui: <https://tirto.id/trump-tekankan-kebijakan-america-first-chrg> Pada tanggal 19 April 2018

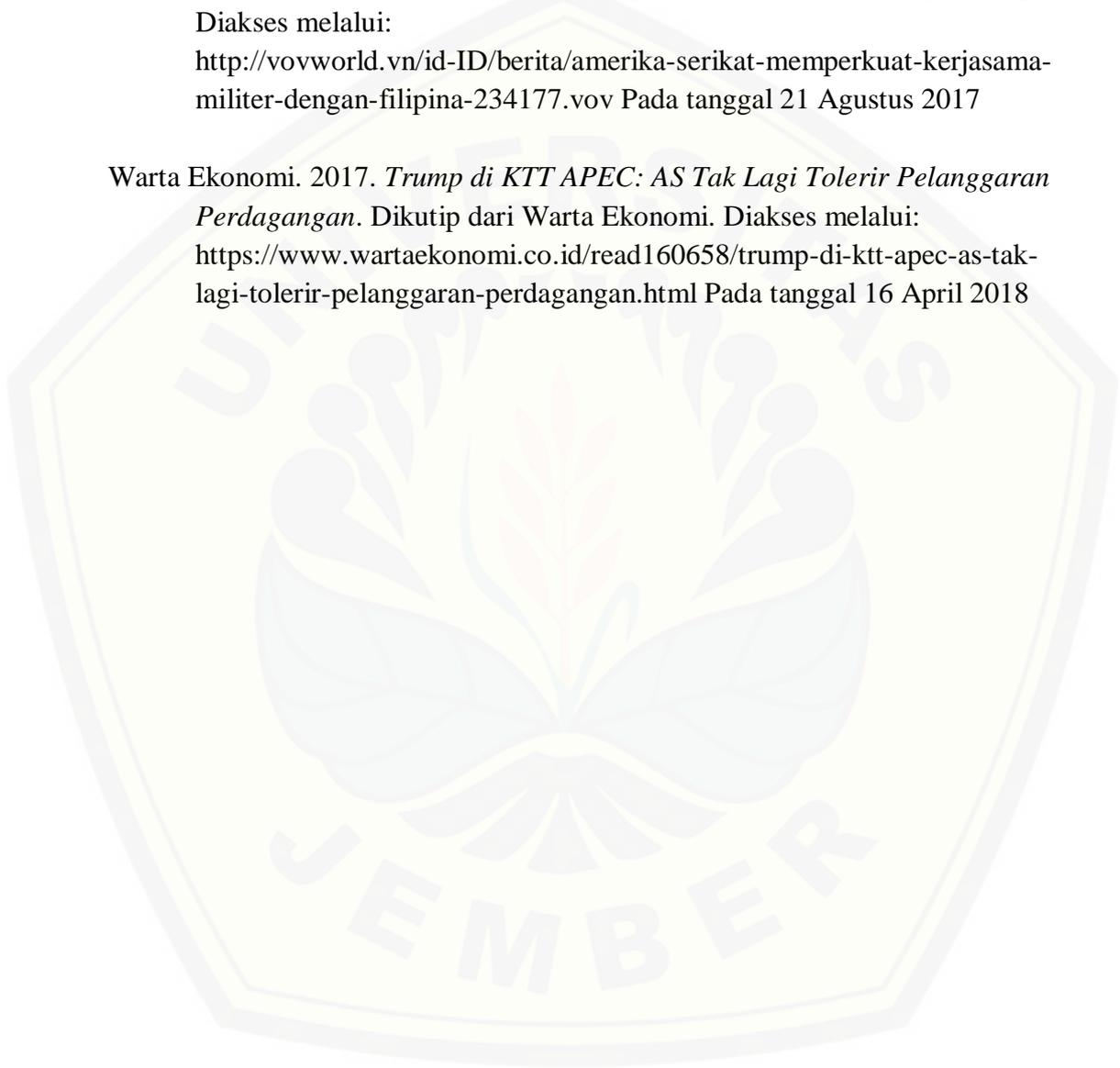
Tribun Jateng. 2016. *Dianggap Langgar HAM, Amerika Hentikan Pasukan Senapan Serbu Polisi Filipina*. Dikutip dari Tribun Jateng News. Diakses melalui: <http://jateng.tribunnews.com/2016/11/01/dianggap-langgar-ham-amerikan-hentikan-pasukan-senapan-serbu-polisi-filipina?page=1> Pada tanggal 23 Agustus 2017

- UNODC. 2014. *Laporan UNODC: Penyitaan Sabu di Asia dan Amerika Utara Mendongkrak Rekor Tertinggi di Tingkat Global*. Dikutip dari UNODC. Diakses melalui:  
[https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/2014/05/gsda/2014\\_05\\_14\\_Bahasa\\_IDN\\_UNODC\\_PressRelease\\_Global\\_Synthetic\\_Drugs\\_2014\\_EMBARGOED\\_to\\_1100\\_TOKYO\\_20.05.14.pdf](https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/2014/05/gsda/2014_05_14_Bahasa_IDN_UNODC_PressRelease_Global_Synthetic_Drugs_2014_EMBARGOED_to_1100_TOKYO_20.05.14.pdf) Pada tanggal 7 Maret 2018
- Van, Hong. 2014. *Tanggung Jawab Besar Presiden AS, Barack Obama dalam Kunjungan di Asia*. Dikutip dari VOV Indonesia. Diakses melalui:  
<http://vovworld.vn/id-ID/ulasan-berita/tanggung-jawab-besar-presiden-as-barack-obama-dalam-kunjungan-di-asia-232297.vov> Pada tanggal 20 Desember 2017
- Vice. 2017. *Upaya Berbahaya Melacak Jejak Anggota Triad*. Dikutip dari Vice. Diakses melalui:  
[https://www.vice.com/id\\_id/article/wnzpbb/upaya-berbahaya-melacak-jejak-anggota-triad](https://www.vice.com/id_id/article/wnzpbb/upaya-berbahaya-melacak-jejak-anggota-triad) Pada tanggal 18 Oktober 2018
- VOA Indonesia. 2015. *Terorisme dan Keamanan Nasional, Isu Utama Kampanye Pemilu Presiden AS*. Dikutip melalui VOA Indoensia. Diakses melalui:  
<https://www.voaindonesia.com/a/terorisme-dan-keamanan-nasional-isu-utama-kampanye-pemiu-presiden-as/3115209.html> Pada tanggal 19 Januari 2018
- , 2016. *Menhan AS: Asia – Pasifik Wilayah Terpenting untuk Masa Depan Amerika*. Dikutip dari VOA Indonesia. diakses melalui:  
<https://www.voaindonesia.com/a/menhan-as-asia-pasifik-wilayah-penting-masa-depan-as/3531373.html> Pada tanggal 18 Februari 2018
- , 2017. *Apa peran HAM dalam kebijakan Luar Negeri Trump?*. Dikutip melalui VOA Indonesia. Diakses melalui:  
<https://www.voaindonesia.com/a/peran-ham-kebijakan-luar-negeri-trump/3680822.html> Pada tanggal 10 Juni 2018
- , 2017. *AS dan Filipina Mulai Latihan Militer Bersama*. Dikutip dari VOA Indonesia. Diakses melalui:  
<https://www.voaindonesia.com/a/as-dan-filipina-mulai-latihan-militer-bersama/3842226.html> Pada tanggal 13 Februari 2018

-----, 2017. *Polisi Filipina dan AS Cari Pemimpin Aksi Terorisme di Marawi*. Dikutip dari Voa Indonesia. Diakses melalui:  
<https://www.voaindonesia.com/a/polisi-filipina-dan-as-cari-pemimpin-terorisme-di-marawi/3935601.html> Pada tanggal 1 Mei 2018

VOV World. 2014. *Amerika Serikat Memperkuat Kerjasama dengan Filipina*. Diakses melalui:  
<http://vovworld.vn/id-ID/berita/amerika-serikat-memperkuat-kerjasama-militer-dengan-filipina-234177.vov> Pada tanggal 21 Agustus 2017

Warta Ekonomi. 2017. *Trump di KTT APEC: AS Tak Lagi Tolerir Pelanggaran Perdagangan*. Dikutip dari Warta Ekonomi. Diakses melalui:  
<https://www.wartaekonomi.co.id/read160658/trump-di-ktt-apec-as-tak-lagi-tolerir-pelanggaran-perdagangan.html> Pada tanggal 16 April 2018



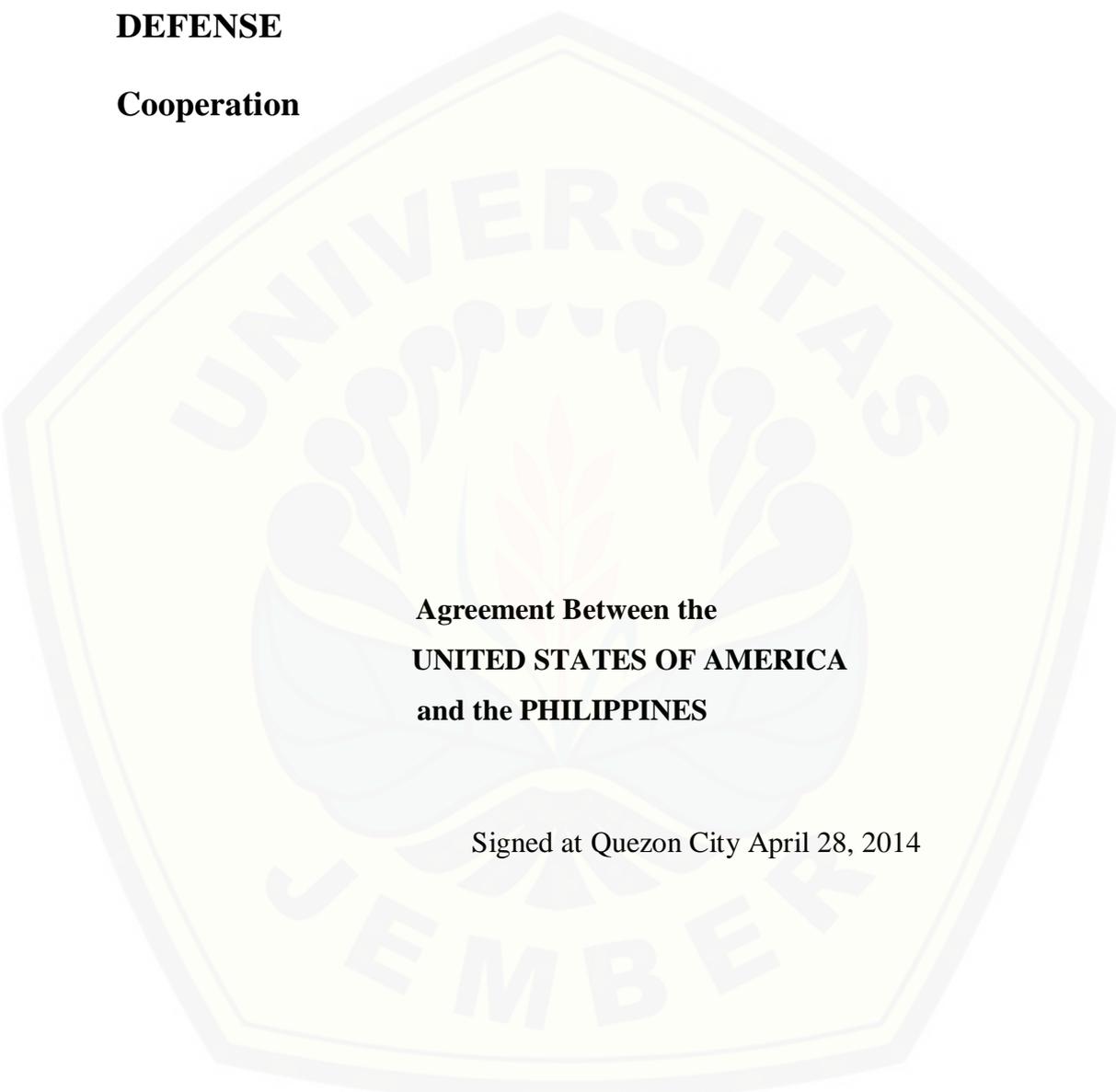
**Lampiran**

TREATIES AND OTHER INTERNATIONAL ACTS SERIES 14-625

---

**DEFENSE**

**Cooperation**



**Agreement Between the  
UNITED STATES OF AMERICA  
and the PHILIPPINES**

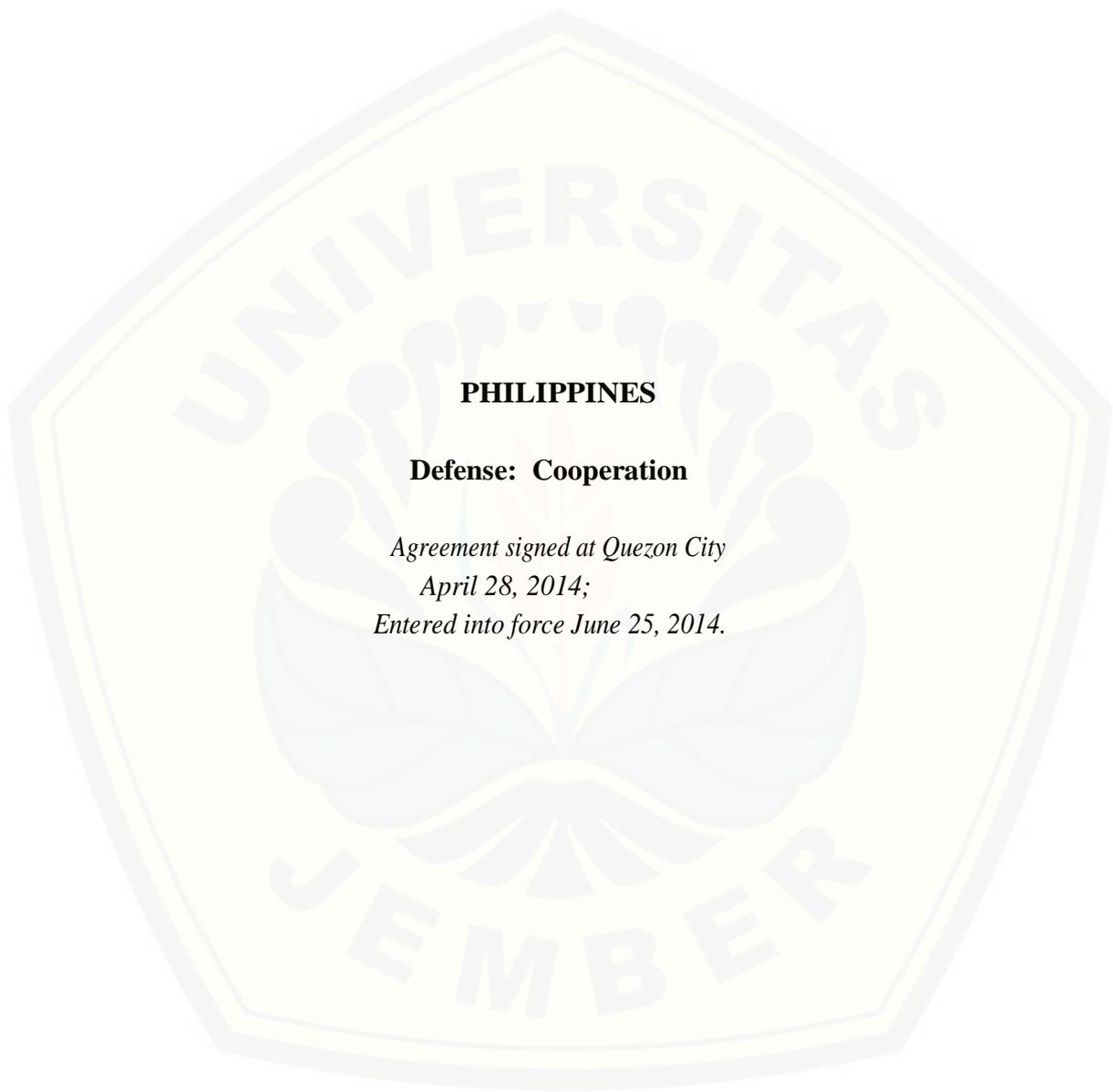
Signed at Quezon City April 28, 2014



## NOTE BY THE DEPARTMENT OF STATE

Pursuant to Public Law 89—497, approved July 8, 1966  
(80 Stat. 271; 1 U.S.C. 113)—

“ . . . the Treaties and Other International Acts Series issued under the authority of the Secretary of State shall be competent evidence . . . of the treaties, international agreements other than treaties, and proclamations by the President of such treaties and international agreements other than treaties, as the case may be, therein contained, in all the courts of law and equity and of maritime jurisdiction, and in all the tribunals and public offices of the United States, and of the several States, without any further proof or authentication thereof.”



**PHILIPPINES**

**Defense: Cooperation**

*Agreement signed at Quezon City*

*April 28, 2014;*

*Entered into force June 25, 2014.*

**AGREEMENT  
BETWEEN  
THE GOVERNMENT OF  
THE UNITED STATES OF AMERICA  
AND  
THE GOVERNMENT OF  
THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES  
ON ENHANCED DEFENSE COOPERATION**

**PREAMBLE**

The Government of the United States of America (the "United States"), and the Government of the Republic of the Philippines ("the Philippines"), hereinafter referred to jointly as "the Parties" and individually as a "Party";

Reaffirming their faith in the purposes and principles of the Charter of the United Nations and their desire to strengthen international and regional security;

Recalling and in furtherance of the Mutual Defense Treaty between the United States of America and the Republic of the Philippines (the "MDT"), signed at Washington on August 30, 1951, and the Agreement between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of the Philippines Regarding the Treatment of United States Armed Forces Visiting the Philippines (the "VFA"), signed in Manila on the tenth day of February 1998;

Recalling further Article I of the MDT, which states, "The Parties undertake, as set forth in the Charter of the United Nations, to settle any international disputes in which they may be involved by peaceful means in such a manner that international peace and security and justice are not endangered and to refrain in their international relations from the threat or use of force in any manner inconsistent with the purposes of the United Nations.";

Affirming that the Parties share an understanding for the United States not to establish a permanent military presence or base in the territory of the Philippines;

Recalling the Agreement for the Establishment of a Mutual Defense Board ("MDB"), concluded by exchange of notes at Manila on May 15, 1958, and the Agreement to Establish a Security Engagement Board ("SEB"), concluded by exchange of notes at Manila on April 11 and 12, 2006;

Recalling further the Mutual Logistics Support Agreement between the Department of Defense of the United States of America and the Department of National Defense of the Republic of the Philippines (the "MLSA"), with Annexes, signed at Quezon City on November 8, 2007, as extended;

Recalling the Parties' respective international obligations, including those provided under the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction and the Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction;

Recognizing that all United States access to and use of facilities and areas will be at the invitation of the Philippines and with full respect for the Philippine Constitution and Philippine laws;

Desiring to enhance cooperative capacities and efforts in humanitarian assistance and disaster relief;

Have agreed as follows:

#### **Article I PURPOSE AND SCOPE**

1. This Agreement deepens defense cooperation between the Parties and maintains and develops their individual and collective capacities, in furtherance of Article II of the MDT, which states that "the Parties separately and jointly by self-help and mutual aid will maintain and develop their individual and collective capacity to resist armed attack," and within the context of the VFA. This includes:

(a) Supporting the Parties' shared goal of improving interoperability of the Parties' forces, and for the Armed Forces of the Philippines ("AFP"), addressing short-term capabilities gaps, promoting long-term modernization, and helping maintain and develop additional maritime security, maritime domain awareness, and humanitarian assistance and disaster relief capabilities; and

(b) Authorizing access to Agreed Locations in the territory of the Philippines by United States forces on a rotational basis, as mutually determined by the Parties.

12/11

f

2. In furtherance of the MDT, the Parties mutually agree that this Agreement provides the principal provisions and necessary authorizations with respect to Agreed Locations.

3. The Parties agree that the United States may undertake the following types of activities in the territory of the Philippines in relation to its access to and use of Agreed Locations: security cooperation exercises; joint and combined training activities; humanitarian assistance and disaster relief activities; and such other activities as may be agreed upon by the Parties.

## **Article II DEFINITIONS**

1. "United States personnel" means United States military and civilian personnel temporarily in the territory of the Philippines in connection with activities approved by the Philippines, as those terms are defined in the VFA.

2. "United States forces" means the entity comprising United States personnel and all property, equipment, and materiel of the United States Armed Forces present in the territory of the Philippines.

3. "United States contractors" means companies and firms, and their employees, under contract or subcontract to or on behalf of the United States Department of Defense. United States contractors are not included as part of the definition of United States personnel in this Agreement, including within the context of the VFA.

4. "Agreed Locations" means facilities and areas that are provided by the Government of the Philippines through the AFP and that United States forces, United States contractors, and others as mutually agreed, shall have the right to access and use pursuant to this Agreement. Such Agreed Locations may be listed in an annex to be appended to this Agreement, and may be further described in implementing arrangements.

5. "Designated Authorities" means, respectively, the Philippine Department of National Defense, unless the Philippines otherwise provides written notice to the United States, and the United States Department of Defense, unless the United States otherwise provides written notice to the Philippines.

**Article III**  
**AGREED LOCATIONS**

1. With consideration of the views of the Parties, the Philippines hereby authorizes and agrees that United States forces, United States contractors, and vehicles, vessels, and aircraft operated by or for United States forces may conduct the following activities with respect to Agreed Locations: training; transit; support and related activities; refueling of aircraft; bunkering of vessels; temporary maintenance of vehicles, vessels, and aircraft; temporary accommodation of personnel; communications; prepositioning of equipment, supplies, and materiel; deploying forces and materiel; and such other activities as the Parties may agree.

2. When requested, the Designated Authority of the Philippines shall assist in facilitating transit or temporary access by United States forces to public land and facilities (including roads, ports, and airfields), including those owned or controlled by local governments, and to other land and facilities (including roads, ports, and airfields).

3. Given the mutuality of benefits, the Parties agree that the Philippines shall make Agreed Locations available to United States forces without rental or similar costs. United States forces shall cover their necessary operational expenses with respect to their activities at the Agreed Locations.

4. The Philippines hereby grants to the United States, through bilateral security mechanisms, such as the MDB and SEB, operational control of Agreed Locations for construction activities and authority to undertake such activities on, and make alterations and improvements to, Agreed Locations. United States forces shall consult on issues regarding such construction, alterations, and improvements based on the Parties' shared intent that the technical requirements and construction standards of any such projects undertaken by or on behalf of United States forces should be consistent with the requirements and standards of both Parties.

5. The Philippine Designated Authority and its authorized representative shall have access to the entire area of the Agreed Locations. Such access shall be provided promptly consistent with operational safety and security requirements in accordance with agreed procedures developed by the Parties.

6. United States forces shall be responsible on the basis of proportionate use for construction, development, operation, and maintenance costs at Agreed Locations. Specific funding arrangements may be defined in implementing arrangements.

**Article IV**  
**EQUIPMENT, SUPPLIES, AND MATERIEL**

1. The Philippines hereby authorizes United States forces, through bilateral security mechanisms, such as the MDB and SEB, to preposition and store defense equipment, supplies, and materiel (“prepositioned materiel”), including, but not limited to, humanitarian assistance and disaster relief equipment, supplies, and materiel, at Agreed Locations. United States forces shall notify the AFP in advance regarding the quantities and delivery schedules of defense equipment, supplies, and materiel that United States forces intend to preposition in Agreed Locations, as well as who will make such deliveries.
2. The Parties share a recognition of the benefits that such prepositioning could have for humanitarian assistance and disaster relief. The Parties also recognize the value of such prepositioning to the enhancement of their individual and collective defense capabilities.
3. The prepositioned materiel of United States forces shall be for the exclusive use of United States forces, and full title to all such equipment, supplies, and materiel remains with the United States. United States forces shall have control over the access to and disposition of such prepositioned materiel and shall have the unencumbered right to remove such prepositioned materiel at any time from the territory of the Philippines.
4. United States forces and United States contractors shall have unimpeded access to Agreed Locations for all matters relating to the prepositioning and storage of defense equipment, supplies, and materiel, including delivery, management, inspection, use, maintenance, and removal of such equipment, supplies and materiel.
5. The Parties share an intent that United States contractors may carry out such matters in accordance with, and to the extent permissible under, United States laws, regulations, and policies.
6. The prepositioned materiel shall not include nuclear weapons.

**Article V  
OWNERSHIP**

1. The Philippines shall retain ownership of and title to Agreed Locations.
2. The United States shall return to the Philippines any Agreed Locations, or any portion thereof, including non-relocatable structures and assemblies constructed, modified, or improved by the United States, once no longer required by United States forces for activities under this Agreement. The Parties or the Designated Authorities shall consult regarding the terms of return of any Agreed Locations, including possible compensation for improvements or construction.
3. United States forces and United States contractors shall retain title to all equipment, materiel, supplies, relocatable structures, and other moveable property that have been imported into or acquired within the territory of the Philippines by or on behalf of United States forces.
4. All buildings, non-relocatable structures, and assemblies affixed to the land in the Agreed Locations, including ones altered or improved by United States forces, remain the property of the Philippines. Permanent buildings constructed by United States forces become the property of the Philippines, once constructed, but shall be used by United States forces until no longer required by United States forces.
5. The Parties may consult regarding the possible transfer or purchase of equipment determined to be excess, as may be allowed by United States laws and regulations.

**Article VI  
SECURITY**

1. The Parties shall cooperate to take such measures as may be necessary to ensure the protection, safety, and security of United States forces and United States contractors, and the protection and security of official United States information in the territory of the Philippines.
2. The Philippines retains primary responsibility for security with respect to Agreed Locations.
3. United States forces are authorized to exercise all rights and authorities within Agreed Locations that are necessary for their operational control or defense,

including taking appropriate measures to protect United States forces and United States contractors. The United States should coordinate such measures with appropriate authorities of the Philippines.

4. The Parties shall take all reasonable measures to ensure the protection, safety, and security of United States property from seizure by or conversion to the use of any party other than the United States, without the prior written consent of the United States.

#### **Article VII UTILITIES AND COMMUNICATIONS**

1. The Philippines hereby grants to United States forces and United States contractors the use of water, electricity, and other public utilities on terms and conditions, including rates or charges, no less favorable than those available to the AFP or the Government of the Philippines in like circumstances, less charges for taxes and similar fees, which will be for the account of the Philippine Government. United States forces' costs shall be equal to their pro rata share of the use of such utilities.

2. The Parties recognize that it may be necessary for United States forces to use the radio spectrum. The Philippines authorizes the United States to operate its own telecommunication systems (as telecommunication is defined in the 1992 Constitution and Convention of the International Telecommunication Union ("ITU")). This shall include the right to utilize such means and services as required to ensure the full ability to operate telecommunication systems, and the right to use all necessary radio spectrum allocated for this purpose. Consistent with the 1992 Constitution and Convention of the ITU, United States forces shall not interfere with frequencies in use by local operators. Use of the radio spectrum shall be free of cost to the United States.

#### **Article VIII CONTRACTING PROCEDURES**

1. United States forces may contract for any materiel, supplies, equipment, and services (including construction) to be furnished or undertaken in the territory of the Philippines without restriction as to choice of contractor, supplier, or person who provides such materiel, supplies, equipment, or services. Such contracts shall be solicited, awarded, and administered in accordance with the laws and regulations of the United States.



2. United States forces shall strive to use Philippine suppliers of goods, products, and services to the greatest extent practicable in accordance with the laws and regulations of the United States.

**Article IX**  
**ENVIRONMENT, HUMAN HEALTH, AND SAFETY**

1. The Parties recognize and acknowledge the importance of protection of the environment and human health and safety in the context of activities covered by this Agreement and agree to implement this Agreement in a manner consistent with the protection of the natural environment and human health and safety and to pursue a preventative rather than reactive approach to environmental protection. To this end, the Parties shall cooperate to ensure problems that may arise are dealt with immediately in order to prevent any lasting damage to the environment or endangerment of human health and safety.

2. The United States confirms its intent to respect relevant Philippine environmental, health, and safety laws, regulations, and standards in the execution of its policies. The Philippines confirms its policy to implement environmental, health, and safety laws, regulations, and standards with due regard for the health and safety of United States forces and United States contactors. The Parties shall fully cooperate in the timely exchange between the competent representatives of the Parties of all relevant existing information concerning environmental and health protection at Agreed Locations. The environmental compliance standards applied by United States forces shall reflect, in accordance with its policies, the more protective of United States, Philippine, or applicable international agreement standards. To that end, during the development and periodic review of such environmental practices, the Parties shall cooperate and consult to ensure that Philippine standards are accurately reflected.

3. United States forces shall not intentionally release any hazardous materials or hazardous waste owned by it, and, if a spill occurs, shall expeditiously take action in order to contain and address environmental contamination resulting from the spill.

PLA

Ⓟ

**Article X  
IMPLEMENTATION**

1. All obligations under this Agreement are subject to the availability of appropriated funds authorized for these purposes.
2. As appropriate, the Parties or the Designated Authorities may enter into implementing arrangements to carry out the provisions of this Agreement, including with respect to activities at Agreed Locations and funding. Implementing arrangements concluded by the Designated Authorities shall enter into force upon the date of their signature.
3. Implementing arrangements may address additional details concerning the presence of United States forces at Agreed Locations and the functional relations between United States forces and the AFP with respect to Agreed Locations.
4. The Parties or their Designated Authorities intend to consult regularly concerning the implementation of this Agreement.

**Article XI  
RESOLUTION OF DISPUTES**

The Parties agree to resolve any dispute arising under this Agreement exclusively through consultation between the Parties. Disputes and other matters subject to consultation under this Agreement shall not be referred to any national or international court, tribunal, or other similar body, or to any third party for settlement, unless otherwise agreed by the Parties.

**Article XII  
ENTRY INTO FORCE, AMENDMENT, DURATION, AND  
TERMINATION**

1. This Agreement shall enter into force on the date of the last note exchanged between the Parties, through diplomatic channels, confirming the completion of all necessary internal procedures required for the entry into force thereof.
2. This Agreement, including any annex, may be amended by written agreement of the Parties, and such amendments shall enter into force in accordance with paragraph 1 of this Article.

3. Any annex appended to this Agreement shall form an integral part of this Agreement.

4. This Agreement shall have an initial term of ten years, and thereafter, it shall continue in force automatically unless terminated by either Party by giving one year's written notice through diplomatic channels of its intention to terminate this Agreement.

IN WITNESS THEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at Quezon City, in duplicate in English, this 28<sup>th</sup> day of April, 2014.

FOR THE GOVERNMENT OF THE  
UNITED STATES OF AMERICA:



FOR THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF THE PHILIPPINES:

